

**EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
(PPK) PASCA TSUNAMI DI KECAMATAN LHOKNGA
KABUPATEN ACEH BESAR**

TESIS

Disusun dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh:

**S U K M A N I A R
L4D 006 029**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

**EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)
PASCA TSUNAMI DI KECAMATAN LHOKNGA
KABUPATEN ACEH BESAR**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

**SUKMANIAR
L4D006029**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 9 Nopember 2007

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Nopember 2007

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

Ir. Sunarti, MT

Ir. Holi Bina Wijaya, MUM

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, Nopember 2007

SUKMANIAR
NIM L4D 006 029



*Meski tsunami memporakporandakan
pemukiman dan kehidupan manusia
Setelah ia berlalu kita harus bangkit kembali*

*"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan
itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah
kesulitan itu ada kemudahan."
(QS. Al-Insyirah: 5-6)*

Kupersembahkan karya ini :
Kepada kedua orang tuaku dan adik-adik tersayang
serta tunanganku tercinta..
Terima kasih
atas segala pengorbanan, doa dan curahan kasih sayang untukku...

ABSTRAK

Bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 26 Desember 2004 telah mengakibatkan kehancuran yang luar biasa. Adanya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga sebagai salah satu program pembangunan partisipatif dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah tsunami, namun kerusakan sarana prasarana yang sangat parah dan keterpurukan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Lhoknga telah mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat sehingga kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan di lingkungannya menjadi rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Adapun sarannya yaitu mengidentifikasi karakteristik masyarakat, mekanisme pengelolaan PPK, proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami dan elemen pemberdayaan masyarakat, kemudian menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami, menganalisis tingkat kondisi pemberdayaan masyarakat pasca tsunami sebelum dan setelah PPK, menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga dan merumuskan kesimpulan serta rekomendasi.

Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Untuk analisis tingkat kondisi pemberdayaan masyarakat pasca tsunami sebelum dan setelah PPK digunakan analisis skoring dan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga dan efektivitasnya digunakan analisis deskriptif.

Secara umum pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga kurang efektif dalam meningkatkan kondisi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang kurang efektif tersebut terutama disebabkan oleh tipologi keberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, sebelum program pembangunan diimplementasikan maka perlu dilakukan proses penyiapan masyarakat secara intensif berupa peningkatan motivasi (tahapan afektif), peningkatan wawasan pengetahuan (tahapan kognitif) dan peningkatan ketrampilan (tahapan psikomotorik) untuk menunjang peran masyarakat dalam pembangunan (tahapan konatif).

Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mon Ikeun (desa pantai) kurang efektif, hal ini terkait dengan kondisi pemukiman belum pulih, terbatasnya aktivitas masyarakat dalam mengelola pembangunan dan jiwa sosial yang rendah sehingga perlu adanya upaya percepatan pemulihan kondisi pemukiman dan peningkatan peran pemimpin/fasilitator desa untuk menumbuhkan motivasi masyarakat untuk bekerjasama. Sementara itu pemberdayaan masyarakat di Lambaro Seubun (desa pedalaman) juga kurang efektif, kondisi ini terkait dengan fasilitas pemukiman yang agak kurang, belum maksimalnya peran fasilitator desa dan Tim pengelola PPK desa dan kurangnya kemampuan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan akses informasi sehingga perlu adanya penyediaan fasilitas layanan umum, peningkatan kemampuan FD dan TPK PPK serta pengetahuan/ketrampilan individu masyarakat untuk mempermudah akses penyampaian aspirasi dan informasi. Sedangkan untuk masyarakat Meunasah Karieng (desa dataran rendah) maka pemberdayaan masyarakat cukup efektif, kondisi ini terkait dengan kualitas kepemimpinan Kepala Desa dan pelaku PPK yang cukup memadai, adanya ikatan sosial yang kuat dan besarnya kemauan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan PPK namun untuk keberlanjutan pembangunan dan peningkatan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa perlu adanya dukungan dana alokasi desa dan pengembangan media informasi pembangunan.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan.*

ABSTRACT

Earthquake disaster and tsunami which knock over Lhoknga District Aceh Besar Sub Province on 26 December 2004 have resulted remarkable ruination. Existence of District Development Program (PPK) Pasca tsunami in Lhoknga District as one of partisipative development program with community empowerment approach meant to support rehabilitate and reconstruct process in tsunami area, but damage of infrastructure which very hard and poor condition social economic of society in Lhoknga District pasca tsunami have resulted over a barrel of society so that society ability in management development in its environment become to lower.

This research purposes to study effectiveness community empowerment in management of PPK Pasca tsunami in Lhoknga District Aceh Besar Sub-Province. As for its target is to : identifying society characteristic, PPK mechanism management, community empowerment process in PPK management pasca tsunami and community empowerment element, then analyze community empowerment in PPK management pasca tsunami, analyzing community empowerment level pasca tsunami before and after PPK, analyzing community empowerment effectiveness in PPK management pasca tsunami in Lhoknga District and formulate conclusion and also recommend.

This Research method use quantitative analysis and qualitative technique. To analyze community empowerment in PPK management pasca tsunami used descriptive analysis, for analysis of mount society condition of pasca tsunami before and after PPK used scoring analysis and to analyze community empowerment effectiveness in PPK management pasca tsunami in Lhoknga District used descriptive analysis.

Commonly community empowerment in managing PPK pasca tsunami in Lhoknga district less effective in improving community empowerment condition. Community empowerment which less effective causing by typology of community resource. Therefore, before development program implemented need to conduct society preparation process intensively in the form increasing motivation (effective phase), increasing knowledge (cognitive phase) and increasing skill (psychomotoric phase) to support society role in development (conative phase).

Community empowerment in Mon Ikeun sub district (coast village) less effective, this matter related to settlement condition, limited society activity in manage development and low social spirit so need effort to acceleration to cure settlement condition and increasing village leader/facilitator role to growth society motivation to cooperate. Meanwhile community empowerment in Lambaro Seubun (hinterland village) also less effective, this condition related to less of settlement facility, village facilitator and Team of PPK management which not maximum and less of society ability to submitting aspiration and information access so need public service facility, increasing ability of FD and TPK PPK and also knowledge/skill individu to facilitate access to submitting aspiration and information. While for Meunasah Karieng society (lowland village), effectively of community empowerment related to leadership quality of village head and PPK perpetrator who qualified, strong of social tying and great of society willingness to involve in manage of PPK but for development continuity and increasing society awareness in developing village need village financial allocate supporting and development information media.

Keywords: *Effectiveness, community empowerment, district development program management*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hanya dengan izin-Nya kami dapat menyelesaikan tugas tesis yang berjudul "Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar". Tesis ini merupakan salah satu tahapan yang harus diselesaikan dalam studi di Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota (MTPWK) Universitas Diponegoro.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA selaku Ketua Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota (MTPWK) Universitas Diponegoro, atas segala arahnya.
2. Ir. Holi Bina Wijaya, MUM selaku Mentor dan Ir. Sunarti, MT selaku Co-Mentor yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penyusunan tesis ini.
3. Ir. Retno Widjajanti, MT dan Ir. Nany Yuliasuti, MSP selaku penguji yang telah memberi banyak masukan bagi perbaikan tesis ini.
4. H. Mohd. Zaini, ST selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Besar yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan data untuk penyusunan tesis ini.
5. Para staf pemerintah dan konsultan yang terkait dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami di tingkat Kabupaten, Kecamatan Lhoknga serta masyarakat di tiga desa lokasi penelitian yang telah membantu proses pengumpulan data untuk penyusunan tesis ini.
6. Yang tersayang Ayah, Ibu dan Adik-adikku yang selalu memberikan perhatian, bantuan, dorongan, pengorbanan dan doa.
7. Tunanganku tercinta, yang selalu membantu dan memotivasi diriku dengan kesabaran, kesetiaan dan curahan kasih sayang.
8. Teman-teman MTPWK Bappenas 3 UNDIP yang telah banyak membantu selama menjalani studi.
9. Para pengelola MTPWK UNDIP dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, oleh karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai masukan yang sangat berharga. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, Nopember 2007

SUKMANIAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Sasaran Penelitian	7
1.4 Ruang Lingkup Studi	8
1.4.1 Ruang Lingkup Substansial.....	8
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial	9
1.5 Kerangka Pemikiran.....	11
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Pendekatan Penelitian	12
1.6.2 Metode Pelaksanaan Penelitian	14
1.6.2.1 Kebutuhan Data	14
1.6.2.2 Teknik Pengumpulan data	15
1.6.2.3. Teknik Sampling	17
1.6.2.4 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	18
1.6.2.5 Analisis Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PPK Pasca tsunami	19
1.7 Sistematika Penulisan Tesis	25
BAB II KAJIAN LITERATUR EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	
2.1 Pengertian Efektivitas.	27
2.2 Pemberdayaan Masyarakat.....	28
2.2.1 Konsep Pemberdayaan	28
2.2.2 Paradigma <i>Community Development</i> dan <i>Community Empowerment</i>	30
2.2.3 Prinsip dan Dasar Pemberdayaan Masyarakat	32
2.2.4 Proses dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat	33
2.2.5 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.....	36

2.2.6 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	40
2.2.7 Elemen-elemen Pemberdayaan Masyarakat	41
2.3 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Pembangunan	44
2.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wilayah	47
2.4.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	48
2.4.1.1 Partisipasi Masyarakat	48
2.4.1.2 Kapasitas Masyarakat	51
2.4.1.3 Perilaku Manusia.....	52
2.4.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana Kemiskinan.....	52
2.4.3 Pemberdayaan Perempuan	54
2.4.4 Peran NGO's dalam Pemberdayaan	54
2.5 Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca tsunami.....	56
2.6 Rangkuman Kajian Literatur.....	57

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) PASCA TSUNAMI DI KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
3.1.1 Gambaran Kecamatan Lhoknga	65
3.1.2 Karakteristik Kelurahan Mon Ikeun, Desa Lambaro Seubun dan Desa Meunasah Karieng	66
3.2 Gambaran Umum Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	72
3.2.1 Latar Belakang dan Tujuan Program.....	72
3.2.2 Prinsip dan Indikator Keberhasilan Program	72
3.2.3 Struktur Manajemen PPK	73
3.2.4 Sumber Dana dan Jenis Kegiatan.....	75
3.2.5 Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami	75
3.2.6 Pengelolaan PPK Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga	78
3.3 Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga	82

BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PPK PASCA TSUNAMI DI KECAMATAN LHOKNGA

4.1 Analisis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PPK Pasca Tsunami	84
4.1.1 Peran Pemerintah dalam PPK	84
4.1.2 Peran Konsultan PPK sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	88
4.1.3 Peran Masyarakat dalam Pengelolaan PPK Pasca Tsunami ...	90
4.2 Analisis Tingkat Kondisi Pemberdayaan Masyarakat Pasca Tsunami ...	103
4.2.1 Analisis Tingkat Potensi Masyarakat	104
4.2.1.1 Analisis Percaya Diri Masyarakat Pasca Tsunami	104
4.2.1.2 Analisis Kemampuan Komunikasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan	105

4.2.1.3 Analisis Kemampuan Manajemen, Teknis dan Organisasi (Keahlian) Masyarakat dalam Pengelolaan Pembangunan Desa	106
4.2.1.4 Analisis Rasa Kepercayaan antara sesama Masyarakat	111
4.2.1.5 Analisis kemampuan Masyarakat dalam Mengakses Sumberdaya (Kekayaan)	113
4.2.2 Analisis Tingkat Dukungan Lingkungan Masyarakat	116
4.2.2.1 Analisis Ketersediaan dan Akses Fasilitas Layanan Masyarakat	117
4.2.2.2 Analisis Pengembangan Informasi oleh Masyarakat	118
4.2.2.3 Analisis Keterkaitan antara Pemerintah dengan Masyarakat.....	119
4.2.2.4 Analisis Berkurangnya Rintangan bagi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan	120
4.2.2.5 Analisis Kualitas Kepemimpinan Masyarakat di Desa.....	121
4.2.2.6 Analisis Hubungan Kerjasama antara Masyarakat dengan Pihak Luar (Jaringan Kerja)	122
4.2.2.7 Analisis Kelengkapan Organisasi Pengelola Pembangunan	122
4.2.2.8 Analisis Akses Penyampaian Aspirasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan dan kepada Lembaga Legislatif/parpol (Kekuatan Politik)	123
4.2.3 Analisis Tingkat Semangat Pengorbanan Masyarakat	126
4.2.3.1 Analisis Kemauan Masyarakat dalam Mendahulukan Kepentingan Umum	127
4.2.3.2 Analisis Kesiediaan Memberikan Ide Kreatif (Kesamaan Nilai) dalam Kehidupan Masyarakat	127
4.2.3.3 Analisis Sikap Toleransi dan Saling Berbagi dalam Masyarakat (Persatuan)	128
4.3 Analisis Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PPK Pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga.....	129
4.3.1 Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mon Ikeun..	131
4.3.2 Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lambaro Seibun.	135
4.3.3 Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Meunasah Karieng	139
4.4 Sintesa Hasil Analisis	143
4.4.1 Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PPK Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga	143
4.4.2 Tipologi Keberdayaan Masyarakat.....	149
4.4.3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pembangunan	151
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	157
5.2 Rekomendasi.....	160
5.3 Usulan Studi Lanjutan	162
DAFTAR PUSTAKA	163
LAMPIRAN-LAMPIRAN	166

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Kebutuhan Data dalam Penelitian	16
Tabel I.2	Rincian Jumlah Responden untuk 3 (tiga) Desa Lokasi Penelitian	17
Tabel I.3	Penilaian Tahapan Tingkat Keberdayaan Masyarakat	23
Tabel II.1	Tahapan Tingkat Keberdayaan Masyarakat	40
Tabel II.2	Variabel dan Indikator Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PPK Pasca Tsunami.....	62
Tabel III.1	Komposisi Tingkat Pendidikan Masyarakat Pelaku PPK di Kelurahan Mon Ikeun, Desa Lambaro Seibun dan Desa Meunasah Karieng	68
Tabel III.2	Komposisi Jenis Pekerjaan Masyarakat Pelaku PPK di Kelurahan Mon Ikeun, Desa Lambaro Seibun dan Desa Meunasah Karieng	70
Tabel IV.1	Rangkuman Peran Stakeholders dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Pengelolaan PPK Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga	101
Tabel IV.2	Tingkat Potensi Masyarakat Pasca Tsunami	103
Tabel IV.3	Tingkat Dukungan Lingkungan Masyarakat Pasca Tsunami	116
Tabel IV.4	Tingkat Semangat Pengorbanan Masyarakat Pasca Tsunami	126
Tabel IV.5	Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PPK (Pembangunan Jalan dan Saluran) Pasca Tsunami Di Kelurahan Mon Ikeun	131
Tabel IV.6	Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PPK (Pemagaran Areal Sawah) Pasca Tsunami di Desa Lambaro Seibun.....	135
Tabel IV.7	Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PPK (Pembangunan Gedung TPA) Pasca Tsunami di Desa Meunasah Karieng.....	139
Tabel IV.8	Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PPK Pasca Tsunami di Tiga Desa dalam Kecamatan Lhoknga	144

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kecamatan Lhoknga	10
Gambar 1.2	Kerangka Pemikiran	13
Gambar 1.3	Kerangka Analisis.	24
Gambar 2.1	Paradigma Pendekatan ” <i>Community Model</i> ”.....	31
Gambar 3.1	Kerusakan Akibat Tsunami di Kecamatan Lhoknga.....	65
Gambar 3.2	Peta Karakteristik Desa Lokasi Penelitian dalam Kecamatan Lhoknga.	68
Gambar 3.3	Struktur Manajemen PPK	74
Gambar 3.4	Alur Kegiatan PPK Rehabilitasi Pasca Bencana	77
Gambar 3.5	Peta Kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Rehabilitasi Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga	81
Gambar 3.6	Prasarana Jalan dan Saluran di Kelurahan Mon Ikeun, Pagar Sawah di Desa Lambaro Seubun dan Gedung TPA di Meunasah Karieng	80
Gambar 4.1	Tingkat Potensi Masyarakat Sebelum dan Setelah PPK Pasca Tsunami	115
Gambar 4.2	Tingkat Dukungan Lingkungan Masyarakat Sebelum dan Setelah PPK Pasca Tsunami	125
Gambar 4.3	Tingkat Semangat Pengorbanan Masyarakat Sebelum dan Setelah PPK Pasca Tsunami	130
Gambar 4.4	Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PPK Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga dan Upaya Peningkatannya.....	148
Gambar 4.5	Tipologi Keberdayaan Masyarakat dalam Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga.....	152
Gambar 4.6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pembangunan.	154

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A:

A.1	Surat Pengantar Survey	166
A.2	Daftar Kuesioner	167
A.3	Jumlah Penduduk Di Kecamatan Lhoknga Tahun 2006	178
A.4	Inventarisasi Penduduk (Korban) dan Kerusakan Infrastruktur akibat Bencana Alam Gempa dan Tsunami Di Wilayah Lhoknga	179
A.5	Ketentuan Dasar Pelaksanaan PPK Rehabilitasi Pasca tsunami	181
A.6	Tugas Dan Tanggung Jawab Pelaku-Pelaku PPK	183
A.7	Jenis Kegiatan Sarana Prasarana yang dibangun dan Jumlah Dana PPK Rehabilitasi Pasca Tsunami per Desa dalam Kecamatan Lhoknga	188

LAMPIRAN B:

	Hasil Wawancara Mendalam dengan Para Pelaku PPK Pasca Tsunami di Tingkat Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Lhoknga dan Tiga Desa Lokasi Penelitian.....	189
--	---	-----

LAMPIRAN C:

C.1	Tabel Kompilasi Hasil Survey Identitas Pelaku PPK di Tiga Desa	199
C.2	Kompilasi Hasil Survey Tingkat Kondisi Masyarakat Pasca Tsunami Sebelum dan Setelah Pengelolaan PPK di Tiga Desa	202
C.3	Rekapitulasi Kompilasi Hasil Survey Tingkat Kondisi Masyarakat Pasca Tsunami	208

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Pada tanggal 26 Desember 2004, suatu gempa bumi yang berskala sangat kuat (8,9 skala richter) telah terjadi di Samudra Indonesia di lepas pantai barat laut Pulau Sumatera. Gempa yang kemudian menyebabkan gelombang tsunami ini telah memporak porandakan sebagian besar wilayah Aceh dan Nias di wilayah Indonesia, sebagian wilayah Thailand, Srilanka, Maladewa (Maldives), Bangladesh, Burma bahkan sampai ke pantai Somalia di Afrika Timur.

Bencana alam di kawasan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tersebut telah menimbulkan kerusakan sebagian besar wilayah pesisir Aceh, menelan banyak korban jiwa, menghancurkan sebagian besar infrastruktur, pemukiman, sarana sosial seperti bangunan-bangunan pendidikan, kesehatan, keamanan, sosial, ekonomi publik, dan bangunan-bangunan pemerintah. Bencana ini juga telah mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk kondisi psikologis dan tingkat kesejahteraannya.

Kerusakan berbagai sarana prasarana juga telah mengakibatkan kelumpuhan aktivitas masyarakat diberbagai bidang kehidupan. Pembangunan kembali wilayah Aceh yang tertimpa bencana pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan sebuah lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah Pusat yaitu Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias.

Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami menuntut adanya peran aktif dari semua pihak terkait. Berbagai program pembangunan dilaksanakan

untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan penyediaan sarana prasarana di daerah tsunami. Demikian juga dengan Kabupaten Aceh Besar yang telah melaksanakan berbagai program pembangunan, salah satunya adalah program pembangunan partisipatif berupa Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka pengembangan kemandirian masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu wujud pembangunan alternatif yang menghendaki agar masyarakat mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. *Empowerment* (pemberdayaan) berasal dari Bahasa Inggris, dimana *power* diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut Robert Dahl (1973:50), pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya. Sedangkan menurut Korten (1992) pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modal.

Salah satu pola pendekatan pemberdayaan masyarakat yang paling efektif dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat adalah *inner resources approach*. Pola ini menekankan pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka. Pola ini mendidik masyarakat menjadi *concern* akan pemenuhan dan pemecahan masalah-masalah yang mereka hadapi dengan menggunakan potensi yang mereka miliki (Ross 1987 : 77-78).

Sementara itu efektivitas dapat diartikan sebagai pencapaian sasaran dari upaya bersama, dimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitas (Bernard dalam Gybson 1997 : 56). Efektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknya suatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D, 2005:22) yang dapat dilihat dari : (a) Kemampuan memecahkan masalah, keefektifan tindakan dapat diukur dari kemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebut dilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan dan (b) Pencapaian tujuan, efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainya suatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secara nyata.

Menurut Kartasasmita (1995:19) upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu : (1) Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, (2) Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, (3) Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Dalam pengelolaan PPK pasca tsunami, masyarakat mendapatkan kewenangan untuk mengelola semua kegiatan secara mandiri dan partisipatif dengan ikut terlibat dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan kegiatan. Selain itu masyarakat mendapat pendampingan dari fasilitator, dukungan dari pemerintah dan juga adanya kelembagaan PPK berupa organisasi pengelolaan di tingkat desa dan kecamatan yang anggotanya berasal dari masyarakat serta

mendapat pelatihan-pelatihan yang mendukung peningkatan kemampuan masyarakat sebagai pelaku utama PPK dan penerima manfaat hasil pembangunan.

Keberhasilan program pembangunan dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, mekanisme pelaksanaan program serta proses pendampingan dalam menerapkan pendekatan partisipasi. Tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kewenangan atau kekuasaan masyarakat untuk mengontrol atau menentukan pengambilan keputusan dalam berbagai tahap kegiatan tersebut untuk meyakinkan bahwa kepentingannya dapat dipenuhi (Panudju, 1999:77).

Pemberdayaan masyarakat dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dilakukan dalam lingkup keruangan berbasis kecamatan, dimana pembangunan dilaksanakan pada lingkup desa atau antar desa, namun pengambilan keputusan terhadap prioritas kegiatan yang akan terdani ditentukan oleh masyarakat pada forum Musyawarah Antar Desa (MAD) di tingkat kecamatan.

Pelaksanaan PPK pasca tsunami diharapkan menjadi salah satu program pembangunan partisipatif yang dapat berkontribusi bagi pemulihan kondisi dan peningkatan kemandirian masyarakat di Kabupaten Aceh Besar. Pelaksanaan PPK tersebut berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan PPK Pola Khusus Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2005 yang bertujuan untuk rekonstruksi sosio kultural masyarakat lokasi bencana, pemberian insentif ekonomi masyarakat dan pendapatan keluarga melalui kegiatan padat karya, serta penyediaan dan pemulihan infrastruktur pedesaan.

Kecamatan Lhoknga sebagai salah satu kecamatan yang dilanda tsunami di Kabupaten Aceh Besar, mengalami kerusakan yang sangat parah yaitu berupa keterpurukan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kerusakan berbagai sarana

prasarana umum dan milik pribadi masyarakat serta terganggunya aktivitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagian besar masyarakat harus rela kehilangan orang-orang terdekat dan harus tinggal di tenda dan barak pengungsian karena rumah mereka hancur akibat tsunami. Salah satu upaya untuk memulihkan kembali kondisi sosial ekonomi masyarakat dan percepatan ketersediaan sarana prasarana pemukiman yang hancur akibat tsunami adalah pelaksanaan PPK pasca tsunami yang menerapkan upaya pemberdayaan masyarakat dan diharapkan menjadi program yang efektif dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat di daerah tsunami.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sebagai suatu pendekatan pembangunan alternatif, fokusnya tidak hanya pada keterlibatan pihak penerima dalam proses pembangunan tetapi juga memampukan masyarakat untuk mengawasinya guna melindungi kehidupan mereka. Demikian pula dengan pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

Jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Rehabilitasi Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga pada tahun 2005/2006 berupa kegiatan sosial dan pembangunan sarana prasarana. Diantara sarana prasarana yang telah dibangun adalah jenis prasarana dasar lingkungan berupa prasarana jalan guna meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian masyarakat, prasarana saluran untuk mencegah banjir dan kenyamanan lingkungan pemukiman; jenis prasarana yang menunjang perekonomian seperti pemagaran areal persawahan dan kebun dan jenis sarana yang mendukung aktivitas sosial

seperti pembangunan Gedung Taman Pendidikan AlQuran (TPA), pembangunan/rehab Meunasah dan pembangunan tempat wudhuk.

Penyediaan sarana prasarana melalui PPK tersebut menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan PPK di Kecamatan Lhoknga dinilai cukup tinggi dan *output* sarana prasarana PPK yang telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (laporan FK Lhoknga, 2006), namun kemandirian masyarakat dalam mengelola pembangunan belum terwujud, masyarakat masih sangat berharap pada bantuan dari berbagai pihak untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka.

Sehubungan dengan hal itu maka untuk dapat mengetahui proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga dan efeknya terhadap kondisi masyarakat pasca tsunami perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- Terjadinya kerusakan sarana prasarana yang sangat parah dan keterpurukan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Lhoknga akibat tsunami.
- Adanya pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan partisipatif di Kecamatan Lhoknga pasca tsunami, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan untuk mempercepat pemulihan kondisi

pemberdayaan masyarakat, namun pasca tsunami kemampuan masyarakat di Kecamatan Lhoknga dalam mengelola pembangunan di lingkungannya masih rendah.

Dari perumusan masalah di atas maka yang menjadi pertanyaan penelitian (*Research Question*)nya adalah: “Bagaimana Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?”.

1.4 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

1.3.2 Sasaran Penelitian

Sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini mencakup hal-hal berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik masyarakat pasca tsunami.
2. Mengidentifikasi mekanisme pengelolaan PPK.
3. Mengidentifikasi proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami.
4. Mengidentifikasi elemen pemberdayaan masyarakat, yaitu : potensi masyarakat, dukungan lingkungan masyarakat dan semangat pengorbanan masyarakat.
5. Menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami.
6. Menganalisis tingkat pemberdayaan masyarakat pasca tsunami sebelum dan setelah PPK.

7. Menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga
8. Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi bagi efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga.

1.4 Ruang Lingkup Studi

Pada bahasan ini diuraikan ruang lingkup studi mencakup ruang lingkup substansial dan ruang lingkup spasial.

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial

Substansi yang akan dibahas dalam penelitian ini secara garis besar membahas tentang beberapa pokok bahasan berikut yaitu:

1. Kajian tentang efektivitas pemberdayaan masyarakat berupa pencapaian peningkatan kemauan, pengetahuan, kemampuan dan kondisi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan partisipatif di lingkungannya.
2. Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat melalui PPK pasca tsunami.
3. Proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami meliputi : dukungan pimpinan lokal, sosialisasi, musyawarah identifikasi masalah, penentuan program prioritas, motivasi swadaya, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan sumber daya, pengorganisasian dan pelatihan.
4. Elemen-elemen pemberdayaan masyarakat yang meliputi variabel:
 - a. Potensi masyarakat, berupa: percaya diri, komunikasi, keahlian, kepercayaan dan kekayaan.

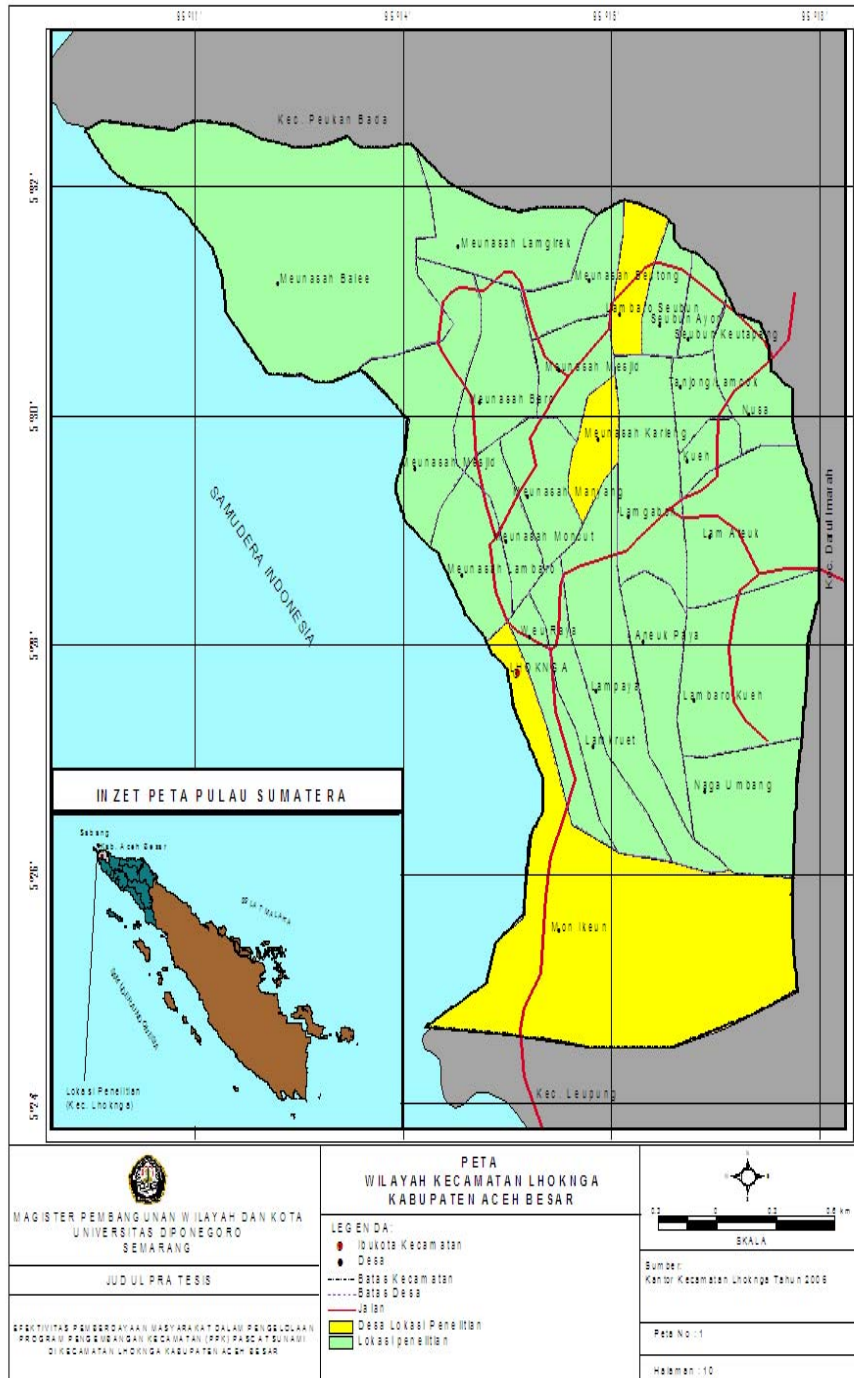
- b. Dukungan lingkungan masyarakat, berupa: layanan masyarakat, informasi, keterkaitan, rintangan, kepemimpinan, jaringan kerja, organisasi dan kekuatan politik.
- c. Semangat pengorbanan masyarakat, berupa: mendahulukan kepentingan umum, kesamaan nilai dan persatuan.

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Untuk lokasi penelitian dipilih 1 (satu) kelurahan dan 2 (dua) desa dalam Kecamatan Lhoknga yang memiliki karakteristik desa berbeda dengan 3 (tiga) jenis kegiatan PPK Rehabilitasi pasca tsunami siklus VII PPK-3 tahun 2005/2006 yang juga berbeda. Jenis kegiatan dalam PPK Rehabilitasi pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga berbeda-beda, namun berdasarkan fungsi dari masing-masing kegiatan dapat digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu:

- Jenis kegiatan pembangunan prasarana dasar berupa pembangunan jalan, saluran dan jembatan; untuk lokasi penelitian dipilih Kelurahan Mon Ikeun dengan kegiatan Pembangunan Jalan dan Saluran.
- Jenis kegiatan pembangunan sarana yang menunjang aktivitas perekonomian masyarakat berupa pemagaran areal sawah dan kebun; untuk lokasi penelitian dipilih Desa Lambaro Seubun dengan kegiatan Pemagaran Areal Sawah.
- Jenis kegiatan pembangunan sarana yang mendukung aktivitas sosial masyarakat berupa Pembangunan Gedung TPA, Meunasah dan Tempat Wudhuk; untuk lokasi penelitian dipilih Desa Meunasah Karieng dengan kegiatan Pembangunan Gedung Taman Pendidikan Alquran (TPA).

(Lokasi penelitian dapat dilihat pada peta no: 1)



1.5 Kerangka Pemikiran

Kejadian gempa bumi dan tsunami yang melanda Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar telah mengakibatkan kehancuran yang luar biasa baik dari segi fisik lingkungan maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. Adanya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah bencana diharapkan dapat memulihkan kembali aktivitas masyarakat dan juga tersedianya sarana prasarana yang memadai.

Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga sebagai salah satu program pembangunan partisipatif dimaksudkan untuk mendukung proses rehabilitasi kondisi masyarakat di daerah tsunami. Dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, dana pembangunan melalui PPK dikelola langsung oleh masyarakat, namun kerusakan sarana prasarana yang sangat parah dan keterpurukan kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca tsunami telah mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat sehingga kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan menjadi rendah.

Secara umum pelaksanaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga dinyatakan berhasil yang penilaiannya dilihat dari *output* sarana prasarana yang dihasilkan program, namun bagaimana efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga masih belum diketahui, sehingga menarik untuk dilakukan kajian lebih lanjut.

Untuk mengkaji efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami dilakukan identifikasi terhadap karakteristik masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK dan elemen pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dilakukan analisis pemberdayaan masyarakat dalam

pengelolaan PPK dan analisis tingkat kondisi pemberdayaan masyarakat pasca tsunami sebelum dan setelah pelaksanaan PPK serta analisis efektivitas pemberdayaan masyarakat dengan menghubungkan antara pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami dengan perubahan tingkat kondisi pemberdayaan masyarakat pasca tsunami dalam Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar .

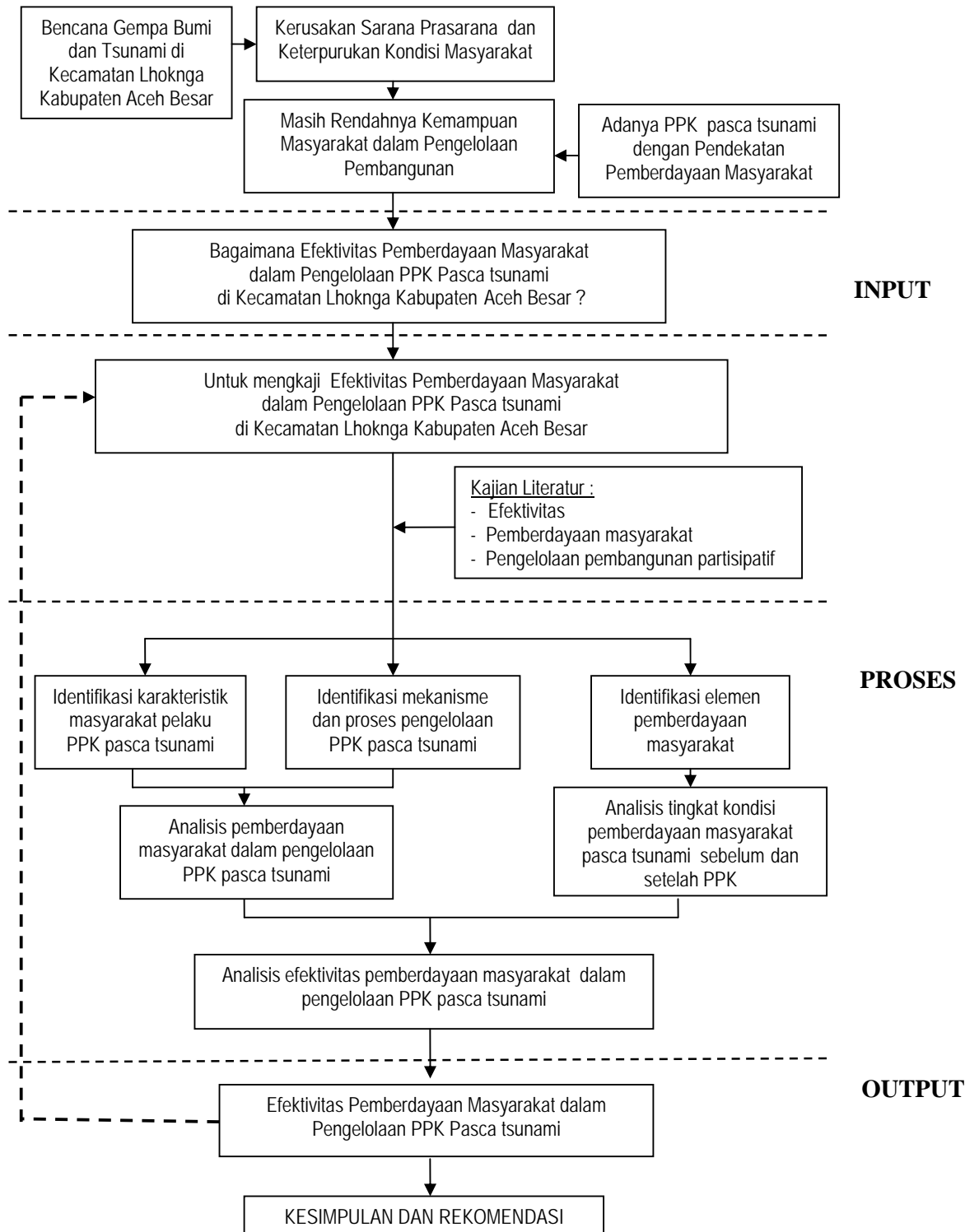
Garis besar kerangka pemikiran yang mendasari rencana penelitian ini telah disusun dalam Alur Sistematis Kerangka Pemikiran pada gambar 1.2.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif biasanya lebih menekankan pada cara berpikir positivistik yang bertitik tolak dari fakta di lapangan yang tertarik dari realitas objektif disamping asumsi teoritis lainnya (empiris). Menurut Gulo (2002:18-19), tipe penelitian dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan pertanyaan dasar dari penelitian, yaitu : (1) apa, untuk penelitian eksploratif, (2) bagaimana, untuk penelitian deskriptif dan (3) mengapa, untuk penelitian eksplanatif. Penelitian deskriptif lebih luas daripada penelitian eksploratif karena kita meneliti tidak hanya masalahnya sendiri, tetapi juga variabel-variabel lain yang berhubungan dengan masalah itu. Lebih terperinci karena variabel-variabel tersebut diuraikan atas faktor-faktornya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, penelitian dilakukan dengan menarik sampel.

Untuk penelitian ini digunakan tipe penelitian deskriptif dalam rangka mengkaji efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami.



**GAMBAR 1.2
KERANGKA PEMIKIRAN**

1.6.2 Metode Pelaksanaan Penelitian

Di dalam suatu penelitian terdapat suatu prosedur kerja yang dipandu oleh suatu metode tertentu yang disebut metode penelitian. Menurut Nazir (1983), metode penelitian merupakan satu kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri atas prosedur dan teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Prosedur mengarahkan urutan-urutan yang akan dilakukan, sedangkan teknik penelitian memberikan alat atau cara apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian.

1.6.2.1 Kebutuhan Data

Data yang dibutuhkan agar dapat tercapai tujuan dan sasaran penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

1) Data Sekunder

Data dari sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang dibutuhkan (Bungin B, 2005:122). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari:

- Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Besar sebagai sekretariat TK-PPK Kabupaten untuk mendapat dokumen-dokumen resmi petunjuk pelaksanaan PPK.
- Kantor Kecamatan Lhoknga berupa peta lokasi penelitian, data kondisi eksisting wilayah pasca tsunami.
- Laporan Konsultan Manajemen PPK Kabupaten (KM-Kab) Aceh Besar dan Fasilitator Kecamatan (FK) PPK Kecamatan Lhoknga.

2) Data Primer

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin B, 2005:122). Untuk penelitian ini kebutuhan data primer dikumpulkan dari penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam. Secara rinci kebutuhan data menurut sasaran, variabel, data, teknik pengumpulan dan sumber data tertera dalam tabel I.1.

1.6.2.2 Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan metode angket (kuesioner), wawancara dan dokumentasi atau observasi.

- **Metode kuesioner;** pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yaitu proses untuk memperoleh data dengan membuat daftar pertanyaan. Data primer yang didapat dengan pengumpulan data ini yaitu dari keterangan-keterangan yang tertulis pada lembar kuesioner yang diisi oleh para responden. Teknik ini akan digunakan untuk mendapatkan data dari masyarakat yang menjadi pelaku PPK di tiga desa lokasi penelitian untuk dianalisis guna mencapai tujuan dan sasaran penelitian.
- **Wawancara;** menurut Bungin (2005:126) wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa di setiap penggunaan metode ini selalu ada pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara. Untuk penelitian ini dilakukan wawancara mendalam dengan pelaku PPK di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa lokasi penelitian.

- **Dokumentasi;** yaitu berupa petunjuk/pedoman PPK, laporan pelaksanaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga, data-data yang terkait dengan gambaran umum lokasi penelitian, peta lokasi dan foto visual.

TABEL I.1
KEBUTUHAN DATA DALAM PENELITIAN

SASARAN	VARIABEL	KEBUTUHAN DATA	TEKNIK PENGUMPULAN DATA			SUMBER DATA
			K	W	O	
1	2	3	4	5	6	7
Identifikasi Karakteristik Masyarakat	Karakteristik masyarakat	- Jenis kelamin	V	-	-	Masyarakat Pelaku PPK
		- Usia	V	-	-	
		- Tingkat pendidikan	V	-	-	
		- Jenis pekerjaan	V	-	-	
		- Tingkat pendapatan	V	-	-	
Identifikasi Kondisi Lokasi Penelitian	Lokasi penelitian	- Peta Lokasi penelitian	-	-	-	Data sekunder
	Kondisi sarana prasarana PPK	- Kondisi sarana prasarana PPK	-	V	V	Masyarakat dan observasi
Identifikasi Mekanisme PPK	Mekanisme PPK	- Proses dan Alur kegiatan PPK	-	-	V	Data sekunder
Identifikasi Proses Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PPK	Proses Pemberdayaan Masyarakat	- Dukungan pimpinan lokal	-	V	-	Masyarakat Pelaku PPK, Pemerintah dan Fasilitator
		- Sosialisasi	-	V	-	
		- Musyawarah Identifikasi masalah	-	V	-	
		- Penentuan program prioritas	-	V	-	
		- Motivasi swadaya	-	V	-	
		- Pelaksanaan pembangunan	-	V	-	
		- Pemanfaatan sumber daya	-	V	-	
		- Pengorganisasian	-	V	-	
Identifikasi Elemen Pemberdayaan Masyarakat.	- Potensi Masyarakat.	- Percaya diri	V	-	-	Masyarakat Pelaku PPK
		- Komunikasi	V	-	-	
		- Keahlian	V	-	-	
		- Kepercayaan	V	-	-	
		- Kekayaan	V	-	-	
	- Dukungan Lingkungan Masyarakat	- Layanan Masyarakat	V	-	-	Masyarakat Pelaku PPK
		- Informasi	V	-	-	
		- Keterkaitan	V	-	-	
		- Rintangan	V	-	-	
		- Kepemimpinan	V	-	-	
		- Jaringan Kerja	V	-	-	
		- Organisasi	V	-	-	
	- Semangat pengorbanan masyarakat	- Mendahulukan Kepentingan Umum	V	-	-	Masyarakat Pelaku PPK
		- Kesamaan Nilai	V	-	-	

		- Persatuan	V	-	-	
--	--	-------------	---	---	---	--

Sumber: Hasil analisis, 2007

KETERANGAN :

- K = KUESIONER
- W = WAWANCARA
- O = OBSERVASI

1.6.2.3 Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Bungin (2006:115) teknik *purposive sampling* digunakan pada penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian. Untuk keperluan pengisian kuesioner tentang penilaian tingkat kondisi pemberdayaan masyarakat sebelum dan setelah PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga, maka yang menjadi responden adalah masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kelurahan Mon Ikeun, Desa Lambaro Seibun dan Desa Meunasah Karieng. Ketiga desa tersebut dipilih karena jenis kegiatan PPK pasca tsunami ketiganya berbeda sehingga tiap jenis kegiatan pembangunan dapat terwakili.

Menurut Arikunto (dalam Wahyuningsih D, 2005:18), dalam menentukan besarnya sampel apabila populasinya kurang dari 100 maka lebih baik seluruh populasi dijadikan sampel. Adapun jumlah anggota populasi yang menjadi target penyebaran kuesioner dalam penelitian ini berjumlah 54 orang jadi seluruh anggota populasi menjadi responden, dan secara rinci dapat dilihat pada tabel I.2 berikut :

TABEL I.2
RINCIAN JUMLAH RESPONDEN UNTUK 3 (TIGA) DESA LOKASI
PENELITIAN

No	Jenis Kelompok Masyarakat	Banyaknya Responden/Desa (orang)	Total Responden untuk 3 Desa (orang)
1	2	3	4
1.	Lurah /Kepala Desa sebagai Pembina PPK	1	3

2.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	3	9
3.	Fasilitator Desa (FD)	2	6
4.	Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	3	9
5.	Tim Pemeliharaan Sarana Prasarana PPK	5	15
6.	Perwakilan Masyarakat dalam Forum MAD di Tingkat Kecamatan	4	12
Jumlah		18	54

Sumber: Hasil analisis, 2007

Selanjutnya untuk keperluan menggali informasi lebih yang lebih detail tentang upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga dilakukan wawancara mendalam dengan pelaku PPK di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa lokasi penelitian. Untuk pelaku PPK di desa yang diwawancarai 2 orang per desa dan mereka orang yang sama dengan responden yang mengisi kuesioner. Rincian responden yang diwawancara adalah:

1. Tingkat Kabupaten satu orang yaitu Ketua Sekretariat Tim Koordinasi PPK (TK-PPK) Kabupaten Aceh Besar.
2. Tingkat Kecamatan sebanyak 3 orang yaitu: PjOK PPK Kecamatan Lhoknga (1 orang), Fasilitator Kecamatan (FK) Lhoknga (1 orang) dan Pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK)/PL (1 orang).
3. Tingkat Desa sebanyak 6 orang yaitu dengan Lurah/Kepala Desa dan yang mewakili pelaku PPK dari desa/kelurahan sampel (1 orang/desa).

1.6.2.4 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Menurut Bungin (2004: 171-174) dalam penelitian sosial dikenal beberapa teknik statistik deskriptif antara lain: distribusi frekuensi, tendensi sentral, standar deviasi dan sebagainya. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan meliputi:

1. Distribusi frekuensi; perhitungan data dengan distribusi frekuensi dapat dilakukan dengan menghitung frekuensi data kemudian dipersentasekan.

Frekuensi tersebut juga dapat dilihat dari penyebaran persentasenya, yang oleh kebanyakan orang dikenal dengan frekuensi relatif. Untuk menghitung sebaran persentase dari frekuensi tersebut, dapat digunakan rumus:

$$n = f_x/N \times 100 \%,$$

dimana N = jumlah kejadian dan f_x = frekuensi individu.

2. Tendensi sentral rata-rata; rata-rata adalah nilai tengah dari suatu jumlah keseluruhan bilangan, yang berasal dari jumlah keseluruhan nilai bilangan serta terlebih dahulu dibagi dengan kebanyakan dari unit dari keseluruhan bilangan tersebut. Rata-rata juga disebut dengan distribusi angka rata-rata (*distribution of means*). Perhitungan nilai rata-rata menggunakan rumus: $M = \sum f_x/N$.

Nilai rata-rata tersebut digunakan untuk mengetahui perubahan tingkat kondisi pemberdayaan masyarakat pasca tsunami sebelum dan setelah pengelolaan PPK.

Selain disajikan data yang berupa angka dalam bentuk tabel, dalam penelitian ini penyajian hasil analisis juga disajikan dalam bentuk uraian diagram dan tampilan dalam bentuk spasial yaitu hasil yang didapat dipetakan pada lokasi penelitian.

1.6.2.5 Analisis Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PPK Pasca tsunami.

Teknik analisis data merupakan unsur yang terpenting dalam suatu penelitian, karena suatu data menjadi bermakna dan berguna dalam memecahkan masalah dan dapat dipergunakan dalam menjawab hipotesis dan permasalahan penelitian (Mukhtar dan Widodo, 2000:96). Adapun analisis yang digunakan sebagai berikut:

1. Analisis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami dipakai teknik analisis kualitatif secara deskriptif.

Teknik analisis kualitatif merupakan teknik analisis yang mentransformasikan data mentah ke dalam bentuk data yang mudah dimengerti dan ditafsirkan, serta menyusun, memanipulasi dan menyajikan data menjadi informasi yang jelas (Kusmayadi dalam Wirdanaf, 2006:25). Analisis kualitatif yaitu suatu proses penyelidikan dalam menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi dengan cara membandingkan, merefleksikan, mengkategorikan, mengklasifikasi, menyajikan dan melaksanakan verifikasi data yang secara keseluruhan bertujuan menemukan keseragaman pola dan sifat umum obyek yang diteliti.

Untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami dilakukan dengan cara mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat dalam PPK pasca tsunami berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan pelaku PPK di tingkat Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Lhoknga dan tiga desa lokasi penelitian serta dihubungkan dengan teori pemberdayaan masyarakat.

2. Analisis tingkat kondisi pemberdayaan masyarakat sebelum dan setelah pelaksanaan PPK pasca tsunami di tiga desa lokasi penelitian dalam Kecamatan Lhoknga.

Analisis yang dilakukan berupa analisis pembobotan (*scoring*) terhadap 16 elemen pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan data skala ordinal. Skala ordinal yaitu skala variabel yang dimaksudkan untuk membedakan nilai dari satu kategori dan nilai dari masing-masing kategori tersebut mencerminkan tingkatan, tetapi bukan merupakan nilai absolut (Danim, 2003:102). Bentuk

skala yang dipakai adalah skala Likert, dimana skala ini terdiri dari 5 jenjang mulai dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

Responden dari ketiga desa lokasi penelitian masing-masing sebanyak 18 orang pelaku PPK per desa memberikan penilaian tingkat kondisi masyarakat dengan cara mengisi kuesioner yang telah disiapkan (*Lampiran A2*).

Pada kuesioner tersebut, untuk nilai 1 diberikan keterangan yang menunjukkan kondisi masyarakat pada tingkatan pemberdayaan yang sangat rendah, dan untuk nilai 5 diberikan keterangan yang menunjukkan kondisi masyarakat pada tingkatan pemberdayaan yang sangat tinggi, sedangkan untuk nilai 2, 3 dan 4 tidak diberikan keterangan detil dan responden memperkirakan sendiri berdasarkan keterangan yang telah ditetapkan untuk kondisi paling rendah dan paling tinggi. Kepada responden dimintakan untuk memilih skor nilai yang sesuai dengan kondisi masyarakat di desa mereka untuk kondisi saat sebelum PPK dan juga setelah PPK pasca tsunami beserta dengan alasannya.

Skor nilai jawaban responden tersebut dirata-ratakan untuk masing-masing variabel pemberdayaan masyarakat sebelum dan setelah PPK pasca tsunami per desa. Nilai rata-rata tersebut dan alasan responden menjadi acuan dalam memahami kondisi masyarakat sebelum dan setelah PPK pasca tsunami di ketiga desa lokasi penelitian. Untuk memudahkan pemahaman dilakukan pengelompokan nilai rata-rata tingkat kondisi masyarakat sebagai berikut:

- Nilai 1 - 2,33 : rendah
- Nilai 2,34 - 3,66 : sedang
- Nilai 3,67 - 5 : tinggi

3. Analisis efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga.

Yang menjadi tolok ukur efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami untuk masing-masing desa adalah besarnya perubahan kondisi masyarakat pasca tsunami setelah adanya PPK dan dihubungkan dengan besarnya persentase responden yang menyatakan *ada hubungan* antara tingkat kondisi masyarakat setelah PPK dengan pemberdayaan masyarakat dalam PPK pasca tsunami tersebut. Kriterianya sebagai berikut :

- 1) Cukup efektif, jika selisih antara tingkat kondisi masyarakat setelah PPK dengan sebelum PPK pasca tsunami lebih besar atau sama dengan 0,50 dan persentase jumlah responden yang menyatakan *ada hubungan* dengan PPK pasca tsunami sama atau lebih dari 50 %. (Penetapan kriteria tersebut berdasarkan asumsi bahwa jika selisih atau peningkatan kondisi masyarakat lebih besar atau sama dengan 0,50 maka kondisi pemberdayaan masyarakat akan berubah, sedangkan untuk persentase jika besarnya sama atau lebih dari 50 % menunjukkan pernyataan itu didukung oleh mayoritas responden).
- 2) Kurang efektif, jika selisih antara tingkat kondisi masyarakat setelah PPK dengan sebelum PPK pasca tsunami kurang dari 0,50 atau persentase jumlah responden yang menyatakan *ada hubungan* dengan PPK kurang dari 50 %.

Efektivitas pemberdayaan masyarakat dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan antara karakteristik masyarakat dan proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami dengan perubahan tingkat kondisi masyarakat pasca tsunami setelah adanya PPK di 3 desa/kelurahan lokasi penelitian dalam Kecamatan Lhoknga. Selanjutnya hasil analisis

dikaitkan dengan teori tahapan keberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani, 2004 yang menyatakan menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap, yaitu tahapan afektif, kognitif, psikomotorik dan konatif. Adapun yang termasuk dalam penilaian masing-masing tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan afektif meliputi sikap dan kepedulian masyarakat terhadap proses pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemeliharaan) sarana prasarana PPK pasca tsunami.
- b. Tahapan kognitif meliputi pengetahuan teknis fasilitator desa dan Tim Pengelola PPK serta masyarakat lain yang terlibat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami.
- c. Tahapan psikomotorik meliputi ketrampilan masyarakat dalam membangun sarana prasarana PPK pasca tsunami.
- d. Tahapan konatif meliputi aktivitas masyarakat dalam proses pengelolaan PPK pasca tsunami pada tiap-tiap desa lokasi penelitian.

Untuk mendapatkan sintesa hasil analisis, kondisi yang ditemui di lapangan dibandingkan dengan tahapan tingkat keberdayaan masyarakat pada tabel I.3 berikut:

TABEL I.3
PENILAIAN TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKAT

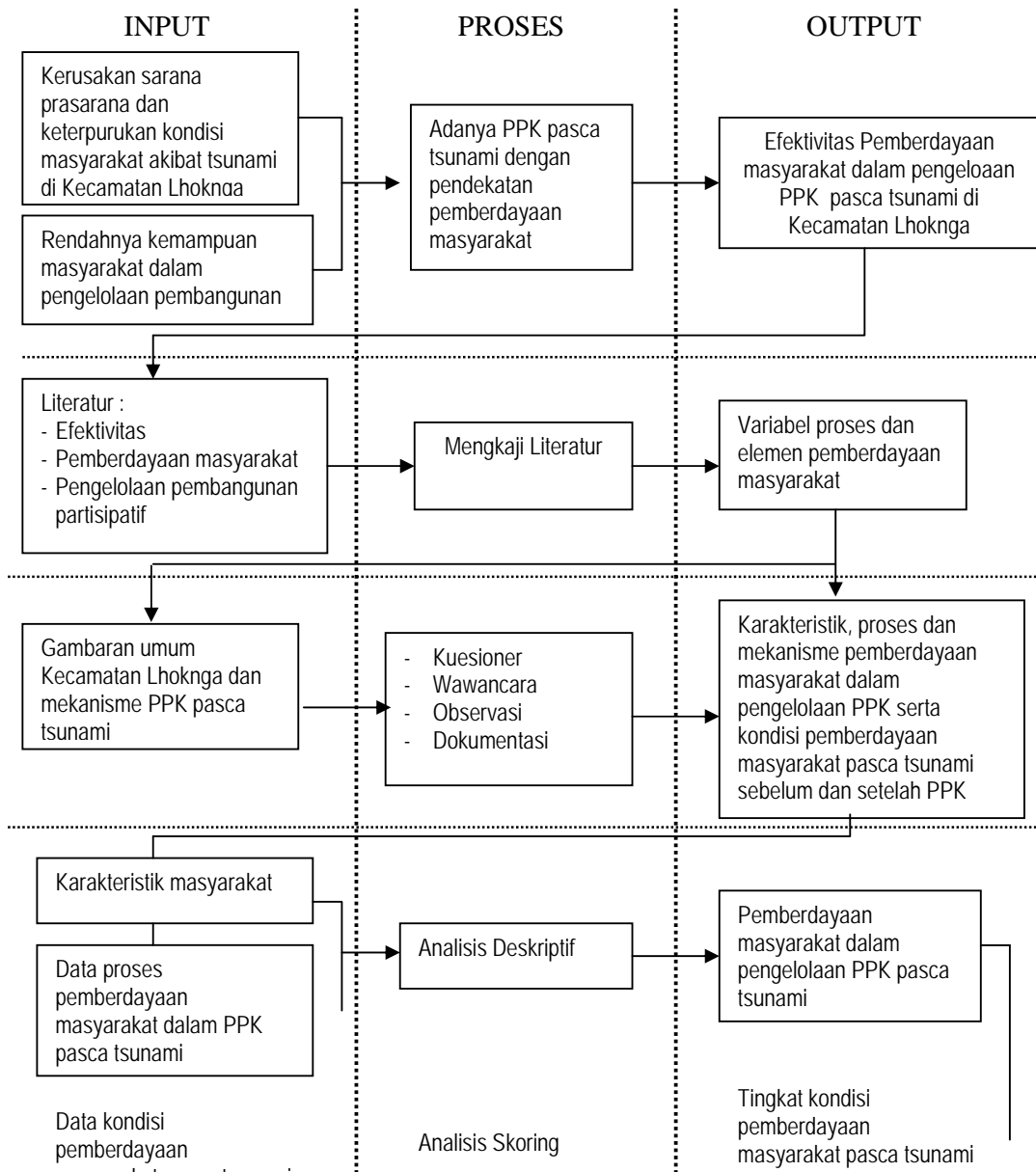
N O	TAHAPAN AFEKTIF	TAHAPAN KOGNITIF	TAHAPAN PSIKOMOTORIK	TAHAPAN KONATIF	SKOR NILAI
1.	Belum merasa sadar dan peduli	Belum memiliki wawasan pengetahuan	Belum memiliki ketrampilan dasar	Tidak berperilaku membangun	1,00 - 2,00
2.	Tumbuh rasa kesadaran dan kepedulian	Menguasai pengetahuan dasar	Menguasai ketrampilan dasar	Bersedia terlibat dalam pembangunan	2,01 - 3,00

3.	Memupuk semangat kesadaran dan kepedulian	Mengembangkan pengetahuan dasar	Mengembangkan ketrampilan dasar	Berinisiatif untuk mengambil peran dalam pembangunan	3,01 - 4,00
4.	Merasa membutuhkan kemandirian	Mendalami pengetahuan pada tingkat lebih tinggi	Memperkaya variasi ketrampilan	Berposisi secara mandiri untuk membangun diri dan lingkungan	4,01 - 5,00

Sumber: Hasil analisis, 2007

Hasil sintesa ditampilkan dalam bentuk sketsa tipologi keberdayaan masyarakat dan diagram pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan program pembangunan.

Untuk Kerangka Analisis secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut:



—



Sumber: Hasil Analisis, 2007

GAMBAR 1.3 KERANGKA ANALISIS

1.7 Sistematika Penulisan Tesis

Penulisan suatu karya ilmiah perlu disusun dengan menggunakan sistematika tertentu untuk mempermudah dalam pengkajiannya. Sistematika penulisan dalam tesis ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

BAB II KAJIAN LITERATUR EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK).

Kajian yang diperoleh dari penelaahan pustaka meliputi : kajian literatur dan hal-hal yang terkait dengan efektivitas, konsep dan implementasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan partisipatif

khususnya pembangunan sarana prasarana di pedesaan dan rangkuman literatur yang memunculkan variabel penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) PASCA TSUNAMI DI KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR

Menguraikan gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi karakteristik fisik dan masyarakat lokasi penelitian dan kerusakan yang timbul akibat tsunami, gambaran umum Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan permasalahan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) PASCA TSUNAMI DI KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR.

Berisi analisis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami, analisis tingkat kondisi pemberdayaan masyarakat pasca tsunami sebelum dan setelah PPK dan analisis efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berisi temuan penelitian, kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi yang selayaknya menjadi masukan bagi pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN LITERATUR EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

2.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang keahlian dan tergantung pada konteks apa efektivitas tersebut digunakan. Menurut Drucker (1978:44) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secara empiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan. Efektivitas berkaitan erat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yang lebih baik sesuai dengan tujuan semula. Sementara itu menurut Bernard (dalam Gybson 1997: 56), efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama, dimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitas.

Efektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknya suatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D, 2005:22) yang dapat dilihat dari:

- Kemampuan memecahkan masalah, keefektifan tindakan dapat diukur dari kemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebut dilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan.
- Pencapaian tujuan, efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainya suatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secara nyata.

Kriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanya ditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi juga

ditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan, hal tersebut untuk meminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran kebijakan yang berbeda-beda (Drabkin dalam Wahyuningsih D, 2005:22).

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1 Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari Bahasa Inggris, *power* diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut Korten (1992) pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modal. Sedangkan Pranarka dan Vidhyandika (1996:56) menjelaskan pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya.

Selain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Menurut Robert Dahl (1983:50), pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya. Sementara Hulme dan Turner (1990:214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang

tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga.

Menurut Talcot Parsons (dalam Prijono, 1996:64-65) *power* merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan *power* dalam *empowerment* adalah daya sehingga *empowerment* dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat.

Pemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaan *powerlessness* (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan), tidak berdaya, tidak mampu menolong diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan sendiri (Prijono, 1996:54). Selain itu pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk, berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al, 1994 :106). Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungan, sebagaimana yang disimpulkan oleh Kieffer (1984:65) dari penelitiannya, yaitu:

(1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif; (2) Kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis; dan (3) Sumber daya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok.

Grand Theories dari konsep *empowerment* (pemberdayaan) ini mengacu pada pengaruh Marx mengenai ada yang berkuasa dan ada juga dikuasai ada perbedaan kelas semisal majikan dan buruh, distribusi pendapatan yang tidak merata sampai kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan (Priyono, 1996:54-55).

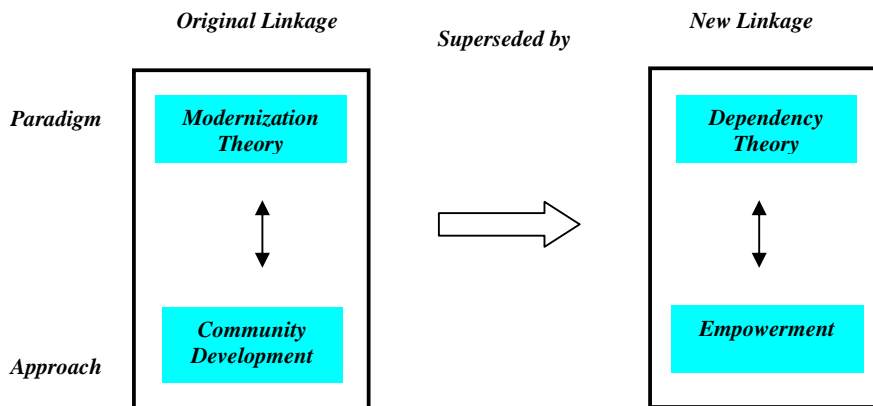
2.2.2 Paradigma *Community Development* dan *Community Empowerment*.

Untuk mencapai tujuan dan cita-cita modernisasi, pendekatan partisipasi masyarakat dikembangkan dalam *community development*. Menurut Abbot (1996:12-15) teori modernisasi awalnya digunakan oleh masyarakat barat yang berperan dalam merubah seluruh masyarakat dari tradisional dan primitif menjadi modern melalui peningkatan tahapan secara berkesinambungan dalam pertumbuhan ekonominya. Dan menurut *United Nations* (PBB) pengembangan masyarakat merupakan suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi-kondisi kemajuan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktifnya.

Lebih lanjut (Abbot, 1996:16-17) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (*equality*), konflik dan hubungan pengaruh kekuasaan (*power relations*) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannya rendah. Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan, dimana teori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antar negara yang timpang, utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran

(tidak maju). Menurut Abbot (1996: 20) dari teori ketergantungan muncul pemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan, yang pada akhirnya membentuk sebuah pemberdayaan (*empowerment*) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagai teori keadilan (*conscientisacion theory*).

Pengembangan masyarakat (*community development*) digunakan sebagai pendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi, sedangkan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) merupakan pendekatan dalam konteks teori ketergantungan (*dependency theory*). Hubungan hierarki antara kedua teori ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber: Abbott, John (1996: 21)

GAMBAR 2.1
PARADIGMA PENDEKATAN “COMMUNITY PARTICIPATION MODEL”.

Teori mengenai hubungan kekuasaan dan partisipasi masyarakat menurut Abbot (1996:112) digambarkan dalam bentuk kontinum dimana pada satu sisi pemerintah lebih terbuka terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pada situasi yang lain pemerintah secara total tidak berperan. Jika peran pemerintah tidak ada (*government closed*) maka peran masyarakat akan tinggi, hal ini merupakan tahap keberhasilan dari pemberdayaan, akan tetapi disisi lain juga

menciptakan konfrontasi atau pendekatan pada kekuatan fisik, sehingga tidak ada satupun pendekatan pembangunan yang dapat dilaksanakan. Oleh karena itu perlu adanya suatu area dimana pemerintah dapat melaksanakan kontrol melalui berbagai manipulasi, pemerintah membuka kesempatan luas terhadap keterlibatan masyarakat, hingga pada akhirnya masyarakat yang mengelola dan pemerintah berfungsi sebagai lembaga pengontrol.

2.2.3 Prinsip dan Dasar Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005:18) ada lima macam, yaitu:

- 1) Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- 2) Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- 3) Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
- 4) Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
- 5) Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah: mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan,

menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan.(Delivery dalam Sutrisno, 2005:17).

2.2.4 Proses dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2006:59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif (Friedman, 1993). Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di

dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis, kemudian mencari solusinya.

Menurut *United Nations* (1956:83-92 dalam Tampubolon, 2006), proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- (1) *Getting to know the local community*; Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.
- (2) *Gathering knowledge about the local community*; Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.
- (3) *Identifying the local leaders*; Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor "*the local leaders*" harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.
- (4) *Stimulating the community to realize that it has problems*; Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
- (5) *Helping people to discuss their problem*; Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.
- (6) *Helping people to identify their most pressing problems*; Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.
- (7) *Fostering self-confidence*; Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.

- (8) *Deciding on a program action*; Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program *action* tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.
- (9) *Recognition of strengths and resources*; Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.
- (10) *Helping people to continue to work on solving their problems*; Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.
- (11) *Increasing people's ability for self-help*; Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

Ide menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (*empowerment*). Menurut Oakley dan Marsden, 1984, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Menurut Kartasmita (1995:19), upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara:

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan.
3. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

2.2.5 Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Teknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihak, karena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dari luar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut

biasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (*top down*), sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakat didayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan kata lain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktif.

Menurut Adimihardja dan Harry (2001, 15) konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (dari, oleh, dan untuk masyarakat). dan salah satu cara yang dipakai dalam teknik pemberdayaan ialah: *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Lebih lanjut Harry menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapa aspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan, seperti: (1) Perumusan konsep, (2) Penyusunan model, (3) Proses perencanaan, (4) Pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan.

Menurut Wahab dkk. (2002: 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan dalam *empowerment*, yaitu:

1. *The welfare approach*, pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusia dan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat, tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pendekatan *centrum of power* yang dilatarbelakangi kekuatan potensi lokal masyarakat.
2. *The development approach*, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keberdayaan masyarakat.

3. *The empowerment approach*, pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan.

Sedangkan Ross (1987:77-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatan pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, yaitu:

- 1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat *the single function* adalah program atau teknik pembangunan, keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunan dari luar masyarakat. Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon dari masyarakat, karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasi prakarsa masyarakat tidak berkembang.
- 2) Pola pendekatan *the multiple approach*, dimana sebuah tim ahli dari luar melaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Pola ini, juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secara optimum, karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar.
- 3) Pola pendekatan *the inner resources approach* sebagai pola yang paling efektif untuk memberdayakan masyarakat. Pola ini menekankan pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginan dan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka. Pola ini mendidik masyarakat menjadi *concern* akan pemenuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka miliki.

Sedangkan menurut Suharto (1997:218-219), pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu:

1. **Pemungkinan**; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. **Penguatan**; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
3. **Perlindungan**; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. **Penyokongan**; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. **Pemeliharaan**; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan

keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

2.2.6 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Sulistiyani (2004:83-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-ketrampilan agar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

Selanjutnya dikemukakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh melalui pemberdayaan tersebut, dalam tabel di bawah ini :

**TABEL II.1
TAHAPAN TINGKAT KEBERDAYAAN MASYARAKAT**

TAHAPAN AFEKTIF	TAHAPAN KOGNITIF	TAHAPAN PSIKOMOTORIK	TAHAPAN KONATIF
Belum merasa sadar dan peduli	Belum memiliki wawasan pengetahuan	Belum memiliki ketrampilan dasar	Tidak berperilaku membangun
Tumbuh rasa kesadaran dan kepedulian	Menguasai pengetahuan dasar	Menguasai ketrampilan dasar	Bersedia terlibat dalam pembangunan
Memupuk semangat kesadaran dan kepedulian	Mengembangkan pengetahuan dasar	Mengembangkan ketrampilan dasar	Berinisiatif untuk mengambil peran dalam pembangunan
Merasa membutuhkan kemandirian	Mendalami pengetahuan pada tingkat lebih tinggi	Memperkaya variasi ketrampilan	Berposisi secara mandiri untuk membangun diri dan lingkungan

Sumber: Sulistiyani, 2004

2.2.7 Elemen-elemen Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Bartle (2002), ada 16 (enam belas) elemen kekuatan atau pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk menilai proses pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- 1) Mendahulukan kepentingan umum, yaitu porsi dan tingkat kesiapan individu mengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruh masyarakat (yang terlihat dari tingkat kedermawanan, kemanusiaan, individu, pengorbanan personal, kebanggaan masyarakat, saling mendukung, setia, peduli, persahabatan, persaudaraan).
- 2) Kesamaan nilai, yaitu tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilai, khususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikan kepentingan anggota dalam masyarakat.
- 3) Layanan masyarakat, yaitu fasilitas dan layanan (seperti jalan, pasar, air minum, jalur pendidikan, layanan kesehatan), yang dipelihara secara berkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitas dan layanan.
- 4) Komunikasi dalam masyarakat, dan diantara masyarakat dengan pihak luar. Komunikasi termasuk jalan, metode elektronika (seperti telpon, radio, TV, internet), media cetak (koran, majalah, buku), jaringan kerja, bahasa yang dapat saling dimengerti, kemampuan tulis baca serta kemampuan berkomunikasi secara umum.
- 5) Percaya diri, meskipun percaya diri diekspresikan secara individual, namun seberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakat? misalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh harapan,

sikap positif, keinginan, motivasi diri, antusiasme, optimisme, mandiri, keinginan untuk memperjuangkan haknya, menghindari sikap masa bodoh dan pasrah, dan memiliki tujuan terhadap sesuatu yang mungkin dicapai.

- 6) Keterkaitan (politis dan administrative), suatu lingkungan yang mendukung penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasional, hukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai dan teknisi sipil, sebaik peraturan dan prosedur pemerintah), dan lingkungan hukum.
- 7) Informasi, kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi, tingkat kepedulian, pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individu dan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif dan berguna, tidak sekedar volume dan besaran.
- 8) Rintangan, pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan, pelatihan manajemen, munculnya kepedulian, rangsangan) apakah ditujukan pada perkuatan masyarakat? Apakah sumber dana dari dalam dan luar meningkatkan tingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat, atau menantang masyarakat untuk bertindak menjadi lebih kuat? Dan apakah rintangan itu bersifat berkelanjutan atau bergantung pada sepanjang pengambilan keputusan oleh pendonor dari luar yang memiliki sasaran dan agenda yang berbeda dari masyarakat itu sendiri?.
- 9) Kepemimpinan, pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan, pengaruh, dan kemampuan untuk mengerakkan masyarakat. Pemimpin yang paling efektif dan berkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat, memiliki kedudukan dan penentu kebijakan. Pemimpin harus memiliki keahlian, kemauan, kejujuran dan beberapa karisma.

- 10) Jaringan kerja, tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga siapa diketahui.
Apakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahui orang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakan sumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secara keseluruhan? Serta memanfaatkan hubungan, potensi dan kebenaran, dalam masyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat.
- 11) Organisasi, adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu, melainkan hingga integritas organisasi, struktur, prosedur, pengambilan keputusan, proses, efektifitas, divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi.
- 12) Kekuatan politik, tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalam pengambilan keputusan daerah dan nasional. Namun sebagai individu yang memiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan nasional.
- 13) Keahlian, kemampuan (kemampuan teknis, kemampuan manajemen, kemampuan berorganisasi, kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan oleh individu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga mereka mampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan.
- 14) Kepercayaan, tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakat terhadap sesamanya, khususnya pemimpin dan abdi masyarakat, yang merupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran, ketergantungan, keterbukaan, transparansi, azas kepercayaan) dalam masyarakat.
- 15) Keselarasan, pembagian rasa kepemilikan pada kelompok yang menyusun masyarakat, meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan (agama, kelas, status, penghasilan, usia, jenis kelamin, adat, suku), tingkat

toleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu dan lainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama, suatu rasa kesamaan tujuan atau visi, perataan nilai.

16) Kekayaan, tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumber daya actual, dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang dan bermanfaat, keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerja, tanah, peralatan, persediaan, pengetahuan, keahlian).

Semakin banyak masyarakat memiliki setiap elemen di atas, semakin kuat masyarakat, semakin besar kemampuan yang dimilikinya, dan semakin berdaya mereka.

2.3 Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Pembangunan

Muchdie, dkk. ed. (2001:3-4) menjelaskan bahwa pembangunan atau pengembangan dalam arti *development*, bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaan yang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya, dalam hal ini penduduk setempat. Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan oleh apa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki, guna meningkatkan kualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain. Jadi pengembangan harus diartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan, serta kemampuan untuk merealisasikannya.

Sedangkan pengertian wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal. Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu: (1) wilayah homogen; (2)

wilayah nodal; (3) wilayah perencanaan; dan (4) wilayah administratif (Budiharsono, 2001:14). Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik. Di Indonesia pengertian wilayah secara administratif melingkupi suatu negara, propinsi, kabupaten, kecamatan atau desa.

Sementara itu menyangkut dengan pengelolaan jika mengacu pada teori manajemen (Siregar, dkk, 1987: 16-21), maka dalam proses pengelolaan terdapat berbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi :

1. Penetapan tujuan (*goal setting*), yang merupakan tahapan paling awal dalam proses pengelolaan. Efektivitas pencapaian tujuan tersebut, selain ditentukan oleh kemampuan pengelolaan, juga ditentukan oleh sifat-sifat dari tujuan itu sendiri, yang harus memenuhi sifat-sifat seperti spesifik, realitas, terukur dan mempunyai batas waktu yang jelas.
2. *Planning*, sebagai proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsi mengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan.
3. *Staffing*, dalam proses ini berkenaan dengan rekrutmen, penempatan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Pada dasarnya prinsip ini menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan pada saat yang tepat (*right people, right position, right time*).
4. *Directing*, yaitu usaha manusia untuk memobilisasi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

5. *Supervising*, sebagai instruksi langsung antara individu-individu dalam suatu organisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan organisasi tersebut.
6. Pengendalian (*controlling*), terhadap penetapan apa yang telah dicapai, yaitu proses evaluasi kinerja, dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sarana prasarana merupakan sektor pembangunan yang sangat penting bagi kelengkapan lingkungan dan aktivitas masyarakat. Menurut UU No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, pengertian prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (*spatial space*) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

Menurut Nurmandi (1999: 214) jenis prasarana yang termasuk prasarana publik meliputi jaringan jalan, transportasi umum, sistem air bersih, sistem air limbah, manajemen persampahan, jaringan drainase dan pencegahan banjir, instalasi listrik dan telepon. Sementara itu prasarana jalan lingkungan merupakan jalan penghubung antar lingkungan dengan lebar antara 3-5 meter, konstruksi jalan dapat berupa jalan perkerasan pasir batu, beton, aspal maupun paving, pada kedua sisi jalan dapat dilengkapi dengan saluran.

Sedangkan prasarana saluran lingkungan (drainase) merupakan saluran pematuan lingkungan dari air hujan maupun banjir dan sering pula dimanfaatkan sebagai saluran pembuang limbah tangga. Jenis dari saluran drainase ini sesuai dengan sifat dan fungsinya terdiri dari drainase primer, sekunder dan tersier (Ditjen Cipta karya, Dep. PU).

Prasarana berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan pemukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai dengan fungsinya. Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkan keseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkat kebutuhan dari masyarakat pengguna dan manfaat prasarana dalam suatu wilayah/kawasan pada suatu kawasan tertentu, keseimbangan antara kedua hal tersebut akan mengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryono, 1996:1).

Penyediaan sarana prasarana pemukiman merupakan salah satu aspek pengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai *stakeholder*. Masyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemantauan) pembangunan sarana prasarana, namun dalam ruang lingkup yang relatif terbatas.

Dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami, untuk pengambilan keputusan prioritas kegiatan pembangunan yang terdani berada dalam lingkup kecamatan namun untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasarana dapat dilakukan dalam suatu wilayah desa atau antar desa.

2.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakat yang berada di suatu daerah untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapat di sekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan, dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bersangkutan (Muchdie, dkk ed. 2001: 20).

2.4.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan, memiliki perspektif yang lebih luas. Pearse dan Stieffel (dalam Prijono, 1996:63) mengatakan bahwa menghormati kebhinnekaan, kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuatan, dan peningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatif. Hasil Konferensi Habitat Agenda tingkat dunia yang diadakan di Istanbul Turki tahun 1996 menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang secara tegas menyatakan ada keabsahan dan penting bagi berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam mencapai pembangunan pemukiman yang berkelanjutan.

2.4.1.1 Partisipasi Masyarakat

Menurut Parwoto (1997), partisipasi merupakan pelibatan diri secara penuh pada suatu tekad yang telah menjadi kesepakatan bersama antar anggota dalam satu kelompok/antar kelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari landasan konstitusional Negara Republik Indonesia maka partisipasi dapat disebut sebagai “Falsafah Pembangunan Indonesia”. Dengan demikian sudah sewajarnya bila tiap pembangunan haruslah menerapkan konsep partisipasi dan tiap partisipasi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu: proaktif atau sukarela (tanpa disuruh), adanya kesepakatan yang diambil bersama oleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebut, adanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut dan adanya pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsur/pihak yang terlibat.

Penerapan konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan kemudian disebut sebagai pembangunan partisipatif, yaitu pola pembangunan yang

melibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintah, swasta dan masyarakat yang akan langsung menikmati/terkena akibat pembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konsep partisipasi, dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dan sekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunan.

Pembangunan partisipatif ini mempertemukan perencanaan makro yang berwawasan lebih luas dengan perencanaan mikro yang bersifat kontekstual sehingga pembangunan mikro akan merupakan bagian tidak terpisahkan dari seluruh perencanaan makro. Pembangunan partisipatif juga mempertemukan pendekatan dari atas (*top-down*), dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atas dan pendekatan dari bawah (*bottom-up*), yang menekankan keputusan di tangan masyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing-masing. Dalam pembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku yang terlibat.

Partisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley, 1986) adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat secara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan dan berbagi hasil pembangunan secara adil. Demikian juga menurut Panudju (1996) partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan. Dengan demikian, dalam partisipasi harus melibatkan masyarakat mulai dari tahap: pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil, dan evaluasi (Cohen & Uphoff, 1980: 215-223)

Menurut Cooke dan Kothari ed. (2002:37) yang mengacu pada pendapat beberapa ahli mengemukakan bahwa *participatori* (partisipasi masyarakat) seringkali dibedakan menjadi dua kutub, yaitu kutub efisiensi dan kutub pemerataan dan pemberdayaan. Kutub pertama menekankan bahwa partisipasi adalah alat untuk mencapai hasil proyek/kegiatan yang lebih baik, sedangkan kutub kedua menekankan bahwa partisipasi merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan individu agar mampu meningkatkan atau merubah kehidupan mereka sendiri.

Lebih lanjut menurut Soetrisno (1995:221) ada dua jenis definisi partisipasi yang beredar dalam masyarakat, yaitu : definisi *pertama* adalah definisi yang diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia. Definisi partisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana /proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukur dengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah, dan definisi *kedua* yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka. Ukuran lain yang dipakai oleh definisi ini dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah ada

tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil proyek itu.

2.4.1.2 Kapasitas Masyarakat

Menurut Tim Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintah Daerah, Kerjasama antara BAPPENAS dan Departemen dalam Negeri dan Otonomi Daerah (1999-2000), dinyatakan bahwa pengertian kapasitas sebagai berikut: "Kapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien. Hal ini harus didasarkan pada pengkajian terus menerus kondisi-kondisi kerangka (*framework conditions*), dan pada suatu penyesuaian dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan." Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Menurut Soenarno (2002:3) kata komunitas (masyarakat yang berkelompok) dan partisipasi merupakan pasangan yang selalu akan muncul ketika membicarakan komunitas dalam pembangunan. Keduanya selalu muncul dan pengertiannya saling mengisi dan menggantikan. Karenanya dalam membahas kapasitas pembangunan suatu komunitas mungkin kita dapat mengartikannya sebagai seberapa besar tingkat partisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas. Dalam hal ini kapasitas pembangunan dapat dilihat sebagai kemampuan didalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya, baik alam maupun sosial, dengan teknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosial kehidupan manusia. Ada beberapa aspek yang menentukan kapasitas komunitas dan

keterlibatannya dalam pembangunan yakni ketersediaan pranata, sumberdaya manusia dan kondisi yang menunjang.

2.4.1.3 Perilaku Manusia

Perilaku atau aktivitas-aktivitas individu dapat dilihat dari sudut pandang secara *behavioristis* dan *kognitif*. Secara *behavioristis* disebutkan bahwa perilaku atau aktivitas individu tidak muncul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternal maupun internal. Perilaku sebagai respon terhadap stimulus sangat ditentukan oleh keadaan stimulusnya dan individu tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan perilakunya, sehingga bersifat mekanistik. Sementara menurut pandangan secara kognitif, yaitu memandang perilaku individu sebagai respon dari stimulus, dan dalam diri individu tersebut ada kemampuan untuk menentukan perilaku yang diambilnya. Hubungan antara stimulus dan respon tidak berlangsung secara otomatis, tetapi individu mengambil peran dalam menentukan perilakunya.(Walgito,2003:13-14).

2.4.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Wacana Kemiskinan

Chambers (1983: 113-114) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan sebagai suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dari ketidakberdayaan (*powerlessness*), kerapuhan (*vulnerability*), kelemahan fisik (*physical weakness*), kemiskinan (*poverty*), dan keterasingan (*isolation*). Sementara Kabeer (1994), berpendapat bahwa ketidakberdayaan bukan mengarah pada tidak adanya kekuatan sama sekali, akan tetapi pada kenyataannya yang tampaknya hanya memiliki sedikit kekuatan ternyata justru mampu untuk bertahan

menggulingkan dan kadang-kadang mentransformasikan kondisi hidup mereka. Jadi kekuatan itu ada, hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkan.

Pendapat Kabeer tersebut didasarkan pandangan Talcott Parson (1960) yang membedakan kekuasaan (*power*) menjadi dua dimensi, yaitu distributif dan generatif. Dimensi *distributif* kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain. Sedangkan dimensi generatif kekuasaan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkan masyarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masa depan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri. Dimensi *generatif* kekuasaan dapat diciptakan melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginal untuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan mereka untuk memberi pengaruh yang lebih besar terhadap lingkup kehidupan mereka pada tingkat local maupun nasional.

Mengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakan orang untuk dapat mandiri baik dalam pengertian ekonomi, sosial maupun politik. Disamping itu semakin tinggi akses ekonomi yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka diharapkan dapat mandiri dalam mengatasi problem kemiskinan yang dihadapi. Masyarakat dalam kondisi tidak berdaya karena masyarakat dalam situasi struktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskan aspirasi dan merealisasi potensi mereka dalam menangani masalah sosial (Harry, 2001). Dengan demikian pengertian pemberdayaan dalam arti luas dapat diterjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah.

2.4.3 Pemberdayaan Perempuan.

Menurut Karl (1995) pemberdayaan perempuan dipandang sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*Capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara pria dan perempuan.

2.4.4 Peran NGO's dalam Pemberdayaan

NGOs (Non-Governmental Organizations) di Indonesia dikenal dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) muncul sebagai alternatif model pembangunan di luar model pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah khususnya di negara-negara sedang berkembang atas dorongan dari pihak asing yang bersedia memberi donor atau bantuan dana. Oleh sebab itu keberadaan LSM dapat mendorong terjadinya demokratisasi pembangunan terutama dalam mengupayakan atau memberdayakan masyarakat miskin baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Kegiatan dari NGOs menurut pendapat Prijono (1996:98) adalah: suatu kegiatan yang berkaitan dengan proses dan dampak pembangunan, pengembangan, perubahan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan peran NGOs sebagai agen perubahan (*Agents of Change*) yaitu berperan sebagai fasilitator pendidikan masyarakat, komunikator bagi kepentingan masyarakat, lapisan bawah, katalisator dan dinamisator transformasi sosial, serta mediator antara pemerintah atau lembaga lain (bank) dan masyarakat.

Fasilitator memiliki peran penting dalam memunculkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Fasilitator perlu mengarahkan masyarakat untuk menyadari situasi kehidupan mereka serta memahami penyebab dan alternatif pemecahan situasi tersebut. Selain itu fasilitator memiliki peran pula sebagai *motivator* dan *community organizers* (Midgley, 1986:30-31).

Fasilitator perlu melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan peran tersebut. Mereka perlu menyampaikan informasi proyek melalui tokoh tokoh/kelompok masyarakat serta generasi muda; membujuk, mempengaruhi dan meyakinkan masyarakat; memberi informasi mengenai manfaat dan kerugian partisipasi; menunjukkan peluang pengembangan dan perbaikan kondisi fisik, sosial dan ekonomi; memudahkan akses kelompok/organisasi masyarakat ke berbagai sumberdaya; menempatkan kelompok masyarakat dalam organisasi formal; mengadakan penyuluhan dan ketrampilan teknis kepada masyarakat, serta mendukung kondisi program (Anonim, 1990:5).

Fasilitator juga perlu memiliki sikap dan kemampuan manajemen. Sikap yang perlu adalah demokratis dan terbuka, kebersamaan, serta ketanggapan, sedangkan kemampuan manajemen yang perlu dimiliki meliputi kemampuan pendelegasian wewenang, berkreasi, serta kemampuan memberi dan bereaksi terhadap umpan balik (UNDP, 1998:6).

Sementara itu fasilitator yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat pada pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga berasal dari NGO's (pihak konsultan) dan ada juga fasilitator yang dari anggota masyarakat setempat.

2.5 Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami.

Menurut Drucker (1978:44) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secara empiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan. Efektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknya suatu tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D, 2005:22) yang dapat dilihat dari kemampuan memecahkan masalah dan pencapaian tujuan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dengan tujuan melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga bertujuan untuk menyediakan sarana prasarana yang hancur akibat tsunami, membuka kesempatan kerja dan menambah pendapatan warga/orang miskin, serta adanya keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam PPK berupa penyediaan stimulan dana, penyediaan wadah bagi keterlibatan masyarakat dan pelatihan untuk memperkuat kemampuan masyarakat sebagai pelaku utama (subjek) dan penerima manfaat (objek) pembangunan, dengan didampingi fasilitator dari NGO's (pihak konsultan).

Yang menjadi tolok ukur efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga adalah besarnya perubahan tingkat kondisi pemberdayaan masyarakat pasca tsunami (dengan menggunakan indikator enam belas elemen pemberdayaan yang dikemukakan oleh Bartle dan di dalam penelitian ini dikelompokkan dalam tiga variabel utama yaitu potensi masyarakat, dukungan lingkungan masyarakat dan semangat pengorbanan

masyarakat) sebelum PPK pasca tsunami dibandingkan dengan setelah adanya PPK dan dihubungkan dengan hasil analisis besarnya prosentase jawaban responden yang menyatakan ada hubungan antara tingkat kondisi masyarakat setelah PPK pasca tsunami dengan pemberdayaan masyarakat dalam PPK pasca tsunami tersebut. Adapun kriterianya sebagai berikut:

- 1) Cukup efektif, jika selisih antara tingkat kondisi masyarakat setelah PPK dengan sebelum PPK pasca tsunami lebih besar atau sama dengan 0,50 dan hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat dalam PPK pasca tsunami sama atau lebih dari 50 %.
- 2) Kurang efektif, jika selisih antara tingkat kondisi masyarakat setelah PPK dengan sebelum PPK pasca tsunami kurang dari 0,50 atau hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK kurang dari 50 %.

2.6 Rangkuman Kajian Literatur

Berdasarkan pendapat ahli/pakar di atas dan sejalan dengan tujuan serta sasaran penelitian ini maka dapat dirangkum sebagai berikut:

PAKAR	PENDAPAT	VARIABEL TERPILIH
Drucker (1978:44)	Efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secara empiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan.	
(Zulkaidi dalam Wahyuningsih D, 2005:22)	Efektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknya suatu tindakan yang dapat dilihat dari kemampuan memecahkan masalah dan pencapaian tujuan.	
Korten, 1992	Pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modal.	
Paul, 1987	Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (<i>equitable sharing of power</i>) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.	

Robert Dahl (1973:50)	Pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya.	
Kieffer (1984:65)	Pemberdayaan mempunyai tiga dimensi yang saling berpotongan dan berhubungan : a) Perkembangan konsep diri yang lebih positif. b) Kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan social dan politis. c) Sumberdaya individu dan kelompok untuk aksi-aksi social maupun kelompok.	
Drijver dan Sajise, (dalam Sutrisno 2005:18)	Lima prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat yaitu : pendekatan dari bawah, partisipasi, konsep keberlanjutan, keterpaduan dan keuntungan sosial dan ekonomi.	
United Nations (1956: 83-92)	<p>Proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :</p> <p>(1) <i>Getting to know the local community</i> Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya.</p> <p>(2) <i>Gathering knowledge about the local community</i> Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal</p> <p>(3) <i>Identifying the local leaders</i> Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat.</p> <p>(4) <i>Stimulating the community to realize that it has problems</i> Perlu pendekatan persuasif agar masyarakat sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.</p> <p>(5) <i>Helping people to discuss their problem</i> Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.</p> <p>(6) <i>Helping people to identify their most pressing problems</i> Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan yang harus diutamakan pemecahannya.</p>	<p>Karakteristik Masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis kelamin - Umur - pekerjaan - tingkat pendidikan - tingkat pendapatan <p>- Dukungan pimpinan lokal</p> <p>- Sosialisasi</p> <p>- Musyawarah Identifikasi masalah</p> <p>- Penentuan program prioritas</p>

	<p>(7) <i>Fostering self-confidence</i> Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. sebagai modal utama masyarakat untuk berswadaya.</p> <p>(8) <i>Deciding on a program action</i> Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan berdasarkan skala prioritas.</p> <p>(9) <i>Recognition of strengths and resources</i> Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.</p> <p>(10) <i>Helping people to continue to work on solving their problems</i> Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan sehingga perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.</p> <p>(11) <i>Increasing people's ability for self-help</i> Menumbuhkan kemandirian masyarakat atau kemampuan menolong diri sendiri dengan meningkatkan kemampuan berswadaya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Motivasi swadaya - Pelaksanaan pembangunan - Pemanfaatan sumber daya - Pengorganisasian - Pelatihan
Ross, (1987 : 77-78)	Tiga pola pendekatan pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, yaitu: <i>the single function, the multiple approach, dan the inner resources approach.</i> ,	
Suharto, (1997:218-219)	Lima jenis pendekatan pemberdayaan masyarakat yaitu : pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.	
Sulistiyani (2004:83-84)	Proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap, yaitu : 1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. 2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-ketrampilan agar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. 3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan- ketrampilan agar sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.	
Bartle,2002	Enam belas elemen pemberdayaan masyarakat yaitu : 1. Mendahulukan kepentingan umum: porsi dari, dan tingkat kemana, kesiapan individu mengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk kepentingan seluruh masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Mendahulukan kepentingan umum

	<p>2. Kesamaan nilai: tingkatan dimana anggota masyarakat membagi nilai, khususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang menggantikan kepentingan anggota dalam masyarakat.</p> <p>3. Layanan masyarakat: fasilitas dan layanan (seperti jalan, pasar, air minum, jalur pendidikan, layanan kesehatan), yang dipelihara secara berkelanjutan dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitas dan layanan.</p> <p>4. Komunikasi: dalam masyarakat, dan diantara mereka dan lingkungannya, komunikasi termasuk jalan, metode elektronika, media cetak, jaringan kerja, bahasa yang dapat saling dimengerti, kemampuan tulis baca dan keinginan dan kemampuan berkomunikasi secara umum.</p> <p>5. Percaya diri: ekspresi individu masyarakat dalam mencapai harapan, sikap positif, keinginan, motivasi diri, antusiasme, optimisme, bergantung pada diri sendiri daripada sikap ketergantungan, keinginan untuk memperjuangkan haknya, menghindari sikap masa bodoh dan pasrah, suatu "visi" dari sesuatu yang mungkin.</p> <p>6. Keterkaitan (politis dan administrative): suatu lingkungan yang mendukung perkuatan termasuk bersifat politis (t nilai dan sikap pemimpin nasional, hukum dan legislative) dan elemen administrative (sikap dari pegawai dan teknisi sipil, sebaik peraturan dan prosedur pemerintah), dan lingkungan hukum.</p> <p>7. Informasi: kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi, tingkat kepedulian, pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individu dan dalam kelompok secara keseluruhan.</p> <p>8. Rintangan: pengembangan dan efektivitas pergerakan (perpindahan, pelatihan manajemen, munculnya kepedulian, rangsangan) ditujukan pada perkuatan masyarakat? Apakah sumber daya dari dalam dan luar meningkatkan tingkat kebergantungan atau meningkatkan kemandirian.</p> <p>9. Kepemimpinan: pemimpin-pemimpin memiliki kekuatan, pengaruh, dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat. Pemimpin harus memiliki keahlian, kemauan, kejujuran dan beberapa karisma.</p> <p>10. Jaringan kerja: adanya kenalan dari anggota masyarakat atau khususnya pemimpin mereka mengetahui orang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang dapat menyediakan sumber yang bermanfaat yang akan memperkuat masyarakat secara keseluruhan.</p>	<p>- Kesamaan nilai</p> <p>- Layanan masyarakat</p> <p>- Komunikasi</p> <p>- Percaya diri</p> <p>- Keterkaitan</p> <p>- Informasi</p> <p>- Rintangan/ intervensi</p> <p>- Kepemimpinan</p> <p>- Jaringan kerja</p>
--	---	--

	<p>11. Organisasi: tingkatan dimana anggota masyarakat yang berbeda melihat diri mereka sendiri sebagai masing-masing yang memiliki peran dalam mendukung keseluruhan termasuk integritas organisasi, struktur, prosedur, pengambilan keputusan, proses, efektivitas, divisi tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi.</p> <p>12. Kekuatan politik: tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalam pengambilan keputusan daerah dan nasional.</p> <p>13. Keahlian: kemampuan, wujud dalam individu, yang akan membawa pada organisasi masyarakat dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan, kemampuan teknis, kemampuan manajemen, kemampuan berorganisasi, kemampuan mengarahkan.</p> <p>14. Kepercayaan: tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakat terhadap sesamanya, khususnya pemimpin dan abdi masyarakat, yang terpantul dari tingkat integritas (kejujuran, ketergantungan, keterbukaan, transparansi, azas kepercayaan) dalam masyarakat</p> <p>15. Keselarasan: pembagian rasa kelompok yang menyusun masyarakat, meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau perbedaan (agama, kelas, status, penghasilan, usia, jenis kelamin, adat, suku), tingkat toleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu dan lainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama, suatu rasa kesamaan tujuan atau visi, perataan nilai.</p> <p>16. Kekayaan: tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumber daya actual, dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang dan bermanfaat, keuangan dan non keuangan.</p>	<p>- Organisasi</p> <p>- Kekuatan politik</p> <p>- Keahlian</p> <p>- Kepercayaan</p> <p>- Persatuan</p> <p>- Kekayaan</p>
<p>Muchdie, dkk. ed. (2001: 20)</p>	<p>Pengembangan wilayah merupakan usaha memberdayakan suatu masyarakat yang berada di suatu daerah itu untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapat disekeliling mereka dengan menggunakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan, dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bersangkutan.</p>	
<p>UU No. 4 tahun 1992</p>	<p>Pengertian prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (<i>spatial space</i>) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.</p>	

Siregar, dkk. (1987: 16-21):	Dalam proses pengelolaan terdapat berbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan meliputi : penetapan tujuan, perencanaan, staffing, directing, supervising dan pengendalian.	
Parwoto,1997	Pembangunan partisipatif adalah pola pembangunan yang melibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintah, swasta dan masyarakat yang akan langsung menikmati/terkena akibat pembangunan) dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konsep partisipasi, dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dan sekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunan.	

Sumber: Hasil analisis, 2007

Untuk lebih jelas tentang variabel dan Indikator efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami dapat dilihat pada tabel II.2 berikut:

TABEL II.2
VARIABEL DAN INDIKATOR EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PPK PASCA TSUNAMI

NO.	VARIABEL	INDIKATOR
<i>Proses Pemberdayaan Masyarakat</i>		
1.	Dukungan pimpinan lokal	Bentuk dukungan pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat terhadap pengelolaan PPK pasca tsunami.
2.	Sosialisasi	Peran fasilitator dalam mensosialisasikan PPK dan mendampingi masyarakat untuk mengenali permasalahan yang sedang mereka hadapi.
3.	Musyawahah Identifikasi masalah	Kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mendiskusikan jenis permasalahan dan upaya pemecahannya melalui PPK pasca tsunami dengan membuat peta permasalahan dan alternatif pemecahannya.
4.	Penentuan program prioritas	Kemampuan masyarakat dalam menentukan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan.
5.	Motivasi swadaya	Bentuk swadaya masyarakat yang disumbangkan bagi pengelolaan kegiatan PPK pasca tsunami.
6.	Pelaksanaan pembangunan	Jumlah masyarakat yang terlibat, kemampuan teknis dan manajemen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PPK pasca tsunami.
7.	Pemanfaatan sumber daya	Kemampuan masyarakat dalam mengenali dan memanfaatkan stimulan dana dan sumber daya lokal untuk keperluan pembangunan.
8.	Pengorganisasian	Jenis dan peran organisasi pengelola PPK pasca tsunami di tingkat Kecamatan Lhoknga dan desa/kelurahan.
9.	Pelatihan	Jenis pelatihan dan manfaatnya bagi pelaku PPK dalam mengelola PPK pasca tsunami.

Elemen Pemberdayaan Masyarakat

A. Potensi Masyarakat :

1.	Percaya diri	Sikap masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang muncul akibat adanya kejadian gempa bumi dan tsunami.
2.	Komunikasi	Kemampuan masyarakat untuk berkomunikasi dalam forum musyawarah (yang terlihat dari kejelasan pendapat, aspirasi, saran dan usulan yang disampaikan serta proses diskusi yang terjadi).
3.	Keahlian	<u>Kemampuan Manajemen :</u>
		a. Kemampuan masyarakat dalam menyusun rincian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di desa/kelurahan pasca tsunami.
		b. Kemampuan masyarakat dalam membuat peta potensi desa yang mencakup semua sumber daya yang ada di desa/kelurahan pasca tsunami .
		c. Kemampuan masyarakat dalam menyusun program pembangunan desa/kelurahan pasca tsunami.
		d. Kemampuan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa/kelurahan (yang terlihat dari ketersediaan dana, alat dan bahan serta kemampuan pelaku pembangunan menyelesaikan kegiatan pembangunan).
		e. Kemampuan masyarakat dalam memelihara/merawat sarana/prasarana fisik yang telah dibangun di lingkungan masyarakat pasca tsunami .
		f. Kemampuan masyarakat dalam melestarikan perguliran bantuan modal usaha ekonomi bergulir pasca tsunami.
		g. Kemampuan masyarakat dalam mengawasi atau mengontrol pelaksanaan pembangunan (yang dapat dilihat dari keaktifan masyarakat dalam mengawasi pekerjaan dan kemauan menegur jika ada yang menyimpang).
		<u>Kemampuan Teknis</u> Kemampuan masyarakat dalam membuat Desain, Gambar dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan fisik sarana dan prasarana seperti jalan, saluran, jembatan, rumah, meunasah dan gedung kantor di desa/kelurahan.
		<u>Kemampuan Organisasi</u> Kemampuan masyarakat dalam menjalankan organisasi masyarakat (misalnya LKMD, Karang taruna, PKK, dan lain-lain) sesuai dengan fungsinya.
4.	Kepercayaan	Rasa kepercayaan yang tumbuh diantara sesama masyarakat desa/kelurahan.
5.	Kekayaan	a. Kemampuan masyarakat usia kerja di desa/kelurahan untuk mendapatkan mata pencaharian di semua sektor perekonomian yang ada (pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan dan jasa) pasca tsunami.
		b. Banyaknya sumber daya keuangan dan non keuangan (sumbangan tenaga kerja, tanah, peralatan, pengetahuan dan keahlian) milik masyarakat atau desa/kelurahan yang digunakan untuk kepentingan pembangunan di desa/kelurahan.

B. Dukungan Lingkungan Masyarakat :		
6.	Layanan Masyarakat	a. Jumlah dan jenis fasilitas dan layanan umum (seperti jalan, saluran, listrik, pasar, air minum, jalur pendidikan, layanan kesehatan) yang tersedia di lingkungan masyarakat .
		b. Kemudahan akses masyarakat terhadap penggunaan fasilitas dan layanan umum seperti jalan, saluran, listrik, pasar, air minum, jalur pendidikan dan layanan kesehatan.
7.	Informasi	Kesadaran anggota masyarakat untuk mengembangkan informasi di lingkungan masyarakat (informasi tentang sumber dana yang dapat diakses, pemanfaatan teknologi tepat guna, pelatihan, layanan kesehatan, tata cara pengelolaan pembangunan, dan lain-lain).
8.	Keterkaitan	Keterkaitan antara masyarakat dengan pemerintah dalam rangka pemulihan kondisi masyarakat dan lingkungan pasca tsunami (yang terlihat dari kebijakan dan adanya kesesuaian antara kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dengan kebutuhan masyarakat).
9.	Rintangan	Kesempatan masyarakat untuk ikut menentukan keputusan tentang pembangunan (misalnya pembangunan rumah, sarana prasarana umum dan sosial ekonomi, penyediaan modal dan lain-lain) yang dilaksanakan di lingkungan desa/kelurahan.
10.	Kepemimpinan	Kualitas pemimpin masyarakat yang ada di desa/kelurahan (memiliki keahlian, ketaqwaan, kejujuran, kharisma dan peduli kepada masyarakat).
11.	Jaringan Kerja	Hubungan kerjasama antara masyarakat dengan pihak luar (masyarakat desa lain, BRR, pihak swasta, lembaga donor, NGO, dll) dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desa/kelurahan.
12.	Organisasi	Kelengkapan organisasi pengelola pembangunan (seperti struktur pengurus, prosedur kerja, tata cara pengambilan keputusan, pembagian tugas dan kejelasan peran dan fungsi) di lingkungan masyarakat desa/kelurahan
13.	Kekuatan Politik	a. Tingkat keinginan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui forum musyawarah pembangunan desa/kelurahan.
		b. Akses penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat melalui partai politik (parpol) atau lembaga legislatif (DPRD).
C. Semangat Pengorbanan Masyarakat :		
14.	Mendahulukan Kepentingan Umum	Kesediaan individu dalam masyarakat untuk mengorbankan kepentingan pribadi bagi kepentingan seluruh masyarakat (yang dipantulkan dalam tingkat kedermawanan, gotong royong, tolong menolong dan hubungan kekerabatan dalam masyarakat).
15.	Kesamaan Nilai	Munculnya inisiatif atau ide-ide kreatif misalnya ide untuk pengumpulan dana bagi kegiatan pembangunan, menjaga keamanan dan kebersihan desa dan lain-lain yang disumbangkan bagi kepentingan masyarakat.
16.	Persatuan	Kemauan masyarakat untuk saling berbagi dan toleransi terhadap masyarakat yang berbeda (usia, status, penghasilan, jenis kelamin) dalam mewujudkan kebersamaan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sumber: Hasil analisis, 2007

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) PASCA TSUNAMI DI KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Gambaran Kecamatan Lhoknga

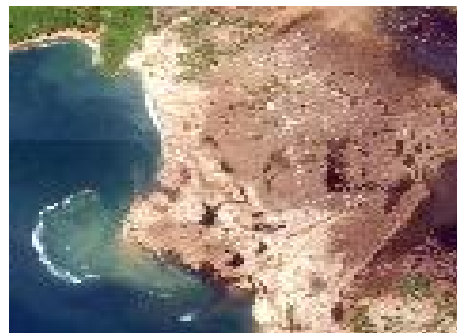
Kecamatan Lhoknga merupakan salah satu dari kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar yang terkena bencana tsunami. Sebagian besar desa di Kecamatan Lhoknga terkena tsunami dengan perincian 21 desa rusak dan hanya 4 desa yang tidak terkena langsung tsunami. Batas lokasi geografis Kecamatan Lhoknga :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Leupung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Darul Kamal.

Gambaran kerusakan Kecamatan Lhoknga akibat tsunami tanggal 26 Desember 2004 dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:



Januari 10, 2003



December 29, 2004

Sumber : Gambar satelite, www.globalcoordinate.com, 2005

GAMBAR 3.1
KERUSAKAN AKIBAT TSUNAMI DI KECAMATAN LHOKNGA

Penduduk Lhoknga sebelum tsunami berjumlah 20.444 jiwa. Akibat bencana gempa dan tsunami, jumlah penduduk Kecamatan Lhoknga pada tahun 2006 berkurang menjadi 13.577 jiwa dengan perincian penduduk laki-laki 7.164 jiwa dan perempuan 6.413 jiwa. Jumlah penduduk per desa dapat dilihat pada *lampiran A.3*.

Kerusakan yang ditimbulkan akibat tsunami di Kecamatan Lhoknga berupa banyaknya penduduk yang menjadi korban yaitu meninggal sebanyak 5.473 orang dan hilang sebanyak 1.735 orang, kerusakan infrastruktur yang sangat parah yaitu rusaknya rumah sebanyak 2.597 unit, ruko/toko 270 unit, sekolah 24 unit, mesjid 4 unit, meunasah/mushalla 55 unit, jalan 332,3 km, jembatan 23 buah, puskesmas/pustu 4 unit, bangunan kantor 25 unit, pesantren/dayah 6 unit, sawah 2.155 ha, tambak 28 unit, TPI 2 unit, boat/kapal 151 unit, pasar/terminal 4 unit, dermaga 2 unit dan inventarisasi penduduk (korban) dan kerusakan infrastruktur per desa dapat dilihat pada *lampiran A.4*.

3.1.2 Karakteristik Kelurahan Mon Ikeun, Desa Lambaro Seubun dan Desa Meunasah Karieng.

Kelurahan Mon Ikeun terletak di pusat ibukota Kecamatan Lhoknga dengan luas wilayah 425 Ha dan areal yang digunakan untuk perumahan/pemukiman seluas 14 Ha, jumlah penduduk sebanyak 1085 jiwa yang terdiri dari 618 laki-laki dan 467 perempuan, serta 400 KK, berbatasan langsung dengan pantai, jumlah korban jiwa pada saat tsunami sangat banyak (1.630 orang) dan kerusakan jalan akibat tsunami sepanjang 7 km.

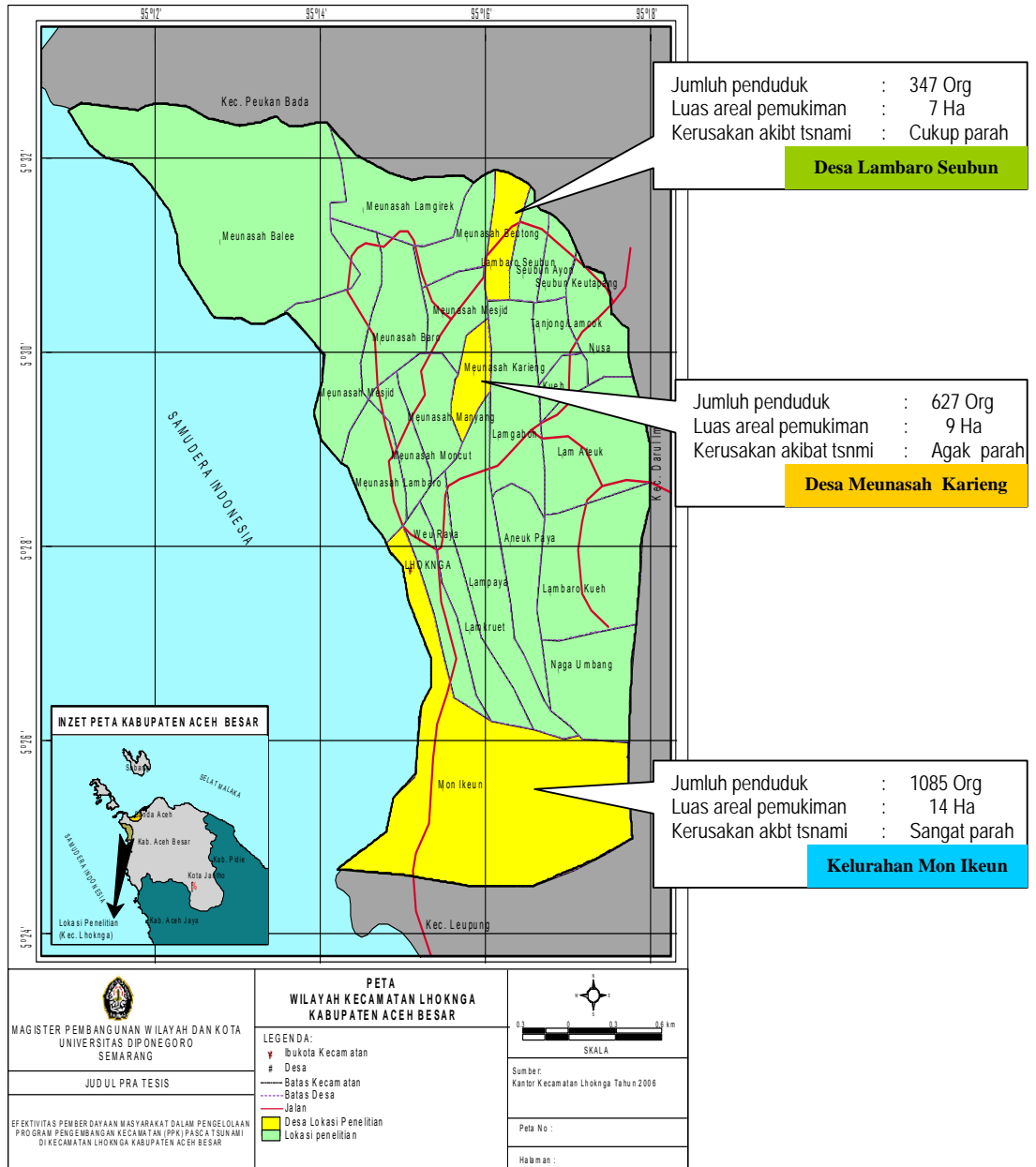
Mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Mon Ikeun sebagian besar petani (40 %) dan yang lainnya berprofesi sebagai nelayan (30 %), pedagang/swasta

(20 %) dan pegawai (10 %). Sampai saat ini masih ada penduduk Mon Ikeun yang belum kembali ke desa karena sedang menunggu selesainya pembangunan rumah dan fasilitas lain yang hancur akibat tsunami. Jenis kegiatan yang dibangun melalui PPK pasca tsunami berupa prasarana jalan dan saluran.

Desa Lambaro Seibun terletak 6 km jauhnya dari pusat ibukota Kecamatan Lhoknga dengan luas wilayah 350 Ha dan areal yang digunakan untuk perumahan/pemukiman seluas 7 Ha, jumlah penduduk 347 jiwa yang terdiri dari 178 laki-laki dan 169 perempuan, serta 110 KK bukan desa pantai dan jumlah korban jiwa saat tsunami 11 orang, kerusakan lahan pertanian sekitar 70 hektar.

Mata pencaharian masyarakat di Desa Lambaro Seibun sebagian besar petani (70 %) dan yang lainnya berprofesi sebagai tukang (10 %), pedagang (10 %), pegawai negeri (5 %) dan nelayan (5 %). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat sangat bergantung pada lahan pertanian yang ada di desa mereka, akibat tsunami banyak areal persawahan dan kebun milik masyarakat yang rusak, hingga saat ini areal pertanian yang sudah di rehabilitasi baru mencapai 40 % atau 40 hektar. Jenis kegiatan yang dibangun melalui PPK pasca tsunami berupa Pemagaran Areal Sawah.

Desa Meunasah Karieng terletak 4 km jauhnya dari pusat ibukota Kecamatan Lhoknga dengan luas wilayah 200 Ha dan areal yang digunakan untuk perumahan/pemukiman seluas 9 Ha, jumlah penduduk 627 jiwa yang terdiri dari 283 laki-laki dan 344 perempuan, serta 185 KK bukan desa pantai dan jumlah korban jiwa saat tsunami sebanyak 14 orang. *(Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 3.2)*



GAMBAR 3.2
PETA KARAKTERISTIK DESA LOKASI PENELITIAN DALAM
KECAMATAN LHOKNGA

Mata pencaharian masyarakat di Desa Meunasah Karieng sebagian besar petani (70 %) dan yang lainnya berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (15 %), tukang (10 %) dan pedagang (5 %). Imbas tsunami di Desa Meunasah Karieng meliputi sebagian kecil areal perumahan penduduk dan lahan pertanian masyarakat yang rusak akibat tsunami juga sudah dapat difungsikan kembali. Jenis kegiatan yang dibangun melalui PPK pasca tsunami berupa Gedung Taman Pendidikan Alquran (TPA).

Karakteristik masyarakat yang terlibat sebagai pelaku PPK pasca tsunami di tiga lokasi penelitian dalam Kecamatan Lhoknga terdiri dari 74,07 % laki-laki dan 25,93 % perempuan. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa adanya keterlibatan kaum perempuan dalam pengelolaan PPK pasca tsunami. Pendidikan terakhir yang ditamatkan, jenis pekerjaan dan jumlah pendapatan/bulan pelaku PPK beragam, demikian juga dengan usia yang beragam (berkisar antara 20 sampai dengan 75 tahun).

Adapun komposisi tingkat pendidikan warga masyarakat pelaku PPK pasca tsunami di 3 lokasi tersebut dapat dilihat pada tabel III.1 berikut:

TABEL III.1
KOMPOSISI TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT PELAKU PPK DI
KELURAHAN MON IKEUN, DESA LAMBARO SEUBUN
DAN DESA MEUNASAH KARIENG

No.	Pendidikan Terakhir	Mon Ikeun		Lambaro Seubun		Meunasah Karieng	
		Jumlah (org)	Pesentase (%)	Jumlah (org)	Pesentase (%)	Jumlah (org)	Pesentase (%)
1.	Perguruan Tinggi	3	16,67	2	11,11	10	55,56
2.	SLTA	15	83,33	8	44,44	8	44,44
3.	SLTP	-	-	3	16,67	-	-
4.	SD	-	-	5	27,78	-	-
5.	Tidak tamat SD	-	-	-	-	-	-
Jumlah		18	100	18	100	18	100

Sumber: Hasil analisis, 2007

Berdasarkan tabel III.1 di atas terlihat pelaku PPK pasca tsunami di Kelurahan Mon Ikeun mayoritas tamatan SLTA 83,33 % dan tamatan perguruan tinggi 16,67 %. Sedangkan untuk Desa Lambaro Seibun mayoritas tamatan SLTA sebesar 44,44 %, untuk tamatan perguruan tinggi sebesar 11,11 %, tamatan SLTP 16,67 % dan tamatan SD 27,78 %. Tingkat pendidikan pelaku PPK di Desa Meunasah Karieng mayoritas tamatan perguruan tinggi yaitu sebanyak 55,56 % dan tamatan SLTA 44,44 %.

Mengenai komposisi jenis pekerjaan warga masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kelurahan Mon Ikeun, Desa Lambaro Seibun dan Desa Meunasah Karieng dapat dilihat pada tabel III.2 berikut:

TABEL III.2
KOMPOSISI JENIS PEKERJAAN MASYARAKAT PELAKU PPK DI
KELURAHAN MON IKEUN, DESA LAMBARO SEUBUN
DAN DESA MEUNASAH KARIENG

No.	Jenis Pekerjaan	Mon Ikeun		Lambaro Seibun		Meunasah Karieng	
		Jumlah (org)	Pesentase (%)	Jumlah (org)	Pesentase (%)	Jumlah (org)	Pesentase (%)
1.	PNS	1	5,56	-	-	6	33,33
2.	Pensiunan	1	5,56	3	16,67	2	11,11
3.	Pegawai Kantor Swasta	2	11,11	-	-	-	-
4.	Buruh Pabrik/Bangunan	-	-	-	-	-	-
5.	Pedagang	2	11,11	1	5,56	-	-
6.	Nelayan	-	-	-	-	-	-
7.	Petani	-	-	4	22,22	2	11,11
8.	Wiraswasta	7	38,89	6	33,33	3	16,67
9.	Mahasiswa	3	16,67	-	-	-	-
10.	Ibu Rumah Tangga (IRT)	2	11,11	4	22,22	5	27,78
Jumlah		18	100	18	100	18	100

Sumber: Hasil analisis, 2007

Berdasarkan data pada tabel di atas, jenis pekerjaan masyarakat pelaku PPK di Mon Ikeun mayoritas wiraswasta 38,89 %, mahasiswa 16,67 % Ibu Rumah Tangga 11,11 %, pedagang 11,11 %, pegawai kantor swasta 11,11 %, pensiunan 5,56 % dan PNS 5,56 %. Untuk pendapatan rata-rata keluarga mereka per bulan

mayoritas berkisar antara Rp. 750 ribu s/d Rp. 1,5 juta yaitu sebanyak 72,22 %, yang berpendapatan lebih dari Rp. 1,5 juta 11,11 % dan 16,67 % pendapatannya kurang dari Rp. 750 ribu. Jadi taraf hidup mereka bisa dikatakan sedang dan hanya sebagian kecil yang berpendapatan di bawah UMR (Rp. 750 ribu/bulan) atau sebagian besar dari mereka tergolong warga yang relatif mampu.

Sedangkan pelaku PPK di Lambaro Seibun mayoritas wiraswasta sebanyak 33,33 %, yang lainnya Ibu Rumah Tangga 22,22 %, petani 22,22 %, pensiunan 16,67 % dan pedagang 5,56 %. Pendapatan rata-rata keluarga per bulan mayoritas kurang dari Rp. 750 ribu yaitu 61,11 %, yang berpendapatan antara Rp. 750 ribu s/d Rp. 1,5 juta sebanyak 27,78 %, dan 11,11 % berpendapatan lebih dari Rp. 1,5 juta. Berdasarkan data tersebut taraf hidup mereka bisa dikatakan rendah karena sebagian besar berpendapatan di bawah UMR (Rp. 750 ribu perbulan) sehingga dapat disimpulkan sebagian besar pelaku PPK di Desa Lambaro Seibun tergolong warga berpenghasilan rendah.

Sementara pelaku PPK di Meunasah Karieng mayoritas PNS sebanyak 33,33 %, Ibu Rumah Tangga 27,78 %, wiraswasta 16,67 %, petani 11,11 % dan pensiunan 11,11 %. Pendapatan rata-rata keluarga mereka per bulan mayoritas berkisar antara Rp. 750 ribu s/d Rp. 1,5 juta yaitu sebanyak 50 %, yang berpendapatan lebih dari Rp. 1,5 juta sebanyak 27,78 % dan 22,22 % berpendapatan kurang dari Rp. 750 ribu. Berdasarkan data tersebut taraf hidup mereka bisa dikatakan sedang dan hanya sebagian kecil yang berpendapatan di bawah UMR (Rp. 750 ribu perbulan), sehingga dapat disimpulkan sebagian besar tergolong warga yang relatif mampu.

3.2 Gambaran Umum Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

3.2.1 Latar Belakang dan Tujuan Program

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka pengembangan kemandirian masyarakat sejak tahun 1998, demikian juga dengan PPK di Kabupaten Aceh Besar.

Tujuan umum dari PPK adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintahan lokal, serta penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi. Sedangkan tujuan khusus PPK meliputi : (1) Meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan; (2) Pelembagaan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal; (3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan; (4) Menyediakan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan masyarakat; dan (5) Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin.

3.2.2 Prinsip dan Indikator Keberhasilan Program

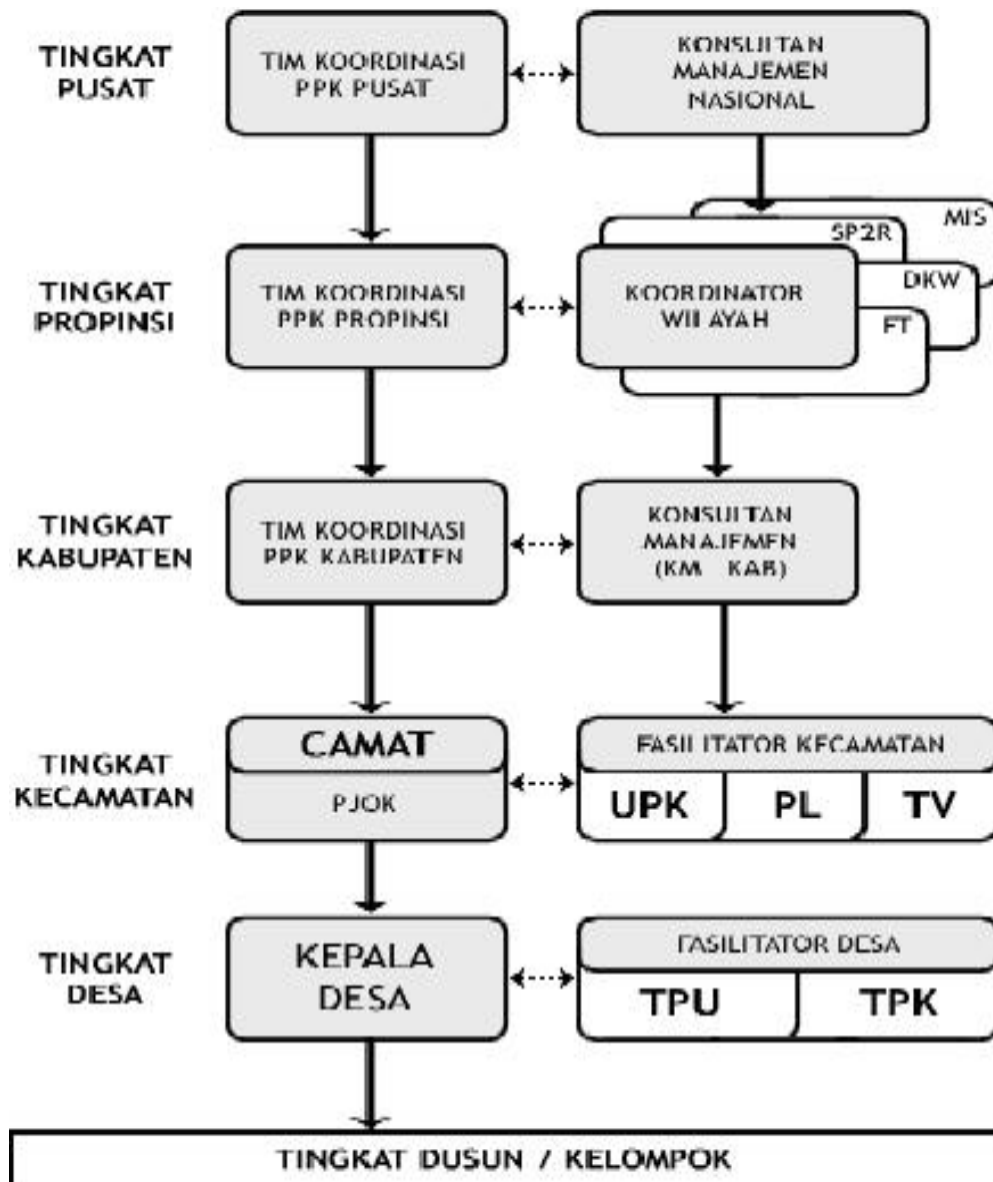
Untuk mencapai tujuan yang umum dan khusus tersebut, PPK disemangati oleh prinsip-prinsip utama yaitu : (1) Keberpihakan kepada orang miskin; (2) Transparansi; (3) Partisipasi; (4) Kompetisi sehat; (5) Desentralisasi; (6) Akuntabilitas; (7) Pelestarian.

Keberhasilan umum PPK secara langsung dihitung berdasarkan indikator-indikator menurut (Petunjuk Teknis Operasional PPK, Depdagri, 2002) sebagai berikut: (a) Kehadiran dan keterlibatan orang miskin dalam setiap tahapan program; (b) Kehadiran/keterlibatan perempuan dalam setiap tahapan kegiatan; (c) Tingkat keswadayaan masyarakat; (d) Dukungan pemerintahan lokal dalam setiap tahapan PPK; (e) Tingkat pemanfaatan sarana prasarana yang telah dibangun; (f) Tingkat kesehatan UPK dalam pengelolaan dana bergulir.

3.2.3 Struktur Manajemen PPK

Untuk mengelola PPK, Pemerintah Indonesia menunjuk Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) sebagai instansi pelaksana (*executing agency*). Sementara itu untuk membantu pengelolaan PPK secara nasional, dibentuk Tim Koordinasi PPK (TK-PPK) yang terdiri dari Bappenas, Depdagri, Depkeu, dan Dep. Kimpraswil, mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Di Tingkat Kecamatan, Kepala seksi PMD bertindak sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) PPK lokal atau disebut Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK).

Selain dari unsur pemerintah, ada juga pihak konsultan mulai dari tingkat Nasional yaitu Konsultan Manajemen Nasional (KMN) yang terdiri dari staf profesional/spesialis berada di kantor Jakarta dan di Provinsi di pimpin oleh Koordinator Provinsi. Untuk tingkat Kabupaten dikenal dengan Konsultan Manajemen Kabupaten (KM Kab) Di tingkat Kecamatan ditempatkan Fasilitator Kecamatan (FK) yang terdiri dari FK pemberdayaan dan FK Teknis. Untuk lebih jelas struktur manajemen PPK dapat dilihat pada gambar 3.3.



- Ket :
- MIS : *Management Information Specialist*
 - SP2R : Spesialis Penanganan Pengaduan Regional
 - DKW : Dewan Koordinator Wilayah
 - FT : Fasilitator Training
 - KM-Kab : Konsultan Manajemen Kabupaten
 - PjOK : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
 - UPK : Unit Pengelola Kegiatan
 - PL : Pendamping Lokal
 - TV : Tim Verifikasi
 - TPU : Tim Penulis Usulan
 - TPK : Tim Pengelola Kegiatan

Sumber: www.KDP.or.id.2006

GAMBAR 3.3
STRUKTUR MANAJEMEN

3.2.4 Sumber Dana dan Jenis Kegiatan

Sumber dana PPK berasal dari Pemerintah (APBN, APBD), pinjaman Luar Negeri/Bank Dunia dan Masyarakat. Bantuan dari Pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan dalam PPK merupakan pinjaman luar negeri untuk masyarakat desa. Pada dasarnya PPK sangat terbuka untuk semua usulan kegiatan masyarakat yang akan didanai (*open menu*), terutama jenis kegiatan yang menguntungkan dan melibatkan banyak masyarakat miskin serta memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan

3.2.5 Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami.

Pada akhir tahun 2004 terjadi bencana gempa bumi dan tsunami dahsyat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan telah memporakporandakan hampir seluruh kegiatan PPK yang pernah diterima masyarakat selama kurun waktu lebih dari 6 tahun (1998-2004). Ratusan atau ribuan prasarana mulai dari jalan, jembatan, air bersih, MCK, posyandu, polindes hingga rehab bangunan pendidikan kondisinya rusak berat dan bahkan lenyap tersapu bencana. Kondisi masyarakat tercerai berai di berbagai tempat pengungsian atau di lokasi luar desa yang dinilai aman atau tidak terkena bencana, penduduk berduka dan mengalami trauma pasca bencana.

Dalam situasi seperti itu, bantuan dan kegiatan PPK pasca bencana diubah dengan PPK pola khusus, yaitu dalam rangka tanggap darurat serta percepatan pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada lokasi yang terkena bencana yang ditetapkan dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pola Khusus. Tujuan dari pemberlakuan juklak khusus dan PTO khusus tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana adalah rekonstruksi sosio kultural masyarakat lokasi bencana, pemberian

insentif ekonomi rakyat dan pendapatan keluarga melalui kegiatan padat karya, serta penyediaan dan pemulihan infrastruktur pedesaan. PPK rehabilitasi pasca tsunami bertujuan untuk mengorganisir kembali masyarakat yang tercerai berai dan membantu memulihkan kembali prasarana yang rusak serta mendanai berbagai usulan prasarana baru lainnya yang dianggap mendesak dan sangat dibutuhkan. (*Petunjuk PPK-Depdagri, 2005*)

Prinsip-prinsip yang diutamakan dalam PPK pasca tsunami:

- Partisipasi, artinya dalam setiap tahapan kegiatan selalu melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat.
- Transparansi, artinya dalam setiap langkah dan kegiatan harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan dipertanggungjawabkan.
- Sederhana, artinya pelaksanaan kegiatan diupayakan sesederhana mungkin dan bisa dikerjakan masyarakat dengan tetap mengacu pada tujuan, prinsip dan mekanisme yang berlaku.

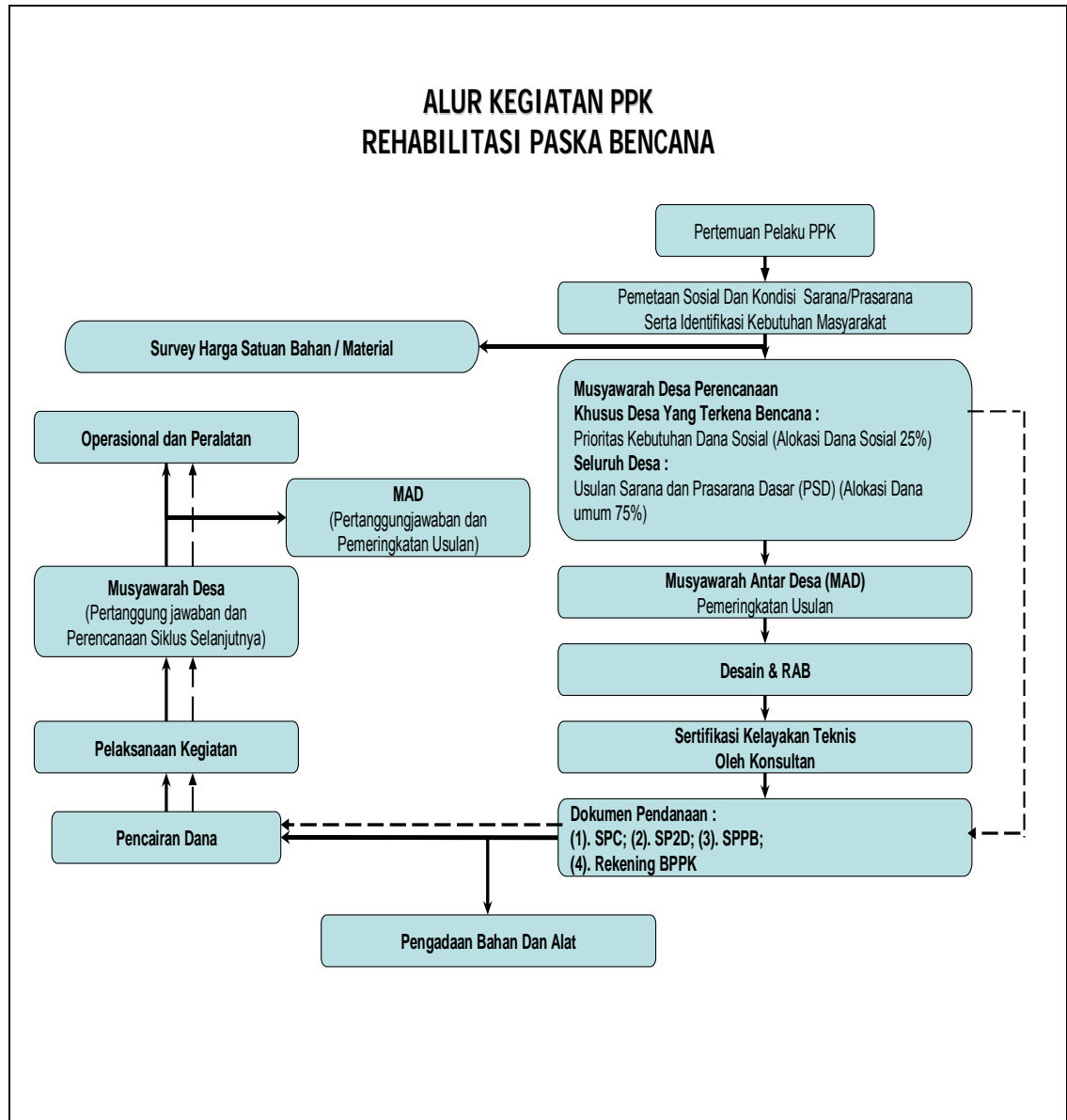
Indikator keberhasilan khusus PPK pasca bencana diukur dari:

- 1) Penyediaan lapangan kerja dan pendapatan warga/orang miskin dalam kegiatan;
- 2) Kehadiran/keterlibatan perempuan dalam setiap tahapan kegiatan;
- 3) Prasarana khusus/terbatas yang akan dibangun/diperbaiki;
- 4) Tingkat/jumlah pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah dibangun/diperbaiki.

Beberapa ketentuan dasar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan PPK Rehabilitasi pasca tsunami menurut (*Petunjuk Pelaksanaan PPK Pola Khusus Pasca tsunami, 2005*) berupa: jenis kegiatan dan alokasi pendanaan, sifat dana dan kegiatan, Dana Operasional Kegiatan (DOK), penjelasan alokasi dana per

kecamatan, pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan; penjelasan alur kegiatan PPK pasca bencana dapat dilihat pada lampiran A.5.

Sementara itu Alur Kegiatan PPK Rehabilitasi Pasca Bencana Tsunami dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut:



Sumber: PTO PPK-Depdagri, 2005

**GAMBAR 3.4
ALUR KEGIATAN PPK REHABILITASI PASKA BENCANA**

Sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab pelaku-pelaku PPK di tingkat kecamatan (Camat, Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK), Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PjAK), Fasilitator Kecamatan (FK), Pendamping Lokal (PL) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)) dan tingkat desa/kelurahan (Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Fasilitator Desa (FD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)) dapat dilihat pada *lampiran A.6*.

3.2.6 Pengelolaan PPK Pasca tsunami Di Kecamatan Lhoknga.

Pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola dana PPK secara mandiri dan partisipatif dengan ikut terlibat dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan kegiatan. Selain itu masyarakat mendapat bantuan pendampingan oleh fasilitator, pembinaan oleh pemerintah dan pembentukan kelembagaan PPK berupa organisasi pengelolaan di tingkat kecamatan dan desa yang anggotanya berasal dari masyarakat setempat, serta adanya pelatihan-pelatihan untuk pelaku utama PPK dan penerima manfaat hasil pembangunan PPK. Pelaku-pelaku PPK yang berasal dari masyarakat terdiri dari Pendamping Lokal (PL) dan pengelola UPK di tingkat kecamatan dan juga Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Fasilitator Desa (FD) dan Tim Pemeliharaan Kegiatan di tingkat desa.

Tahap awal PPK dimulai dengan sosialisasi program kepada masyarakat di Kecamatan Lhoknga. Selanjutnya masyarakat termasuk kaum perempuan dan masyarakat miskin ikut terlibat secara aktif pada tahap perencanaan yang dimulai dengan serangkaian musyawarah Musyawarah Desa (MD) untuk mengidentifikasi

kebutuhan masyarakat pasca tsunami berupa kebutuhan sosial dan sarana prasarana, membuat profil desa serta membuat usulan yang tidak tumpang tindih dengan bantuan pihak lain di luar PPK.

Selanjutnya penentuan sebuah usulan desa dapat terdani atau tidak ditentukan dalam MAD kompetisi pendanaan di tingkat Kecamatan Lhoknga. Wakil masyarakat dari setiap desa mengadakan lobi-lobi dengan masyarakat desa lainnya agar usulan mereka mendapat dukungan suara untuk menduduki peringkat atas.. Desa yang menjadi peringkat pertama mendapat prioritas dalam penghitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB), setelah itu baru dilanjutkan dengan desa peringkat kedua dan seterusnya hingga mencapai angka sejumlah alokasi dana kegiatan fisik/sarana prasarana PPK pasca tsunami untuk Kecamatan Lhoknga. yaitu sebesar Rp. 2.495.409.648,- (*dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah*), dengan ketentuan dana yang terserap untuk satu desa tidak boleh melebihi angka Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

Setelah adanya kejelasan dana dari PPK yang dipadukan dengan swadaya masyarakat baru dilaksanakan MD persiapan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa oleh TPK dan dibantu FD untuk membicarakan persiapan pelaksanaan kegiatan fisik seperti melakukan tender untuk barang/material nilai nominalnya di atas Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*). Yang berhak mengikuti tender adalah anggota masyarakat dari desa yang bersangkutan, sedangkan material untuk pelaksanaan pembangunan diupayakan juga dari sumber daya desa atau kecamatan setempat, tetapi dalam pelaksanaan PPK pasca tsunami material untuk pembangunan gedung atau prasarana jalan dan saluran harus didatangkan dari luar Kecamatan

Lhoknga karena terbatasnya material di Lhoknga akibat banyaknya material yang dibutuhkan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga. Sementara untuk tenaga kerja tetap melibatkan warga desa setempat untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, meskipun kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kecamatan Lhoknga juga telah memberikan peluang kerja bagi masyarakat.

Gambar prasarana jalan dan saluran di Kelurahan Mon Ikeun, pemagaran areal sawah di Lambaro Seubun dan sarana Gedung TPA di Meunasah Karieng yang dibangun melalui PPK pasca tsunami dapat dilihat pada gambar 3.6 berikut:



Sumber: Dokumentasi FK- PPK Kecamatan Lhoknga, 2006

GAMBAR 3.6
PRASARANA JALAN DAN SALURAN DI KELURAHAN MON IKEUN,
PAGAR SAWAH DI DESA LAMBARO SEUBUN DAN
GEDUNG TPA DI DESA MEUNASAH KARIENG

Tahap berikutnya dilakukan MD dan MAD Pertanggungjawaban yang merupakan forum pertemuan masyarakat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana pembangunan oleh TPK bersama pelaku PPK desa lainnya. Untuk pemeliharaan sarana prasarana PPK, dibentuk Tim Pemelihara Kegiatan yang telah dibekali dengan pelatihan.

Adapun jenis kegiatan PPK Rehabilitasi Pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada peta 3 berikut. Sedangkan untuk jenis kegiatan per desa beserta dengan jumlah dana dapat dilihat pada lampiran A.7.

3.3. Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga.

Kejadian tsunami yang melanda Kecamatan Lhoknga telah menimbulkan banyak permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat seperti kerusakan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian, kerusakan sarana prasarana baik milik pribadi maupun umum, terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat, dan kondisi masyarakat tercerai berai di berbagai tempat pengungsian atau di lokasi luar desa yang dinilai aman atau tidak terkena bencana serta penduduk yang berduka dan mengalami trauma pasca bencana.

Kondisi masyarakat di Kecamatan Lhoknga pasca tsunami hampir semuanya dalam kondisi memerlukan bantuan dari pihak lain, yang mengakibatkan tingkat keswadayaan masyarakat pasca tsunami berkurang. Demikian juga dengan kebiasaan NGO yang memberikan upah kepada setiap pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat baik kegiatan untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan pribadi masyarakat itu sendiri menyebabkan jiwa gotong royong masyarakat berkurang karena ada pergeseran pola pikir masyarakat terhadap gotong royong. Selain itu ada juga sebagian masyarakat yang tidak mau bekerja karena selalu berharap pada bantuan dari pihak lain seperti bantuan sembako, fasilitas layanan kesehatan gratis, pembangunan rumah, dan bantuan lainnya. Kondisi ketergantungan masyarakat kepada pihak luar yang tidak diimbangi dengan upaya pemberdayaan masyarakat akan menghambat proses pemulihan kondisi masyarakat pasca tsunami.

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi Kecamatan Lhoknga memerlukan peran serta semua pihak namun kemampuan/keahlian masyarakat untuk ikut terlibat

dalam pengelolaan pembangunan partisipatif masih rendah, pengetahuan masyarakat tentang perencanaan pembangunan yang masih kurang, ditambah lagi dengan lemahnya kemampuan masyarakat untuk mengorganisir diri akibat hilangnya tokoh-tokoh masyarakat pada saat tsunami.

Pengelolaan PPK pasca tsunami diharapkan akan meningkatkan kondisi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dengan adanya bantuan dana yang dikelola masyarakat untuk membangun sarana prasarana penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta diikuti dengan pembinaan, pelatihan dan pendampingan dalam setiap tahapan pengelolaan PPK terutama perencanaan pembangunan partisipatif.

Berdasarkan laporan Konsultan Manajemen Kabupaten Aceh Besar, pelaksanaan PPK di Kecamatan Lhoknga cenderung lebih berhasil dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang juga dilanda tsunami, dilihat dari segi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan PPK terutama keterlibatan kaum perempuan. Meskipun kondisi pemukiman dan kehidupan masyarakat belum begitu stabil dimana lebih dari 50 % penduduk Kecamatan Lhoknga pasca tsunami menjadi pengungsi, namun tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan PPK dinilai cukup tinggi.

Sedangkan kemampuan masyarakat untuk memelihara sarana prasarana yang telah dibangun masih kurang, prasarana jalan dan saluran yang dibangun melalui PPK di beberapa desa dalam Kecamatan Lhoknga yang menjadi rusak kembali setelah dilalui oleh truk-truk pengangkut pasir/material bangunan yang sering melewati jalan tersebut untuk memasok kebutuhan material kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca tsunami belum diperbaiki. (*Keterangan PjOK Kecamatan Lhoknga, 2006*).

BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN PPK PASCA TSUNAMI
DI KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR

4.1 Analisis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PPK Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga

4.1.1 Peran Pemerintah dalam PPK Pasca tsunami

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar merupakan program pemerintah pusat dalam rangka rekonstruksi sosio kultural masyarakat di daerah bencana berupa stimulan dana untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengorganisir kembali masyarakat yang tecerai berai dan penyediaan sarana prasarana dasar.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam PPK telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan program yang disusun di tingkat pusat. Kebijakan tersebut dimunculkan dalam rangka meningkatkan keterpaduan semua program dan proyek "masuk desa", memberikan stimulan dana bagi penyediaan infrastruktur dan modal usaha ekonomi produktif, mendorong iklim dan memancing keswadayaan masyarakat, memberi peluang, menumbuhkan harga diri dan percaya diri di kalangan masyarakat serta sebagai proses edukasi bagi masyarakat melalui partisipasi dalam pembangunan sehingga masyarakat tahu, mau dan mampu membangun dirinya berdasarkan keswadayaan dan kemandirian.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mendukung kelancaran pelaksanaan PPK pasca tsunami dengan membentuk Tim Koordinasi PPK Kabupaten (TK-PPK Kab) yang terdiri dari beberapa instansi yang terkait dengan

pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana pedesaan di Kabupaten Aceh Besar yang berfungsi mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang ada dalam PPK. Ketua Sekretariat TK-PPK Kabupaten Aceh Besar yang berkedudukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Besar menyatakan:

”Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan program Pemerintah Pusat sehingga kebijakan pemberdayaan masyarakat mengikuti aturan dari tingkat Pusat. Pada tingkat Kabupaten Aceh Besar dibentuk Tim Koordinasi PPK Kabupaten Aceh Besar terdiri dari beberapa Instansi yaitu BPM, Bappeda, Dinas Kimpraswil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Bagian Keuangan Setdakab Aceh Besar. Tim Koordinasi Kabupaten Aceh Besar berfungsi sesuai dengan tugasnya yaitu melakukan koordinasi, monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan pembinaan terhadap pelaku PPK di lapangan serta penyelesaian permasalahan PPK pasca tsunami di Kabupaten Aceh Besar.” (Lampiran B.1.1 No. 1&2).

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga menyediakan dana Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) untuk pelaksanaan sosialisasi PPK di Kabupaten yang diikuti oleh para pelaku PPK dari tingkat kabupaten dan kecamatan, pelaksanaan pelatihan UPK dan Tim Pemeliharaan Kegiatan PPK di desa, pemberian dana insentif bagi pelaku PPK dari unsur pemerintah di tingkat kecamatan dan biaya operasional pembinaan TK-PPK Kabupaten Aceh Besar dalam rangka konsultasi ke tingkat provinsi, melakukan koordinasi, monitoring dan pembinaan pelaksanaan PPK serta penyelesaian masalah dalam pengelolaan PPK di Kabupaten Aceh Besar.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap PPK pasca tsunami seperti dijelaskan di atas merupakan upaya pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi bagi masyarakat untuk dapat melaksanakan seluruh tahapan program mulai dari sosialisasi sampai dengan pelestarian kegiatan. Namun monitoring dan pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam

pengelolaan PPK yang dilakukan oleh TK-PPK pasca tsunami di Kabupaten Aceh Besar belum menjangkau semua desa dalam Kabupaten Aceh Besar yang berjumlah 601 desa dan tersebar dalam 22 kecamatan. Kunjungan TK-PPK Kabupaten Aceh Besar lebih terfokus pada tingkat kecamatan. Selain itu pelembagaan pengelolaan pembangunan daerah partisipatif seperti yang diharapkan oleh PPK juga belum direalisasikan di Kabupaten Aceh Besar.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan (Camat, PjOK dan PjAK) Lhoknga dalam pengelolaan PPK antara lain memberikan arahan pada acara sosialisasi PPK pasca tsunami di wilayahnya, menyediakan fasilitas berupa ruangan berserta kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Musyawarah Antar Desa (MAD) dan melayani urusan administratif. Namun keterlibatan aparat pemerintah Kecamatan Lhoknga dalam pengelolaan PPK pasca tsunami dalam memantau pelaksanaan musyawarah di desa, mengawasi pelaksanaan pembangunan dan mengontrol proses pemeliharaan sarana prasarana yang telah dibangun belum maksimal. Camat atau PjOK kurang berinisiatif untuk melaksanakan acara-acara PPK. Seperti pernyataan PjOK Kecamatan Lhoknga:

"Peran pelaku PPK dari unsur pemerintah di tingkat kecamatan (Camat, PjOK dan PjAK) dan keterlibatannya dalam kegiatan PPK sangat kurang jika dilihat dari segi pengambilan keputusan dan kebijakan terkait pengelolaan PPK karena semua yang dilakukan mengikuti ketentuan program yang lebih menonjolkan peran konsultan dan pelaku-pelaku PPK dari unsur masyarakat. Keterlibatan Camat dan PjOK dalam acara musyawarah seperti MD dan MAD dengan menghadiri undangan pada acara PPK dan memberikan arahan atau kata-kata sambutan sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Dan dapat dikatakan keterlibatan pelaku PPK dari unsur pemerintah bukan atas inisiatif sendiri tetapi hanya mengikuti alur PPK yang ditetapkan dari program."(Lampiran B.2.1 No. 2 & 3)

Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa (Kasi PMD) Kecamatan Lhoknga yang ditunjuk sebagai PjOK PPK pasca tsunami juga belum intensif dalam

mendampingi masyarakat karena beban tugas Kasi PMD yang tinggi dan kurangnya fasilitas yang mendukung kinerja Kasi PMD.

Sedangkan peran pemerintah di tingkat Kelurahan (Lurah) dan Desa (Kepala Desa) atau di Aceh dikenal dengan sebutan "*Keuchiek*" dalam memberdayakan masyarakat melalui PPK pasca tsunami diwujudkan dengan ikut memberikan penjelasan tentang PPK kepada masyarakat, mengadakan rapat/musyawarah pembangunan desa dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan PPK. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Lurah Mon Ikeun : "*Peran Lurah dalam PPK sebagai koordinator dan pembina PPK dengan memberikan dukungan bagi pelaksanaan musyawarah dan ikut mengecek kegiatan di lapangan sebelum menanda tangani laporan dari pelaku-pelaku PPK.*" (Lampiran B.3.1 No.4) dan juga pernyataan Kepala Desa Lambaro Seibun: "*Peran Kepala Desa dalam PPK sebagai pembina diwujudkan dengan mengontrol pelaksanaan PPK di Desa Lambaro Seibun, dimana jika ada masyarakat kurang memahami PPK maka diberikan penjelasan.*" (Lampiran B.3.3 No.1)

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menekankan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Namun pemerintah dapat melaksanakan kontrol melalui berbagai manipulasi, pemerintah membuka kesempatan luas terhadap keterlibatan masyarakat, hingga pada akhirnya masyarakat yang mengelola dan pemerintah berfungsi sebagai lembaga kontrol. Hal itu telah terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah melalui PPK pasca tsunami untuk memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat.

Upaya pemberdayaan masyarakat di pedesaan masih memerlukan campur tangan dari pemerintah terutama dari segi penyediaan dana stimulan, hal ini dapat

diwujudkan dalam berbagai langkah nyata antara lain dengan pengalokasian program/proyek/kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan. Selain itu keseriusan aparat pemerintah dalam mendukung pengembangan peran serta masyarakat dalam pembangunan juga harus lebih ditingkatkan, untuk itu unsur dari pemerintah yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat harus berdaya baik dari segi kemampuan maupun fasilitas penunjang.

4.1.2 Peran Konsultan PPK sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

Selain dari unsur pemerintah dalam struktur manajemen PPK yang menjadi pelaku PPK juga ada pihak konsultan mulai dari tingkat nasional sampai kecamatan. Pihak konsultan tersebut merupakan NGO's atau LSM yang bermitra dengan pemerintah dalam melaksanakan PPK. Menurut pendapat Prijono (1996:98) kegiatan dari NGOs adalah: suatu kegiatan yang berkaitan dengan proses dan dampak pembangunan, pengembangan, perubahan sosial, dan pemberdayaan masyarakat .

Pihak konsultan PPK di tingkat kecamatan berfungsi sebagai Fasilitator Kecamatan (FK) yang berhubungan langsung dengan pelaku PPK lain di wilayah kecamatan yang bersangkutan. FK Kecamatan Lhoknga berperan dalam menyebarkan informasi tentang adanya PPK pasca tsunami melalui sosialisasi PPK kepada unsur pemerintah di kecamatan dan masyarakat di desa-desa. Selain itu FK juga memiliki hubungan konsultasi dan koordinasi dengan Tim Koordinasi PPK Kabupaten Aceh Besar dan Konsultan Manajemen Kabupaten Aceh Besar.

Dengan kondisi wilayah Kecamatan Lhoknga yang terkena tsunami, FK di Kecamatan Lhoknga yang terdiri dari FK pemberdayaan dan FK Teknis harus

bekerja ekstra menginventarisasi kerusakan sarana prasarana serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Lhoknga serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembangunan kembali wilayah Kecamatan Lhoknga pasca tsunami.

FK Lhoknga juga melakukan pendampingan bagi masyarakat pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa (MD) guna memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam mengidentifikasi permasalahan, menggali gagasan dan usulan kegiatan pembangunan dari tiap-tiap desa yang akan diajukan ke Musyawarah Antar Desa (MAD) di tingkat kecamatan.

Selain itu FK juga melaksanakan pelatihan bagi pelaku PPK dari unsur masyarakat. Sedangkan untuk pendampingan/fasilitasi masyarakat yang dilakukan oleh FK Lhoknga difokuskan kepada pelaku-pelaku PPK yang memerlukan pembinaan dan bimbingan intensif. FK juga memantau setiap tahapan pelaksanaan PPK dan mengadakan rapat evaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana desa dan mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan.

Peran FK dalam memantau dan mendampingi masyarakat pada setiap tahapan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga telah berjalan intensif. Hal ini didukung oleh sistem perekrutan personil yang menjadi FK PPK dilakukan dengan seleksi yang ketat dan penugasan dilakukan dengan sistem kontrak dimana setiap saat kinerjanya dipantau, jika ada yang melanggar aturan segera diberikan sanksi (*punishment*) dan bagi FK yang berprestasi mendapat *reward* seperti promosi untuk

menjadi KM Kabupaten. Hal ini seperti diungkapkan oleh PjOK Kecamatan Lhoknga berikut:

”Hal lain yang mendukung keberhasilan PPK adalah penempatan pihak konsultan yang bertugas khusus untuk mengelola PPK dengan gaji yang relatif tinggi, reward dan punishment yang jelas, kontrol dan pengawasan yang ketat; sedangkan untuk pihak aparat pemerintah di tingkat kecamatan upaya pemberdayaan masyarakat kurang intensif dilakukan karena beban kerja yang tinggi, gaji yang kecil serta reward dan punishment kurang berjalan sehingga kurang dalam hal mendampingi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat.” (Lampiran B.2.1 No.9)

Menurut Midgley (1986:30-31) fasilitator memiliki peran penting dalam memunculkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memperbaiki taraf hidupnya. Fasilitator perlu mengarahkan masyarakat untuk menyadari situasi kehidupan mereka serta memahami penyebab dan alternatif pemecahan situasi tersebut. Selain itu fasilitator memiliki peran pula sebagai *motivator* dan *community organizers*.

Peran FK Lhoknga telah mengarah kepada upaya memotivasi, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat tentang pengelolaan pembangunan partisipatif khususnya PPK pasca tsunami melalui sosialisasi, pelatihan dan bimbingan bagi masyarakat di Kecamatan Lhoknga. Selain itu FK juga melakukan upaya pengawasan dan pengontrolan yang cukup ketat sehingga lebih menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam PPK pasca tsunami.

4.1.3 Peran Masyarakat dalam Pengelolaan PPK Pasca Tsunami.

PPK merupakan program pembangunan yang menerapkan konsep pembangunan partisipatif, yaitu pola pembangunan yang melibatkan berbagai pelaku pembangunan yang berkepentingan (sektor pemerintah, konsultan dan masyarakat yang akan langsung menikmati/terkena akibat pembangunan) dalam

suatu proses kemitraan dengan menerapkan konsep partisipasi, dimana kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek pembangunan dan sekaligus sebagai obyek dalam menikmati hasil pembangunan.

Partisipasi masyarakat menurut PPB (United Nations dalam Midgley, 1986) adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat secara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan dan berbagi hasil pembangunan secara adil. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami berada dalam lingkup desa dan kecamatan. Di tingkat kecamatan dibentuk Pendamping Lokal (PL) dan Tim Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Sementara itu di tingkat desa ada Fasilitator Desa (FD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim pemelihara kegiatan dan wakil-wakil dari masyarakat yang ikut MAD. Semua personilnya berasal dari pihak masyarakat.

PL Kecamatan Lhoknga dipilih dari salah seorang FD oleh wakil-wakil masyarakat desa di Kecamatan Lhoknga, jadi PL merupakan unsur masyarakat yang dipersiapkan untuk dapat memfasilitasi masyarakat seperti yang diamanatkan oleh FK dari pihak konsultan. PL bertugas membantu FK untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan PPK mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian, mengikuti pelatihan, melaksanakan pemeriksaan kegiatan di lapangan, dan membimbing/menginventarisasi kebutuhan masyarakat dalam kaitannya dengan rencana jangka panjang masyarakat. Dengan adanya penunjukan PL berarti telah ada upaya PPK untuk memberdayakan masyarakat secara bertahap sehingga dapat mandiri dalam mengelola setiap tahapan pembangunan.

Personil UPK Lhoknga dipilih oleh wakil-wakil masyarakat desa yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Camat Lhoknga. Sebelum melaksanakan

tugas UPK mendapatkan pelatihan tentang tata cara mengelola dana seperti pembukuan dan administrasi keuangan lainnya. UPK harus menyebarluaskan informasi tentang pengelolaan dana PPK di Kecamatan Lhoknga secara berkala dengan menempelkan pada papan informasi UPK serta memelihara papan informasi tersebut. Adanya lembaga UPK tersebut memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat untuk dapat mengelola dana pembangunan dalam lingkup Kecamatan dan mempererat hubungan masyarakat antar desa dalam Kecamatan Lhoknga.

Dana PPK yang dikoordinir oleh UPK Kecamatan Lhoknga selanjutnya diteruskan kepada TPK masing-masing desa. UPK bersama dengan FK dan PjOK memfasilitasi dan memberikan bimbingan administrasi keuangan kepada desa-desa di wilayahnya terutama kepada TPK, serta mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan antar desa. Selain itu UPK juga ikut serta mensosialisasikan PPK dan turut menjaga berlangsungnya proses PPK sesuai prinsip dan azasnya. Ketua UPK Kecamatan Lhoknga menyatakan:

“Pembinaan yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Lhoknga lebih banyak terkait dengan TPK seperti sistem pelaporan, akuntansi dan pembukuan. Sedangkan pembinaan kepada masyarakat secara umum dilakukan jika ada permintaan dari masyarakat untuk memperoleh kejelasan tentang aturan yang berlaku dalam PPK dan menghindari intervensi dari tokoh tokoh masyarakat. (Lampiran B.2.3 No.6)

Lembaga UPK diharapkan akan menjadi lembaga keuangan di tingkat kecamatan yang dapat mengembangkan usaha ekonomi bergulir dan mengidentifikasi potensi kemungkinan pengembangan hubungan dengan pihak luar, seperti pemasaran, bantuan manajemen dan sejenisnya. Namun keberadaan UPK Kecamatan Lhoknga belum menangani kegiatan yang bersifat modal usaha bergulir karena jenis kegiatan yang terdani pasca tsunami semuanya kegiatan pengadaan

sarana prasarana. Hal ini seperti ditegaskan oleh Ketua Sekretariat Tim Koordinasi PPK Kabupaten Aceh Besar:

” Keberadaan UPK sebagai lembaga pengelola kegiatan di tingkat kecamatan diharapkan tetap dilestarikan dengan cara mengembangkan kegiatan PPK kearah Usaha Ekonomi Produktif sehingga UPK tetap berjalan dan bisa menggulirkan dana kepada kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif yang ada di desa, namun untuk Kecamatan Lhoknga Pasca tsunami jenis kegiatan yang dilaksanakan lebih difokuskan pada penyediaan sarana prasarana.” (Lampiran B.1.1 No.6)

Sementara itu pemilihan FD dan TPK dilakukan pada saat MD sosialisasi, personilnya dipilih dari warga masyarakat dari desa yang bersangkutan. Sebagai langkah penyiapan bagi para pelaku PPK sebelum melaksanakan tugasnya dibekali dengan pelatihan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan dengan materi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi pelaku tersebut. Untuk FD diberikan materi tata cara fasilitasi masyarakat dan hasil yang diharapkan FD mampu mensosialisasikan program dan memfasilitasi warga masyarakat. Sedangkan untuk TPK diberikan materi yang berhubungan dengan manajemen dan teknis pelaksanaan pembangunan. Ketua TPK Mon Ikeun menyatakan:

” Dalam pengelolaan PPK di Kecamatan Lhoknga kepada pelaku-pelaku PPK di desa/kelurahan (FD, TPK dan Tim Pemeliharaan Kegiatan) sebelum melaksanakan tugas mendapat pelatihan dari petugas yang ada di Kecamatan. TPK mendapatkan materi cara membuat Gambar, Desain dan RAB kegiatan sarana prasarana dasar lingkungan. Selain itu juga ada pendampingan bagi masyarakat oleh FK dalam melaksanakan seluruh tahapan PPK.” (Lampiran B.3.4 No.3)

Dengan adanya pelatihan bagi pelaku PPK, kapasitas (pengetahuan dan ketrampilan/keahlian) masyarakat dalam mengelola pembangunan menjadi meningkat sehingga masyarakat menjadi lebih mampu berperan dalam pembangunan.

Fasilitator Desa yang terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan tiap desa berperan sebagai pendamping masyarakat yang memandu jalannya musyawarah di

desa, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. FD juga memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk proses penggalan gagasan, seperti data kelompok masyarakat yang ada di desa, data penduduk miskin dan data pendukung lainnya serta menyebarluaskan dan mensosialisasikan PPK kepada masyarakat desa. Mekanisme PPK yang menetapkan persyaratan ada keterlibatan perempuan dalam semua tahapan kegiatan PPK telah dilaksanakan di Kecamatan Lhoknga.

Pelaksanaan musyawarah perencanaan di Desa Meunasah Karieng berlangsung 3 kali dan dipandu oleh FD sedangkan FK dan PL hanya memantau. Masyarakat Meunasah Karieng telah memanfaatkan kesempatan dengan ikut hadir dan aktif memberikan ide dalam merumuskan usulan kegiatan pembangunan yang mewakili aspirasi masing-masing dusun. FD Meunasah Karieng menyatakan:

”Kegiatan musyawarah perencanaan PPK di desa Meunasah Karieng berlangsung 3 kali, yang dipandu oleh FD dan dipantau oleh FK dan PL. Musyawarah dilaksanakan pada waktu sore dan malam hari yang dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk juga kaum perempuan. Jenis usulan yang diusulkan oleh masyarakat tidak terbatas hanya pada pembangunan sarana prasarana tetapi juga usulan ekonomi produktif seperti: kursus menjahit, bantuan modal untuk pengrajin kue khas Aceh yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga. Namun setelah melalui musyawarah disepakati pembangunan gedung TPA menjadi prioritas usulan dari desa Meunasah Karieng yang berfungsi sebagai tempat belajar agama atau pengajian bagi anak-anak di desa Meunasah Karieng.” (Lampiran B.3.6 No.2)

Musyawarah perencanaan juga dilakukan masyarakat Kelurahan Mon Ikeun, meskipun pada saat itu masih berada di posko pengungsian tetapi tetap hadir untuk bermusyawarah dalam menentukan jenis usulan kegiatan yang menjadi prioritas dari Kelurahan mereka. Seperti pernyataan Ketua TPK Mon Ikeun berikut:

” Musyawarah di Kelurahan Mon Ikeun dalam rangka pelaksanaan PPK pasca tsunami dilaksanakan di posko pengungsian, warga masyarakat yang hadir

jumlahnya mencapai sepertiga dari jumlah warga dan kehadiran perempuan lebih banyak dari warga yang laki-laki. Pada musyawarah tersebut disepakati usulan yang menjadi prioritas berupa pembuatan saluran, jalan rabat beton, pengerasan jalan dan talud. (Lampiran B.3.2 No.1)

Demikian juga untuk Desa Lambaro Seibun dan usulan yang menjadi prioritas adalah kegiatan pemagaran areal sawah. Meskipun jumlah warga yang hadir jumlahnya sedikit namun musyawarah perencanaan telah menghasilkan usulan yang akan diajukan ke MAD di tingkat Kecamatan Lhoknga. Ketua TPK Lambaro Seibun menyatakan:

” Dalam proses musyawarah perencanaan, seluruh lapisan masyarakat termasuk kaum perempuan diundang dalam musyawarah, kondisi pada saat itu masyarakat masih tinggal di tenda dan barak sehingga jumlah masyarakat yang hadir agak kurang. Namun penggalan gagasan dari masyarakat dibagi berdasarkan dusun, jadi masyarakat bermusyawarah dalam kelompok masing-masing dusun untuk selanjutnya diajukan dalam musyawarah desa. Dari berbagai usulan yang muncul akhirnya disepakati bahwa pemagaran areal sawah ditetapkan menjadi prioritas usulan desa yang akan diajukan ke MAD di tingkat kecamatan. Sedangkan usulan berupa pengadaan teratak milik desa telah dipenuhi dengan adanya Dana Pembangunan Desa dari Kabupaten Aceh Besar.” (Lampiran B.3.4 No.1)

Masyarakat dari masing-masing desa harus membuat usulan pembangunan dan berkompetisi untuk memperoleh dana dari PPK karena jumlah alokasi dana yang telah ditetapkan oleh program PPK pasca tsunami hanya secara global untuk satu kecamatan. Kejelasan bisa atau tidaknya mendapatkan alokasi dana untuk suatu usulan desa yang diajukan diperoleh setelah melalui proses kompetisi pendanaan dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD) pada tingkat kecamatan dengan sistem perangkaan skala prioritas. Desa yang mendapat peringkat atas mendapat prioritas untuk mendapatkan alokasi dana yang besarnya jumlah dana sesuai dengan perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB). Wakil masyarakat dari setiap desa juga harus mengadakan lobi-lobi dengan masyarakat desa lainnya agar usulan mereka mendapat dukungan suara untuk menduduki peringkat atas.

Sistem kompetisi pendanaan tersebut mendorong masyarakat untuk mengusulkan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat karena dana yang tersedia diperebutkan oleh semua desa dalam Kecamatan Lhoknga dan dibutuhkan wakil-wakil masyarakat yang dapat diandalkan agar dapat bersaing secara fair dengan desa lainnya.

Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh TPK dalam melaksanakan pembangunan fisik sarana prasarana, berupa pelibatan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja sehingga masyarakat mendapat keuntungan ganda yaitu masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan berupa insentif tenaga kerja dan terbangunnya sarana prasarana yang sangat mereka butuhkan. Masyarakat desa juga berhak mengikuti tender pengadaan barang/material untuk pelaksanaan pembangunan yang diupayakan dari sumber daya desa atau kecamatan setempat, tetapi dalam pelaksanaan PPK pasca tsunami, material untuk pembangunan gedung atau prasarana jalan dan saluran harus didatangkan dari luar Kecamatan Lhoknga karena material yang ada di Lhoknga tidak mencukupi untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga.

Pelaksanaan pembangunan melalui PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga ikut ditunjang oleh swadaya masyarakat. Pada waktu pelaksanaan PPK pasca tsunami saat itu masih agak gampang mengajak masyarakat Kelurahan Mon Ikeun untuk memberikan swadaya karena kegiatan pembangunan jalan dan saluran melalui PPK sangat dibutuhkan oleh masyarakat Mon Ikeun. Swadaya dari masyarakat tersebut berupa pemberian lahan dan sumbangan tenaga. Ketua TPK Mon Ikeun menyatakan:

” Swadaya masyarakat dalam PPK pasca tsunami di Mon Ikeun berupa pemberian lahan yang terkena pembangunan jalan dan saluran dan juga sumbangan tenaga. Masyarakat merasa sangat membutuhkan pembangunan jalan untuk memudahkan akses ke rumah mereka dan kepentingan umum lainnya. Dengan kegiatan PPK jalan yang telah ada diperlebar, dan lorong yang semula hanya 80 cm menjadi 3 meter sehingga bisa dilewati kendaraan roda 4 dengan panjang jalan mencapai 900 m. Pada saat pembangunan jalan dan saluran belum ada rumah sehingga agak mudah untuk mengajak masyarakat memberikan swadaya berupa lahan.”(Lampiran B.3.2 No.4)

Sedangkan untuk Desa Lambaro Seibun agak sulit meminta swadaya masyarakat karena kondisi pasca tsunami masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari pihak lain. Seperti diungkapkan oleh Ketua TPK Lambaro Seibun:

” Pasca tsunami agak sulit untuk meminta swadaya dari masyarakat karena kondisi masyarakat hampir semuanya dalam kondisi memerlukan bantuan dari pihak lain, dan ditambah lagi dengan kebiasaan NGO yang memberikan upah kepada setiap pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat baik kegiatan kepentingan umum maupun kegiatan untuk kepentingan pribadi dari masyarakat sehingga gotong royong murni sulit untuk diwujudkan. Namun ada juga yang menjadi kontribusi masyarakat dalam pembangunan pagar sawah di Lambaro Seibun yaitu berupa tenaga kerja karena dalam PPK insentif yang mereka terima lebih murah dibandingkan apabila mereka bekerja pada poyek BRR atau NGO.” (Lampiran B.3.4 No.3)

Sementara itu untuk pembangunan gedung Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) di Desa Meunasah Karieng, swadaya yang berasal dari masyarakat berupa penyediaan lahan dan masyarakat mau terlibat dalam musyawarah PPK di desa dan di tingkat Kecamatan Lhoknga. Kendala dalam pembangunan sarana prasarana di Desa Meunasah Karieng adalah kurangnya tenaga terampil dalam hal konstruksi.

Dalam pelaksanaan PPK dituntut adanya transparansi terhadap pengelolaan dana dan pelaksanaan pembangunan, sehingga pelaku PPK mengadakan pertanggung jawaban penggunaan dana kepada masyarakat melalui forum Musyawarah Desa dan forum Musyawarah Antar Desa di tingkat Kecamatan Lhoknga. Adanya pertanggungjawaban di tingkat kecamatan memberikan nilai

tambah bagi pengontrolan pelaksanaan PPK karena masyarakat dari desa lain juga dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan PPK di setiap desa dalam Kecamatan Lhoknga. Selama dalam proses pelaksanaan pembangunan, informasi tentang pembangunan sarana prasarana disebarluaskan kepada masyarakat melalui papan informasi PPK yang ada pada setiap desa atau kelurahan. Di Desa Lambaro Seibun, pihak masyarakat bertindak pro-aktif meminta TPK untuk membuat laporan pertanggungjawaban karena dalam tahap pelaksanaan warga masyarakat merasa kurang mendapat informasi tentang pembangunan pagar areal persawahan di desa mereka.

Peran serta masyarakat dalam pemeliharaan sarana prasarana PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga masih kurang, kecuali jika prasarana itu berhubungan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Seperti pernyataan FK Lhoknga berikut:

” Untuk pemeliharaan kegiatan PPK di Kecamatan Lhoknga pasca tsunami belum bisa banyak diharapkan meskipun telah dibentuk Tim Pemeliharaan, kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan bangunan masih sangat kurang kecuali sarana prasarana yang dibangun berhubungan langsung dengan objek pendapatan/perekonomian seperti jalan menuju galian C atau saluran irigasi maka masyarakat punya inisiatif untuk merawatnya, misalnya mengutip iuran atau bergotong royong.” (Lampiran B.2.2 No. 15)

Tim pemeliharaan Gedung TPA di Desa Meunasah Karieng yang telah terbentuk belum berfungsi karena gedung TPA yang digunakan untuk tempat pengajian anak-anak tersebut, kondisinya masih baik dan dirawat oleh pengurus keagamaan. Sedangkan untuk pemeliharaan pagar sawah di Desa Lambaro Seibun diserahkan kepada pemilik sawah agar saling menjaga dan kondisi saat ini ada sebagian pagar yang rusak dan belum diperbaiki. Sementara itu kondisi jalan dan saluran di Kelurahan Mon Ikeun juga ada yang rusak akibat dilewati truk yang

membawa material untuk pembangunan rumah warga masyarakat dan untuk saat ini rekonstruksi belum selesai sehingga perbaikan belum dilaksanakan dan akan diusahakan setelah kondisi normal yaitu setelah masyarakat menempati rumah yang dibangun untuk mereka.

Keunggulan dari PPK menurut Ketua Sekretariat TK-PPK Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat dari segi pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan dan pelaku-pelaku PPK mendapat pelatihan dan bimbingan untuk peningkatan kemampuannya dan langsung mempraktekkan di lapangan sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Selain itu menurut FK Lhoknga, kelebihan dari PPK pasca tsunami yang dapat dirasakan misalnya dalam pengusulan kegiatan sarana prasarana tidak didominasi oleh elit-elit politik atau pimpinan desa tetapi murni dari usulan masyarakat desa sendiri bukan hanya kepentingan suatu kelompok. Menurut Lurah Mon Ikeun keunggulan PPK sebagai berikut: *"Keunggulan dari PPK, masyarakat menjadi sangat terbantu karena ada dana yang jelas, pelaku-pelaku PPK dipilih oleh masyarakat dan mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan, dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan masyarakat dan adanya pertanggungjawaban yang lengkap."* (Lampiran B.3.1 No.7). Pendapat lainnya dari Kepala Desa Meunasah Karieng menyatakan keunggulan PPK dapat dilihat dari adanya pemberdayaan masyarakat dalam hal meningkatkan kemampuan masyarakat. Beliau menyatakan:

"Keunggulan PPK dapat dilihat dari adanya pemberdayaan masyarakat dalam hal meningkatkan kemampuan masyarakat tentang tata cara perencanaan pembangunan, memfasilitasi masyarakat untuk penggalan aspirasi, pelibatan masyarakat untuk belajar dan adanya kejelasan dana bagi kegiatan pembangunan di desa. Dimana dengan ikut terlibat dalam PPK masyarakat dapat belajar bersama-sama orang lain, melihat bagaimana orang lain bekerja dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. PPK dapat menggugah kembali

nilai-nilai yang ada di masyarakat dan meningkatkan wawasan masyarakat namun butuh proses, tidak terlihat secara langsung. Yang dapat terlihat langsung hanya output yang berupa bangunan fisik.” (Lampiran B.3.5 No.4)

Masyarakat juga mendapatkan kesempatan untuk memantau/mengawasi pelaksanaan PPK pasca tsunami di daerahnya, namun pemantauan terhadap pembangunan sarana prasarana fisik oleh masyarakat kurang maksimal terkendala dengan pengetahuan teknis masyarakat yang belum memadai. Tugas pemantauan ini juga dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang melakukan pengawasan setiap tahapan PPK mulai dari memantau proses sosialisasi dan penggalan gagasan di wilayahnya, memantau proses musyawarah di desa dan kecamatan serta memantau proses pemeliharaan sarana prasarana.

Menurut Panudju (1996) partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan. Di dalam pengelolaan PPK di Kecamatan Lhoknga masyarakat telah terlibat dalam setiap tahapan dengan didampingi oleh fasilitator dan mendapatkan tambahan pengetahuan melalui pelatihan dan bimbingan sehingga pengambilan keputusan pembangunan berdasarkan kesepakatan masyarakat. Namun keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan belum optimal, kondisi pasca tsunami mengakibatkan beberapa aktivitas masyarakat terganggu terutama untuk pemeliharaan jalan dan saluran di Kelurahan Mon Ikeun belum dilaksanakan karena kondisi pemukiman belum pulih. Begitu juga dengan peran FD dan TPK, mereka belum dapat mandiri melaksanakan tugasnya, masih memerlukan banyak arahan dan bimbingan dari FK.

Pemberdayaan masyarakat melalui PPK pasca tsunami yang ditetapkan dalam konteks *spasial* lingkup kecamatan, telah memberikan kewenangan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengampilan keputusan pembangunan dalam lingkup kecamatan sehingga masyarakat menjadi lebih terbuka wawasan terhadap pengelolaan pembangunan, dapat menjalin kerjasama antar desa dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana PPK menjadi lebih terkontrol.

Secara ringkas, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut:

TABEL IV.1
RANGKUMAN PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PADA PENGELOLAAN PPK PASCA TSUNAMI DI
KECAMATAN LHOKNGA

No	Jenis kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PPK		
		Pemerintah	Konsultan PPK	Masyarakat
1	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Dana pembangunan dan operasional disediakan oleh Pemerintah Pusat. - Dana pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Mengelola dana secara transparan dan menyiapkan administrasi pencairan dana dan pertanggung jawaban.
2	Organisasi pengelola PPK	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun mekanisme dan kejelasan fungsi <i>stakeholders</i>. - Pembentukan Tim Koordinasi PPK Kabupaten Aceh Besar yang terdiri dari beberapa instansi terkait. - Pembentukan Tim pengendali PPK Kecamatan (Camat, PjOK dan PjAK). - Penetapan Lurah/Kepala Desa sbg pembina PPK. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berfungsi sebagai fasilitator bagi masyarakat. - Mengadakan pelatihan dan melatih pengelola PPK yang terdiri dari unsur masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi pengurus organisasi pengelola PPK pasca tsunami di tingkat kecamatan dan desa. - Mengikuti pelatihan yang diadakan di tingkat kecamatan.

3	Sosialisasi program	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan pertemuan bagi <i>stakeholders</i> PPK utk menginformasikan kebijakan PPK secara bertahap dari tingkat pusat sampai ke desa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti sosialisasi PPK dan bertugas mensosialisasikan kepada pelaku PPK lainnya serta masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti sosialisasi PPK dan menyebarluaskan informasi PPK kepada masyarakat lainnya.
4	Forum musyawarah bagi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat kebijakan pentingnya pelaksanaan musyawarah dalam pengelolaan PPK pasca tsunami. - Memantau jalannya musyawarah PPK di kecamatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah. - Memastikan adanya keterlibatan kaum perempuan dan orang miskin. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat hadir dalam forum musyawarah pembangunan dan ikut memberikan gagasan/ aspirasi dalam proses identifikasi permasalahan, menyusun profil desa, menyusun rencana pembangunan desa, membuat usulan kegiatan pembangunan dan menetapkan prioritasnya. - Menjadi wakil masyarakat desa untuk mengikuti MAD kompetisi pendanaan PPK yang diadakan di tingkat Kecamatan Lhoknga.
5	Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana PPK	<ul style="list-style-type: none"> - Mengontrol pembangunan sarana prasarana yang dilaksanakan oleh masyarakat. - Memfasilitasi penyelesaian masalah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendampingi dan memberikan arahan kepada pelaku PPK di kec. dan desa. - Memantau/ mengawasi perkembangan pelaksanaan pembangunan secara berkala. - Membantu penyelesaian masalah di lapangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ikut memberikan swadaya berupa lahan dan tenaga. - Anggota masyarakat (TPK dan FD) yg dipersiapkan sebagai tim teknis pengelola pembangunan di desa, bertugas membuat gambar, desain dan RAB sarana prasarana dengan dibantu oleh FK, menyiapkan administrasi dan mengadakan musyawarah persiapan pelaksanaan pembangunan. (Untuk Mon Ikeun dan Lambaro Seibun peran FD masih kurang). - Menyediakan papan informasi PPK di desa/ kel. - Masyarakat ikut mengontrol/mengawasi pembangunan (masyarakat Mon Ikeun kurang peduli dengan pengawasan). - Mengadakan musyawarah pertanggungjawaban penyelesaian pembangunan.
6	Pelestarian/ pemeliharaan sarana prasarana PPK	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi dan menjadi pelatih pada pelaksanaan pelatihan Tim pemeliharaan tetapi pengontrolan msh kurang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajak masyarakat untuk tetap memelihara sarana prasarana. - Menjadi pelatih Tim pemeliharaan hasil pembangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Tim Pemeliharaan sarana prasarana. - Upaya pemeliharaan jalan dan saluran di Mon Ikeun belum berjalan karena belum pulihnya kondisi pemukiman penduduk.

Sumber: Hasil analisis, 2007

4.2 Analisis Tingkat Kondisi Pemberdayaan Masyarakat Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga Sebelum dan Setelah PPK.

Analisis tingkat kondisi pemberdayaan masyarakat meliputi analisis potensi masyarakat, analisis dukungan lingkungan masyarakat dan analisis semangat pengorbanan masyarakat untuk mengetahui besarnya daya (*power*) yang dimiliki masyarakat di tiga desa lokasi penelitian (Kelurahan Mon Ikeun, Desa Lambaro Seubun dan Desa Meunasah Karieng) Kecamatan Lhoknga dalam membangun diri dan lingkungannya pasca tsunami saat sebelum dan setelah pelaksanaan PPK pasca tsunami. Hasil pengolahan data rekapitulasi tingkat kondisi pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan terlampir pada tabel *lampiran C3*. Sedangkan pembahasan masing-masing tingkat kondisi pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

4.2.1 Analisis Tingkat Potensi Masyarakat

Potensi masyarakat yang dimaksudkan disini meliputi *percaya diri, komunikasi, keahlian, kepercayaan dan kekayaan masyarakat*. Adapun data tingkat potensi masyarakat untuk ketiga desa dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut:

**TABEL IV.2
TINGKAT POTENSI MASYARAKAT PASCA TSUNAMI**

No.	Jenis Potensi Masyarakat	Tingkatan untuk Potensi Masyarakat.					
		Kelurahan Mon Ikeun		Desa Lambaro Seubun		Desa Meunasah Karieng	
		Sebelum PPK	Setelah PPK	Sebelum PPK	Setelah PPK	Sebelum PPK	Setelah PPK
1.	Percaya Diri	2,94	3,94	2,06	3,28	3,06	3,94
2.	Komunikasi	3,06	3,67	2,78	3,33	3,22	3,94
3.	Keahlian	2,59	3,12	2,31	3,04	2,85	3,48
4.	Kepercayaan	2,83	3,06	2,22	2,44	3,50	3,89
5.	Kekayaan	2,86	3,06	1,78	2,69	2,78	3,17

Sumber : Hasil pengolahan data dari kuesioner kondisi potensi masyarakat, 2007.

Keterangan angka: 1,00 – 2,33 : rendah; 2,34 – 3,66 : sedang; 3,66 - 5 : tinggi.

Data tingkat potensi masyarakat tersebut diperoleh dari hasil pengolahan data (perhitungan rata-rata) survey tingkat potensi masyarakat sebelum dan setelah pengelolaan PPK pasca tsunami di tiga desa, berdasarkan hasil rekapitulasi skor nilai jawaban 18 orang responden dari masing-masing desa.

Adapun penjelasan tingkat kondisi pemberdayaan masyarakat dari masing-masing jenis potensi masyarakat tersebut sebagai berikut:

4.2.1.1 Analisis Percaya Diri Masyarakat Pasca Tsunami.

Sebelum pelaksanaan PPK pasca tsunami, masyarakat di Kelurahan Mon Ikeun mempunyai sikap agak optimis dalam menghadapi permasalahan yang timbul akibat tsunami yang diindikasikan oleh adanya usaha untuk kembali beraktivitas meskipun kondisi Kelurahan Mon Ikeun belum pulih dan banyak anggota keluarga yang hilang. Sedangkan masyarakat Lambaro Seubun merasa putus asa dan pasrah dengan musibah yang mereka alami. Sementara masyarakat Desa Meunasah Karieng merasa agak optimis, kerusakan yang mereka alami tidak separah yang terjadi di Mon Ikeun dan Lambaro Seubun, hanya beberapa rumah yang hancur dan korban jiwa juga sedikit, kerusakan yang cukup parah terjadi pada areal persawahan di lingkungan desa mereka.

Setelah PPK sikap masyarakat Mon Ikeun menjadi optimis, adanya PPK pasca tsunami membangkitkan semangat masyarakat untuk membangun prasarana jalan dan saluran di kelurahan mereka untuk memperlancar aktivitas masyarakat. Sementara sikap masyarakat Lambaro Seubun menjadi agak optimis setelah adanya bantuan dan pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kembali kerusakan akibat tsunami diantaranya pemagaran areal sawah melalui PPK. Sedangkan

masyarakat Meunasah Karieng bersikap optimis, dimana kondisi masyarakat telah pulih dan aktivitas sosial ekonomi telah berjalan kembali.

Menurut *United Nations* (1956:83-92 dalam Tampubolon, 2006) tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat dan rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya. Sejalan dengan hal itu sepatutnya masyarakat yang menjadi korban bencana alam mendapatkan stimulan dana yang disertai dengan upaya pemberdayaan agar masyarakat kembali bersemangat memulihkan kondisi diri dan lingkungannya. Masyarakat yang mengalami bencana tidak mau terlalu larut dalam kesedihan, mereka masih memiliki potensi percaya diri untuk bangkit dan bantuan dari pihak lain mempercepat pemulihan percaya diri masyarakat.

4.2.1.2 Analisis Kemampuan Komunikasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan.

Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan (Tampubolon, 2006). Proses diskusi tersebut akan lancar jika dukung oleh kemampuan komunikasi yang dimiliki masyarakat.

Kemampuan komunikasi masyarakat di Kelurahan Mon Ikeun dan Meunasah Karieng dalam forum musyawarah sebelum pelaksanaan PPK pasca tsunami agak memadai, yaitu proses diskusi berjalan cukup lancar dan usulan serta saran yang disampaikan masyarakat dalam forum cukup dapat dipahami oleh yang lainnya. Sedangkan untuk masyarakat Desa Lambaro Seubun kemampuan komunikasi tersebut belum memadai atau proses diskusi kurang lancar, pada saat-

saat tertentu timbul kesulitan bagi masyarakat untuk memahami aspirasi dan saran dari yang lainnya (tidak ada titik temu).

Setelah pelaksanaan PPK kemampuan komunikasi masyarakat Mon Ikeun meningkat menjadi hampir memadai atau mudah bagi masyarakat untuk memahami hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat lainnya. Sementara komunikasi masyarakat Lambaro Seubun meningkat menjadi agak memadai, proses diskusi menjadi lebih lancar dari sebelumnya meskipun masih ada masyarakat yang kurang puas dengan hasil musyawarah karena merasa tidak dilibatkan dalam forum musyawarah. Untuk kemampuan komunikasi masyarakat Meunasah Karieng menjadi memadai dengan adanya pelaksanaan PPK yang banyak melibatkan masyarakat dan memberikan kesempatan tanya jawab bagi masyarakat.

Masyarakat Lambaro Seubun yang kemampuan komunikasinya belum memadai, masih memerlukan pendampingan dalam proses diskusi dalam forum musyawarah agar masyarakat dapat belajar mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dan mencari alternatif pemecahannya.

4.2.1.3 Analisis Kemampuan Manajemen, Teknis dan Organisasi (Keahlian) Masyarakat dalam Pengelolaan Pembangunan Desa.

Menurut Siregar, dkk (1987: 16-21), dalam proses pengelolaan terdapat berbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan yang meliputi: *goal setting, planning, staffing, direting, supervising dan controlling*. Untuk itu masyarakat desa yang terkait dengan pengelolaan pembangunan di lingkungannya perlu memiliki kemampuan manajemen, teknis dan organisasi. Kemampuan manajemen masyarakat yang dimaksudkan dilihat berdasarkan kemampuan masyarakat menyusun rincian permasalahan, membuat peta potensi desa, menyusun program

pembangunan, melaksanakan kegiatan pembangunan, memelihara sarana prasarana, pelestarian modal usaha dan kemampuan mengawasi pekerjaan.

Sebelum pelaksanaan PPK pasca tsunami kemampuan masyarakat di Kelurahan Mon Ikeun dalam menyusun rincian permasalahan masih kurang, kemampuan membuat peta potensi, menyusun program dan melaksanakan pembangunan agak kurang, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan meliputi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Kelurahan Mon Ikeun yang rusak total akibat tsunami, masyarakat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan yang mendapat bantuan dana dari pihak luar baik pemerintah daerah, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) maupun NGO. Dalam hal pemeliharaan, ada sedikit kemauan masyarakat Mon Ikeun untuk memelihara sarana prasarana yang telah dibangun dan dalam melestarikan perguliran bantuan modal usaha ekonomi bergulir masih kurang atau perguliran dana kurang lancar. Kemampuan masyarakat Mon Ikeun dalam mengawasi/mengontrol pelaksanaan pembangunan juga agak kurang atau masyarakat kurang peduli dengan pengontrolan pembangunan.

Menyangkut dengan kemampuan masyarakat Desa Lambaro Seubun sebelum PPK pasca tsunami dalam menyusun rincian permasalahan, membuat peta potensi desa masih kurang. Sementara itu kemampuan masyarakat dalam menyusun program dan melaksanakan dan memelihara pembangunan agak kurang. Kepedulian masyarakat untuk perguliran bantuan modal usaha dan pengontrolan pelaksanaan pembangunan juga masih kurang.

Selanjutnya kemampuan masyarakat di Desa Meunasah Karieng sebelum PPK pasca tsunami dalam menyusun rincian permasalahan, membuat peta potensi desa, menyusun dan melaksanakan program pembangunan agak kurang dan

pembangunan dilaksanakan berupa pembangunan desa rutin yang mendapat dana dari pemerintah daerah setiap tahunnya, bantuan dari BRR untuk pembersihan lahan pertanian yang rusak akibat tsunami. Sedangkan kemauan masyarakat untuk memelihara sarana prasarana yang ada di desa mereka agak memadai, kemampuan melestarikan perguliran bantuan modal usaha ekonomi bergulir masih kurang atau perguliran dana kurang lancar. Sedangkan kemampuan masyarakat Meunasah Karieng dalam mengawasi/mengontrol pelaksanaan pembangunan agak memadai. atau masyarakat cukup peduli dalam mengontrol kegiatan pembangunan di desa mereka.

Setelah pelaksanaan PPK pasca tsunami, kemampuan masyarakat Mon Ikeun dalam menyusun rincian permasalahan tentang sarana prasarana lingkungan dan modal usaha masih agak kurang. Kemampuan masyarakat Mon Ikeun dalam membuat peta menjadi agak memadai, pengetahuan tentang cara membuat peta yang memuat potensi kelurahan diperoleh dari pelatihan PPK, bimbingan pihak PPK Kecamatan Lhoknga dan juga NGO lain yang masuk ke kelurahan mereka. Kemampuan menyusun program pembangunan hampir memadai, kemampuan melaksanakan pembangunan menjadi agak memadai dengan adanya pembangunan prasarana jalan dan saluran melalui kegiatan PPK, yang penyediaan lahan dari swadaya masyarakat. Untuk pemeliharaan sarana prasarana PPK telah dibentuk Tim Pemeliharaan prasarana jalan dan saluran tetapi belum berfungsi karena kondisi pemukiman Mon Ikeun belum sepenuhnya normal, masih dalam tahap penyelesaian rumah-rumah penduduk. Untuk pelestarian modal usaha masih kurang memadai. Sedangkan untuk pengontrolan pembangunan, hanya sebagian kecil masyarakat mau mengawasi pelaksanaan pembangunan tapi yang lainnya kurang peduli.

Kemampuan masyarakat Lambaro Seibun setelah PPK pasca tsunami dalam menyusun rincian permasalahan masih agak kurang. Kemampuan membuat peta potensi, menyusun dan melaksanakan program pembangunan dan memelihara sarana prasarana agak memadai, peningkatan pelaksanaan pembangunan di desa mereka berupa pembuatan pagar areal persawahan dari dana PPK. Untuk pelestarian modal usaha masih kurang sedangkan kemampuan masyarakat Lambaro Seibun untuk mengontrol pembangunan menjadi agak memadai berarti ada sebagian masyarakat yang mau menegur dan mengawasi pelaksanaan pembangunan namun masih ada saran dari masyarakat yang tidak dipedulikan oleh pelaksana pembangunan.

Untuk masyarakat Meunasah Karieng, setelah PPK pasca tsunami kemampuan masyarakat dalam menyusun rincian permasalahan dan peta potensi desa untuk keperluan penyusunan program pembangunan desa menjadi agak memadai. Kemampuan masyarakat dalam menyusun program, melaksanakan dan memelihara pembangunan menjadi memadai dengan adanya dukungan oleh kepala desa dan perangkatnya yang mengadakan musyawarah desa perencanaan untuk PPK dimulai dengan penyusunan rencana pembangunan desa jangka panjang dan jangka pendek, dan masyarakat dapat memanfaatkan stimulan dana dari PPK untuk pembangunan gedung TPA dengan ditambah swadaya masyarakat. Untuk pemeliharaan gedung TPA dirawat oleh pengurus keagamaan dan untuk menjaga kebersihan di lingkungan gedung tersebut diadakan gotong royong. Sedangkan untuk perguliran dana pengembangan ekonomi masyarakat telah berjalan tetapi modal usaha yang ada pada masyarakat Meunasah Karieng jumlahnya sedikit dan dari PPK pasca tsunami tidak ada dana modal usaha. Masyarakat mau mengontrol

pembangunan agar berkualitas, kesadaran itu muncul dari individu dan juga keterbukaan dari pelaku PPK yang mau menampung aspirasi masyarakat dan membangun sistem kebersamaan dan keterbukaan. Pada sisi lain upaya masyarakat dalam mengawasi pembangunan belum maksimal karena pengetahuan teknis masyarakat tentang konstruksi sarana prasarana yang dibangun masih terbatas.

Menyangkut dengan kemampuan teknis masyarakat Mon Ikeun dan Lambaro Seibun dan Meunasah Kareing dalam membuat desain, gambar, dan RAB sarana prasarana fisik lingkungan seperti prasarana jalan, saluran, jembatan, meunasah, rumah, gedung dll sebelum pelaksanaan PPK pasca tsunami masih kurang karena kurangnya pengetahuan teknis.

Setelah pelaksanaan PPK kemampuan teknis masyarakat Mon Ikeun, Meunasah Karieng meningkat menjadi agak memadai yang berarti pengetahuan masyarakat dalam membuat desain, gambar dan RAB bertambah terutama bagi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PPK yang telah mengikuti pelatihan dan sering mendapat bimbingan dari Fasilitator Kecamatan (FK) Lhoknga. Sedangkan kemampuan teknis masyarakat Lambaro Seibun masih agak kurang, meskipun telah mendapat pelatihan tetapi peningkatannya hanya sedikit.

Kemampuan masyarakat Mon Ikeun dan Meunasah Karieng dalam menjalankan organisasi di masyarakat seperti LKMD, PKK dan Karang taruna sebelum pelaksanaan PPK pasca tsunami agak memadai berarti organisasi tersebut masih tetap berfungsi pasca tsunami. Sedangkan kemampuan masyarakat Lambaro Seibun dalam menjalankan organisasi di masyarakat masih agak kurang yang diindikasikan dengan peran organisasi yang belum berfungsi secara baik atau masih tersendat-sendat.

Setelah pelaksanaan PPK kemampuan masyarakat Mon Ikeun dan Lambaro Seubun dalam menjalankan organisasi agak memadai berarti organisasi di desa mereka masih dapat berfungsi. Kemampuan masyarakat Meunasah Karieng meningkat menjadi hampir memadai yang berarti banyak organisasi masyarakat yang berfungsi, selain yang disebutkan di atas juga ada pos yandu, kelompok wirid yasin, kelompok marhaban dan lain-lain.

Tingkat kemampuan (keahlian) masyarakat atau kapasitas pembangunan suatu komunitas dalam mengelola pembangunan di lingkungan mereka terkait dengan tingkat partisipasi yang mungkin dilakukan atau diambil oleh suatu komunitas. Keahlian masyarakat Mon Ikeun dan Meunasah Karieng dan Lambaro Seubun yang masih kurang sebelum pelaksanaan PPK pasca tsunami menunjukkan perlunya peningkatan motivasi, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam mengelola pembangunan. Hal itu dapat diwujudkan dengan sosialisasi program, pendampingan untuk menumbuhkan kesadaran dan kemauan masyarakat, pelaksanaan pelatihan, dan bimbingan pada saat pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan kemampuan masyarakat.

4.2.1.4 Analisis Rasa Kepercayaan antara Sesama Masyarakat.

Sebelum pelaksanaan PPK pasca tsunami di Kelurahan Mon Ikeun sikap saling percaya dan transparansi di lingkungan masyarakat agak jarang ditemui. Sementara rasa kepercayaan diantara masyarakat di Desa Lambaro Seubun masih kurang, dimana sikap saling percaya dan kejujuran ada di lingkungan masyarakat tetapi transparansi masih kurang. Sedangkan di Meunasah Karieng sikap saling percaya, jujur dan transparansi mudah ditemui dalam masyarakat.

Setelah pelaksanaan PPK, sikap saling percaya, kejujuran dan transparansi menjadi sedikit mudah ditemui dalam lingkungan masyarakat Mon Ikeun. Sedangkan untuk rasa kepercayaan yang dimiliki masyarakat Lambaro Seibun masih kurang, sebenarnya masyarakat telah memiliki sikap saling percaya dan kejujuran tetapi pelaku pembangunan di desa kurang menginformasikan perkembangan pengelolaan pembangunan kepada masyarakat kecuali jika ada permintaan dari masyarakat baru hal itu dilakukan. Sementara rasa kepercayaan telah tumbuh diantara sesama masyarakat Meunasah Karieng, sikap saling percaya, kejujuran dan transparansi menjadi kebiasaan masyarakat. Nilai nilai tersebut sudah membudaya dan masyarakat menyadari pentingnya kejujuran untuk keberhasilan pembangunan apalagi masyarakat telah saling mengenal diantara sesamanya.

Konsep pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya merupakan upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan dan penegakan nilai-nilai, ide-ide, gagasan, tata kelakuan dan norma-norma yang disepakati bersama (*social capital*) yang berdasarkan atas moral yang dilembagakan, dan mengatur masyarakat dalam kehidupan sosial budaya serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberikan kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas (Moeljarto, 2000:3). Untuk masyarakat Mon Ikeun dan Lambaro Seibun masih memerlukan upaya untuk peningkatan rasa kepercayaan dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat agar selalu jujur dan transparansi dalam mengelola pembangunan yang dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat atau fasilitator, tetapi butuh proses untuk mewujudkannya. Sedangkan untuk masyarakat Meunasah Karieng yang rasa kepercayaannya sudah memadai perlu tetap dipertahankan.

4.2.1.5 Analisis Kemampuan Masyarakat dalam Mengakses Sumber daya (Kekayaan).

Menurut Bartle (2002), kekayaan merupakan tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda pada individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan sumber daya actual, dan produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang dan bermanfaat, keuangan dan non keuangan (termasuk sumbangan tenaga kerja, tanah, peralatan, persediaan, pengetahuan, keahlian).

Sementara itu kemampuan masyarakat usia kerja di Kelurahan Mon Ikeun untuk mendapatkan mata pencaharian di semua sektor perekonomian (pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan dan jasa) sebelum pelaksanaan PPK pasca tsunami agak memadai, banyak masyarakat Mon Ikeun yang mendapatkan pekerjaan dengan ikut serta dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, meskipun bersifat sementara. Untuk masyarakat di Meunasah Karieng kurang memadai karena ada imbas tsunami terhadap pedagang, pengrajin dan petani meskipun tidak dalam waktu yang lama. Sedangkan masyarakat Lambaro Seibun kemampuannya masih kurang atau terbatas, banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani kehilangan mata pencaharian akibat rusaknya lahan pertanian mereka pada saat tsunami dan sebagian masih belum mau bekerja karena masih ada bantuan sembako dari donatur.

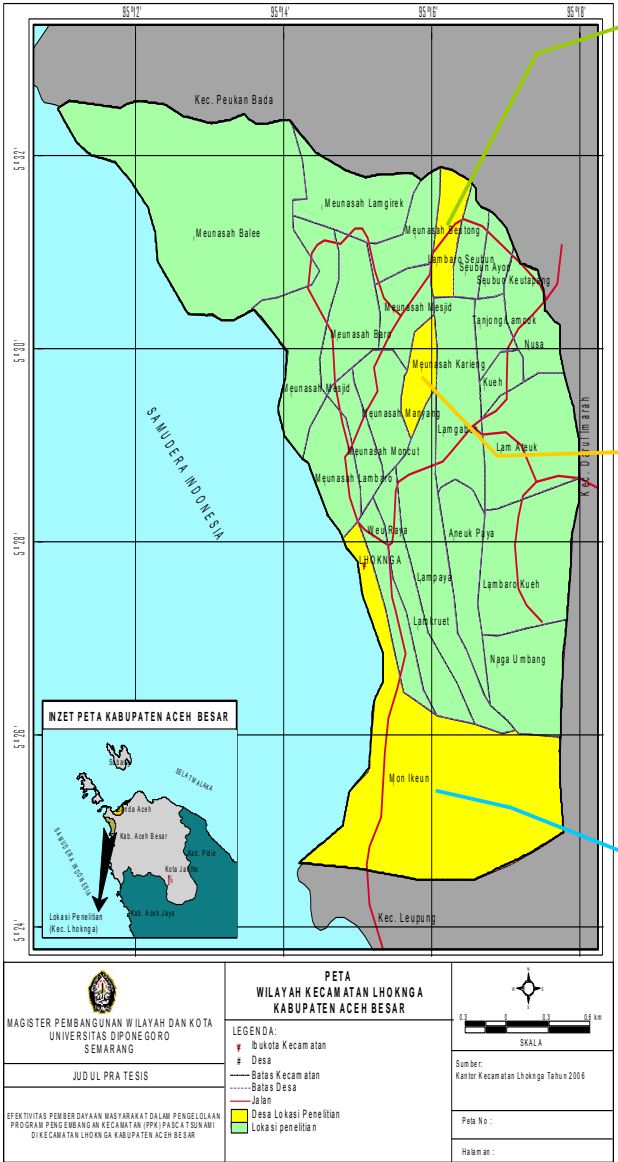
Setelah pelaksanaan PPK pasca tsunami, kemampuan masyarakat di Kelurahan Mon Ikeun dan Meunasah Karieng untuk mendapatkan mata pencaharian masih sama seperti sebelumnya, namun masyarakat Lambaro Seibun menjadi lebih mudah mendapatkan pekerjaan setelah lahan yang rusak direhabilitasi dan adanya pagar sawah dari kegiatan PPK pasca tsunami.

Selanjutnya mengenai banyaknya sumberdaya pembangunan berupa sumber daya keuangan dan non keuangan milik masyarakat Mon Ikeun yang digunakan untuk pembangunan di lingkungan mereka sebelum pelaksanaan PPK pasca tsunami berupa penyediaan lahan dan tenaga untuk penyiapan pembangunan rumah, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Masyarakat Meunasah Karieng mendukung pelaksanaan pembangunan desa yang mendapat dana dari pemerintah daerah dan bantuan dari NGO dengan ikut berswadaya berupa sumbangan lahan dan gotong royong. Sementara banyaknya sumber daya milik masyarakat Lambaro Seibun yang digunakan untuk pembangunan masih cukup terbatas atau kurang.

Setelah pelaksanaan PPK, sumber daya milik masyarakat Mon Ikeun dan Meunasah Karieng yang disumbangkan menjadi lebih banyak, untuk kegiatan PPK masyarakat ikut menyumbang lahan dan terlibat dalam pembangunan prasarana jalan dan saluran di Mon Ikeun dan Gedung TPA di Meunasah Karieng. Sedangkan swadaya masyarakat di Lambaro Seibun berupa keterlibatan dalam membangun pagar areal sawah.

Tingkat pengendalian masyarakat Mon Ikeun dan Meunasah Karieng terhadap sumber daya yang ada untuk mendapatkan mata pencaharian dan berswadaya dalam pengelolaan pembangunan di lingkungannya sebelum PPK agak kurang dan setelah PPK menjadi agak memadai. Demikian juga untuk masyarakat Lambaro Seibun yang sebelum PPK masih kurang dan setelah PPK juga agak kurang, menunjukkan bahwa potensi ekonomi masyarakat di ketiga lokasi tersebut masih perlu diberdayakan. Untuk analisis tingkat potensi masyarakat pasca tsunami pada tiga desa yang meliputi 5 jenis potensi masyarakat dalam bentuk tampilan peta lokasi (*spasial*) dapat dilihat pada gambar 4.1.

Analisis Tingkat Potensi Masyarakat



LAMBARO SEUBUN
(Kegiatan PPK Pasca Tsunami : Pemagaran Areal Sawah)

Sebelum PPK :
Tingkat potensi masyarakat : rendah
kecuali komunikasi : sedang.

Setelah PPK :
Tgkt potensi masyarakat : sedang.

Hasil Analisis :
Percaya diri, komunikasi, keahlian, rasa kepercayaan dan kekayaan masy. msh perlu peningkatan.

MEUNASAH KARIENG
(Kegiatan PPK Pasca Tsunami : Pembangunan Gedung TPA)

Sebelum PPK:
Tingkat potensi masyarakat : sedang ,

Setelah PPK :
Percaya diri, komunikasi dan rasa kepercayaan : tinggi sedangkan keahlian dan kekayaan : sedang.

Hasil Analisis :
Fokus peningkatan potensi pada keahlian dan kekayaan masyarakat.

MON IKEUN
(Kegiatan PPK Pasca Tsunami : Pembangunan Jalan & Saluran)

Sebelum PPK:
Tingkat potensi masy. : sedang.

Setelah PPK :
Percaya diri dan komunikasi : tinggi, sdngkan keahlian, rasa kepercayaan dan kekayaan : sedang.

Hasil Analisis :
Fokus peningkatan potensi pada keahlian, rasa kepercayaan dan kekavaan masvarakat.

Sumber: Hasil analisis, 2007

GAMBAR 4.1
TINGKAT POTENSI MASYARAKAT PASCA TSUNAMI SEBELUM
DAN SETELAH PELAKSANAAN PPK

4.2.2 Analisis Tingkat Dukungan Lingkungan Masyarakat

Dukungan lingkungan masyarakat yang dimaksudkan disini berupa lingkungan masyarakat yang mendukung pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dukungan tersebut meliputi: *layanan masyarakat, informasi, keterkaitan, rintangan, kepemimpinan, jaringan kerja, organisasi dan kekuatan politik* dan diperlukan dalam rangka peningkatan kapasitas pembangunan (kemampuan masyarakat didalam memanfaatkan sumber daya, baik alam dan sosial, dengan teknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fisik dan sosial kehidupan manusia) pasca tsunami.

Untuk data tingkat dukungan lingkungan masyarakat diperoleh berdasarkan hasil pengolahan data (perhitungan rata-rata) skor jawaban 18 orang responden tiap. Untuk data tersebut dapat dilihat pada tabel IV.3 berikut:

TABEL IV.3
TINGKAT DUKUNGAN LINGKUNGAN MASYARAKAT
PASCA TSUNAMI

No.	Jenis Dukungan Lingkungan Masyarakat	Tingkatan untuk Dukungan Lingkungan Masyarakat					
		Kelurahan Mon Ikeun		Desa Lambaro Seibun		Desa Meunasah Karieng	
		Sebelum PPK	Setelah PPK	Sebelum PPK	Setelah PPK	Sebelum PPK	Setelah PPK
1.	Layanan masyarakat	2,67	3,23	1,84	2,70	2,95	3,75
2.	Infomasi	2,56	2,57	1,51	1,61	2,50	2,89
3.	Keterkaitan	2,94	3,11	2,67	3,00	3,56	4,06
4.	Rintangan	3,00	3,44	1,78	2,00	2,94	3,61
5.	Kepemimpinan	2,78	2,67	3,56	3,56	3,89	4,11
6.	Jaringan Kerja	3,17	4,50	2,83	4,00	3,33	4,33
7.	Organisasi	2,50	2,67	2,56	2,56	3,33	3,89
8.	Kekuatan Politik	2,50	2,67	1,73	1,81	2,73	3,08

Sumber: Hasil pengolahan data dari kuesioner kondisi dukungan lingkungan masyarakat, 2007

Keterangan angka: 1,00 – 2,33 : rendah; 2,34 – 3,66 : sedang; 3,66 - 5 : tinggi.

Untuk memahami tingkat kondisi pemberdayaan masyarakat dari masing-masing jenis dukungan lingkungan masyarakat akan dijelaskan berdasarkan data pada tabel di atas yaitu sebagai berikut:

4.2.2.1 Analisis Ketersediaan dan Akses Fasilitas Layanan Masyarakat

Jumlah dan jenis fasilitas atau layanan umum seperti jalan, saluran, listrik, pasar, air minum, jalur pendidikan, layanan kesehatan yang tersedia di Kelurahan Mon Ikeun sebelum PPK pasca tsunami masih kurang karena Kelurahan Mon Ikeun rusak total akibat tsunami dan butuh waktu yang agak lama untuk proses rehabilitasi rekonstruksi, demikian juga dengan Lambaro Seibun yang mengalami kerusakan cukup parah. Sedangkan untuk Meunasah Karieng agak sedikit lengkap karena kondisi pemukiman tersebut pasca tsunami lebih baik dari desa lainnya.

Setelah pelaksanaan PPK, ada peningkatan jumlah dan fasilitas pelayanan umum di Mon Ikeun seperti prasarana jalan dan saluran PPK tetapi untuk fasilitas lain masih agak kurang misalnya pembangunan rumah belum semuanya rampung. Untuk Lambaro Seibun ada peningkatan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan umum seperti prasarana jalan, listrik dan melalui PPK adanya pembuatan pagar sawah sedangkan untuk fasilitas pendidikan, air minum, pasar dan saluran irigasi belum tersedia di desa mereka. Sementara untuk Meunasah Karieng ada peningkatan fasilitas pelayanan umum seperti gedung TPA untuk tempat pendidikan agama bagi anak-anak yang dibangun melalui PPK sedangkan layanan kesehatan masih kurang.

Sementara untuk akses masyarakat Kelurahan Mon Ikeun terhadap penggunaan fasilitas dan layanan umum seperti jalan, saluran, listrik, pasar, air minum, jalur pendidikan dan layanan kesehatan sebelum PPK pasca tsunami masih agak sulit karena masih kurangnya fasilitas yang dibutuhkan. Sedangkan untuk masyarakat Lambaro Seibun masih sukar mengakses fasilitas layanan umum yang masih kurang ketersediaannya. Sementara akses masyarakat Meunasah Karieng

agak mudah karena fasilitas yang tersedia agak lengkap dan tidak ada diskriminasi untuk menggunakannya.

Setelah pelaksanaan PPK, akses masyarakat Mon Ikeun dan Meunasah Karieng terhadap penggunaan fasilitas dan layanan umum menjadi mudah atau masyarakat tidak mengalami banyak hambatan untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Sedangkan masyarakat Lambaro Seubun akses terhadap penggunaan fasilitas dan layanan umum masih agak sulit karena masih ada fasilitas layanan umum yang belum tersedia di desa mereka.

Diantara ketiga lokasi desa tersebut, setelah PPK tingkat layanan masyarakat Lambaro Seubun yang terendah atau masih agak kurang, untuk Mon Ikeun tingkatannya sedang atau agak memadai meskipun dari segi jumlah dan jenis fasilitas masih kurang tetapi masyarakat mudah untuk mengakses layanan masyarakat tersebut, sementara untuk Meunasah Karieng tingkatannya agak tinggi atau hampir memadai. Jadi masyarakat masih perlu mengupayakan adanya peningkatan jenis, jumlah dan akses terhadap fasilitas layanan masyarakat.

4.2.2.2 Analisis Pengembangan Informasi oleh Masyarakat

Sebelum pelaksanaan PPK pasca tsunami, masyarakat Mon Ikeun dan Meunasah Karieng telah memiliki sedikit informasi tentang sumber dana yang dapat diakses, pemanfaatan teknologi tepat guna, pelatihan, layanan kesehatan, tata cara pengelolaan pembangunan dan lain-lain yang dapat disebarkan kepada masyarakat lain meskipun kadang-kadang kepedulian itu kurang. Sementara itu untuk Lambaro Seubun masyarakat belum mampu mengembangkan informasi disebabkan kurangnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat.

Setelah pelaksanaan PPK, kesadaran anggota masyarakat Mon Ikeun dan Meunasah Karieng untuk mengembangkan informasi sama dengan sebelum PPK hanya ada peningkatan frekuensi musyawarah yang menjadi ajang penyebaran informasi tentang pelaksanaan PPK. Sementara pengembangan informasi untuk masyarakat Lambaro Seibun juga masih kurang karena keterbatasan akses mereka terhadap informasi pembangunan yang akan dilaksanakan di desa mereka.

Menurut Bartle (2002) besar atau kecilnya kekuatan masyarakat mengembangkan informasi dilihat dari kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi, tingkat kepedulian, pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara individu dan dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif dan berguna, tidak sekedar volume dan besaran. Berdasarkan hal tersebut, kekurangan dalam pengembangan informasi untuk masyarakat Mon Ikeun karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya informasi pembangunan, untuk Lambaro Seibun lebih disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sumber informasi, sedangkan untuk Meunasah Karieng lebih disebabkan oleh kurangnya kemampuan mengolah dan menganalisa informasi.

4.2.2.3 Analisis Keterkaitan antara Pemerintah dan Masyarakat

Sebelum pelaksanaan PPK pasca tsunami, pemerintah telah mempunyai kepedulian terhadap penyelesaian masalah yang dialami masyarakat baik di Mon Ikeun, Lambaro Seibun maupun Meunasah Karieng, yang diwujudkan dengan memberikan bantuan dan membangun kembali wilayah yang tertimpa bencana.

Setelah pelaksanaan PPK, keterkaitan antara pemerintah dengan masyarakat juga menjadi sedikit meningkat, misalnya dalam pelaksanaan PPK pemerintah punya andil untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan dana stimulan PPK, menyediakan kesempatan bagi keterlibatan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dana pembangunan secara langsung sehingga sebagian kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Untuk Desa Meunasah Karieng dukungan pemerintah di tingkat desa terhadap pembangunan juga besar sehingga masyarakat merasa punya keterkaitan yang erat dengan pemerintah.

Dari kondisi di atas terlihat bahwa pemerintah cukup peduli terhadap pemulihan kondisi masyarakat pasca tsunami, namun permasalahan yang dihadapi masyarakat belum sepenuhnya dapat ditangani oleh pemerintah, perlu upaya pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan.

4.2.2.4 Analisis Berkurangnya Rintangan bagi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan

Sebelum pelaksanaan PPK pasca tsunami, masyarakat Mon Ikeun dan Meunasah Karieng punya peluang yang agak memadai untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan pembangunan seperti pembangunan rumah, sarana prasarana umum dan sosial ekonomi dan penyediaan modal usaha atau dengan kata lain masyarakat tidak mengalami banyak rintangan dalam ikut menentukan keputusan pembangunan di lingkungannya. Sementara untuk masyarakat Lambaro Seibun hanya sedikit peluang masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan pembangunan dan ada juga pengambilan keputusan yang tidak menampung aspirasi masyarakat atau masih ada rintangan.

Setelah pelaksanaan PPK, masyarakat Mon Ikeun dan Meunasah Karieng punya peluang yang lebih besar untuk menentukan pelaksanaan pembangunan yang sesuai kebutuhannya seperti pembangunan jalan dan saluran serta gedung TPA melalui PPK pasca tsunami. Sementara masyarakat Lambaro Seibun masih menemui rintangan untuk dapat terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam pelaksanaan PPK masih ada anggota masyarakat yang merasa tidak punya informasi tentang PPK.

Kondisi masih adanya rintangan bagi masyarakat Lambaro Seibun untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan pembangunan menunjukkan masyarakat belum cukup mampu mempengaruhi pihak yang melaksanakan pembangunan di desa mereka sehingga perlu adanya fasilitator yang menjembatani antara masyarakat dan pihak lain.

4.2.2.5 Analisis Kualitas Kepemimpinan Masyarakat di Desa/Kelurahan.

Sebelum pelaksanaan PPK pasca tsunami, pemimpin masyarakat di Kelurahan Mon Ikeun telah memiliki sebagian dari sifat-sifat kepemimpinan keahlian, ketaqwaan, kejujuran, kharisma dan peduli, sedangkan untuk pemimpin masyarakat di Lambaro Seibun dan Meunasah Karieng telah memiliki sebagian besar dari sifat-sifat tersebut, jadi kualitasnya baik. Setelah pelaksanaan PPK kualitas kepemimpinan di Mon Ikeun, Lambaro Seibun dan Meunasah Karieng masih tetap sama seperti kondisi sebelum PPK atau tidak ada peningkatan yang berarti.

Kondisi kualitas kepemimpinan di desa yang sudah cukup baik harus tetap dipertahankan agar masyarakat tetap terorganisir dan memudahkan upaya

peningkatan taraf hidup. Sedangkan untuk kualitas kepemimpinan di Mon Ikeun yang masih agak kurang memadai perlu diupayakan untuk menjadi lebih baik.

4.2.2.6 Analisis Hubungan Kerjasama antara Masyarakat dengan Pihak Luar (Jaringan Kerja)

Masyarakat Mon Ikeun, Lambaro Seibun dan Meunasah Karieng sebelum pelaksanaan PPK pasca tsunami telah mengadakan kesepakatan dengan pihak donatur (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) dan NGO) meskipun kesepakatan itu belum sepenuhnya dilaksanakan karena masih dalam proses persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Setelah pelaksanaan PPK, hubungan kerjasama untuk ketiga desa telah direalisasikan dan masyarakat dapat menikmati hasilnya, meskipun ada sebagian pelaksanaan pembangunan yang kurang sesuai dengan harapan. Masyarakat Lambaro Seibun membuat usulan atau proposal kepada lembaga-lembaga yang terkait rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh untuk mendapatkan bantuan dana bagi pelaksanaan pembangunan.

Jaringan kerja yang telah terjalin antara masyarakat dengan pihak luar didukung oleh adanya perhatian yang besar dari pihak luar terhadap upaya rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana dan adanya sikap keterbukaan masyarakat untuk menyambut bantuan pihak lain guna mempercepat pemulihan kondisi pasca tsunami.

4.2.2.7 Analisis Kelengkapan Organisasi Pengelola Pembangunan

Sebelum dan setelah pelaksanaan PPK pasca tsunami organisasi pengelola pembangunan (LKMD) yang ada di Mon Ikeun, Lambaro Seibun dan Meunasah Karieng telah memiliki struktur pengurus, prosedur kerja, pembagian tugas dan

kejelasan peran serta fungsi dalam melaksanakan pembangunan meskipun kurang maksimal. Pembentukan organisasi pengelola pembangunan yang dibentuk melalui PPK pasca tsunami belum dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengelolaan pembangunan di luar PPK sehingga organisasi pengelola pembangunan yang ada dalam PPK pasca tsunami masih terpisah dengan pengelolaan pembangunan desa secara keseluruhan.

4.2.2.8 Analisis Akses Penyampaian Aspirasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan dan kepada Lembaga Legislatif/Parpol (Kekuatan Politik)

Sebelum PPK pasca tsunami, masyarakat di Kelurahan Mon Ikeun dan Meunasah Karieng punya keinginan yang kuat atau tertarik untuk menyalurkan aspirasi dalam forum pengambilan keputusan tentang pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungannya, sedangkan di Desa Lambaro Seibun sebagian masyarakat kurang tertarik untuk menyalurkan aspirasi dalam forum pengambilan keputusan tentang pembangunan yang akan dilaksanakan di desa mereka.

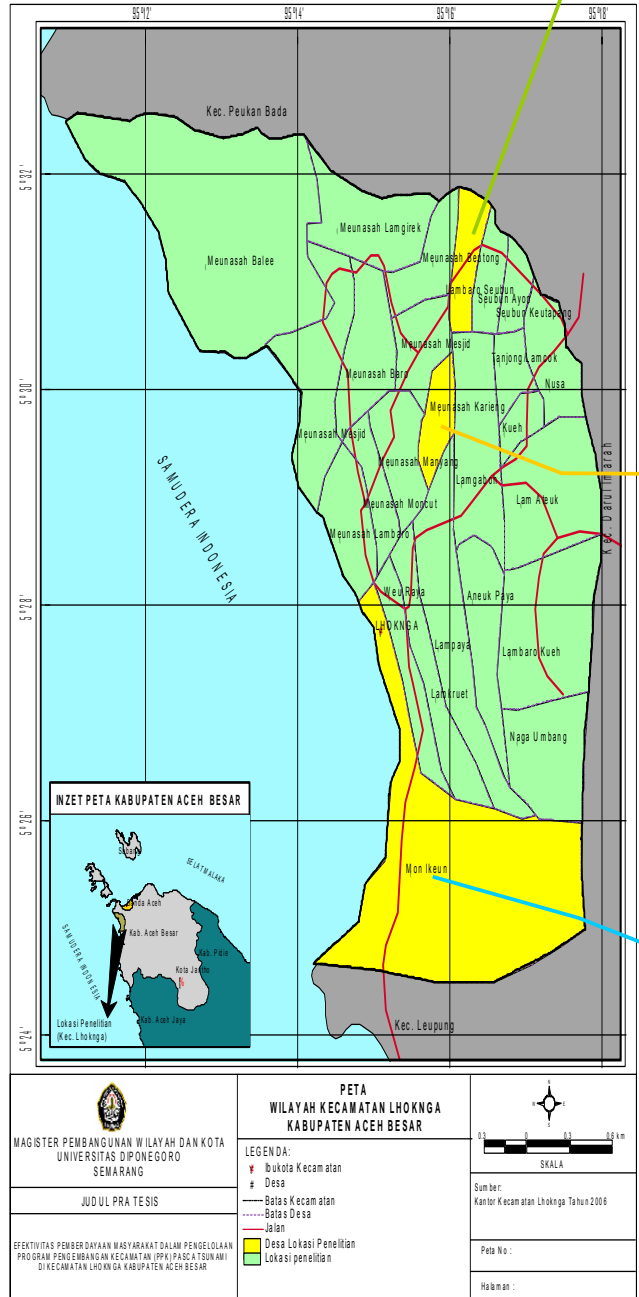
Setelah pelaksanaan PPK, tingkat keinginan masyarakat Mon Ikeun dan Meunasah Karieng untuk menyampaikan aspirasi menjadi lebih tinggi atau masyarakat lebih bersemangat dalam menyampaikan aspirasi, hal ini juga sejalan dengan pelaksanaan PPK yang menekankan perlu adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan dalam setiap tahapan pembangunan. Namun tingkat keinginan masyarakat Lambaro Seibun untuk menyampaikan aspirasi melalui forum musyawarah pembangunan masih tetap rendah sebagian besar masyarakat kurang mampu menyampaikan aspirasi, hanya perangkat desa atau orang-orang tertentu saja yang sering mengeluarkan pendapat.

Sementara itu terkait dengan akses penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat Mon Ikeun dan Lambaro Seubun melalui partai politik (parpol) atau lembaga legislatif (DPRD) sebelum dan setelah pelaksanaan PPK pasca tsunami berada masih kurang atau masyarakat hampir tidak pernah menyalurkan aspirasi melalui parpol/DPRD karena masyarakat masih kurang paham cara mengakses ke jalur politik dan jikapun ada masyarakat yang menyalurkan aspirasi ke parpol atau DPRD biasanya kurang mendapat respon. Sedangkan untuk masyarakat Meunasah Karieng juga kurang atau jarang menyalurkan aspirasi melalui lembaga tersebut.

Dari penjelasan beberapa jenis dukungan lingkungan masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum PPK pasca tsunami dukungan bagi masyarakat Mon Ikeun dalam pengelolaan pembangunan agak memadai, setelah PPK masih tetap sama kecuali jaringan kerja menjadi memadai. Sedangkan dukungan dalam hal ketersediaan layanan masyarakat, informasi, pengambilan keputusan dan penyampaian aspirasi masyarakat Lambaro Seubun masih kurang, untuk keterkaitan, organisasi dan jaringan kerja dan kualitas kepemimpinan agak memadai, setelah PPK masih sama kecuali layanan masyarakat agak memadai dan jaringan kerja menjadi memadai.

Sementara dukungan lingkungan masyarakat Meunasah Karieng sebelum PPK pasca tsunami dalam pengelolaan pembangunan agak memadai kecuali untuk kualitas kepemimpinan memadai, setelah PPK semua meningkat kecuali pengembangan informasi masih relatif sama. Untuk analisis tingkat dukungan lingkungan masyarakat pasca tsunami pada tiga desa dalam bentuk tampilan peta lokasi (*spasial*) dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut.

Analisis Tingkat Dukungan Lingkungan Masyarakat



LAMBARO SEUBUN
 (Kegiatan PPK Pasca Tsunami :
 Pemagaran Areal Sawah)

Sebelum PPK :
 Tngkt ketersediaan layanan masy., informasi, berkurangnya rintangan dan kekuatan politik : rendah, sdngkn keterkaitan, organisasi jaringan kerja dan kepemimpinan : sedang.

Setelah PPK :
 Layanan masyarakat : sedang, jaringan kerja : tinggi dan yag lain msh sama.

Hasil analisis :
 Semua jenis dkgng lingkungan masy blm memadai kecuali jaringan kerja.

MEUNASAH KARIENG
 (Kegiatan PPK Pasca Tsunami :
 Pembangunan Gedung TPA)

Sebelum PPK :
 Tgkt dukungan lingkungan : sedang, kecuali kepemimpinan : tinggi .

Setelah PPK :
 Semua menjadi : tinggi kecuali informasi dan kekuatan politik : sedang.

Hasil analisis :
 Fokus peningkatan pd pengembangan Informasi dan kekuatan politik.

MON IKEUN
 (Kegiatan PPK Pasca Tsunami :
 Pembangunan Jalan & Saluran)

Sebelum PPK :
 Tngkt semua dukungan lingk. masyarakat : sedang

Setelah PPK :
 Msh tetap sama kecuali jaringan kerja : tinggi.

Hasil analisis :
 Semua jenis dukungan lingkungan masy belum memadai kecuali jaringan kerja.

Sumber: Hasil analisis, 2007

GAMBAR 4.2
TINGKAT DUKUNGAN LINGKUNGAN MASYARAKAT PASCA
TSUNAMI SEBELUM DAN SETELAH PELAKSANAAN PPK

4.2.3 Analisis Tingkat Semangat Pengorbanan Masyarakat

Semangat pengorbanan masyarakat yang dimaksudkan adalah semangat berbagi ide, toleransi, tingkat kedermawanan, tolong menolong, hubungan kekerabatan dan gotong royong sebagai dukungan bagi peningkatan hubungan kerjasama antara sesama masyarakat yang meliputi : *mendahulukan kepentingan umum, kesamaan nilai dan persatuan.*

Skor untuk tingkat semangat pengorbanan masyarakat diperoleh dari hasil pengolahan data (perhitungan rata-rata) survey tingkat semangat pengorbanan masyarakat sebelum dan setelah pengelolaan PPK pasca tsunami di tiga desa, berdasarkan rekapitulasi jawaban 18 orang responden dari masing-masing desa.

Adapun skor tingkat semangat pengorbanan masyarakat dari ketiga desa lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel IV.4 berikut:

TABEL IV.4
TINGKAT SEMANGAT PENGORBANAN MASYARAKAT
PASCA TSUNAMI

No.	Jenis Semangat Pengorbanan Masyarakat	Tingkatan untuk Semangat Pengorbanan Masyarakat					
		Kelurahan Mon Ikeun		Desa Lambaro Seubun		Desa Meunasah Karieng	
		Sebelum PPK	Setelah PPK	Sebelum PPK	Setelah PPK	Sebelum PPK	Setelah PPK
1.	Mendahulukan Kepentingan Umum	2,89	2,94	3,83	3,94	3,39	4,22
2.	Kesamaan Nilai	2,39	2,39	2,39	2,56	2,72	3,06
3.	Persatuan	2,78	2,83	3,00	3,06	3,39	4,00

Sumber: Hasil pengolahan data dari kuesioner kondisi semangat pengorbanan masyarakat, 2007

Keterangan angka: 1,00 – 2,33 : rendah; 2,34 – 3,66 : sedang; 3,66 - 5 : tinggi.

Berdasarkan data dari tabel di atas, maka untuk dapat memahami tingkat kondisi pemberdayaan masyarakat dari masing-masing jenis semangat pengorbanan masyarakat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

4.2.3.1 Analisis Kemauan Masyarakat dalam Mendahulukan Kepentingan Umum

Sebelum dan setelah pelaksanaan PPK pasca tsunami tingkat kedermawanan, gotong royong, tolong menolong dan hubungan kekerabatan dalam kehidupan masyarakat Mon Ikeun hanya seadanya, jiwa sosial masyarakat Mon Ikeun pasca tsunami telah sedikit bergeser, kepentingan pribadi sering menjadi prioritas, hanya sebagian masyarakat mau berkorban untuk kepentingan umum dan yang lainnya lebih mementingkan kepentingan pribadi. Sementara itu sebagian besar masyarakat Lambaro Seibun dan Meunasah Karieng peduli dengan kepentingan umum. Sikap saling tolong menolong dan hubungan kekerabatan yang erat telah dimiliki sejak lama oleh masyarakat Lambaro Seibun, demikian juga dengan jiwa sosial dan kerukunan telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Meunasah Karieng.

Semangat mendahulukan kepentingan umum merupakan modal sosial (*sosial capital*) masyarakat untuk mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan masyarakat untuk memberi pengaruh yang lebih besar bagi upaya peningkatan taraf hidup. Jiwa sosial masyarakat Mon Ikeun yang masih agak kurang dapat mempengaruhi kemauan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan pembangunan sarana prasarana umum terutama untuk upaya pengontrolan/pengawasan dan pemeliharaan sarana prasarana.

4.2.3.2 Analisis Kesiediaan Memberikan Ide Kreatif (Kesamaan Nilai) dalam Kehidupan Masyarakat

Sebelum dan setelah pelaksanaan PPK pasca tsunami, jarang muncul inisiatif atau ide-ide kreatif (misalnya ide pengumpulan dana untuk pembangunan,

menjaga keamanan dan kebersihan desa dan lain-lain) yang disumbangkan untuk kepentingan masyarakat di Kelurahan Mon Ikeun dan Lambaro Seibun. Kondisi Kelurahan Mon Ikeun belum sepenuhnya pulih, sampai saat ini untuk pembangunan rumah saja masih ada yang dalam proses pembangunan sehingga belum dapat berinteraksi sepenuhnya. Sementara untuk masyarakat Lambaro Seibun, biasanya keinginan untuk membagi ide muncul apabila berkaitan dengan kegiatan keagamaan seperti pembangunan meunasah dan peringatan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di Desa Meunasah Karieng agak mudah ditemui munculnya inisiatif atau ide-ide kreatif, kemauan untuk membagi ide muncul terkait dengan adanya keinginan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan di desa, namun kadang-kadang ide dari masyarakat kurang ditanggapi sehingga keaktifan masyarakat menjadi berkurang.

4.2.3.3 Analisis Sikap Toleransi dan Saling Berbagi dalam Masyarakat (Persatuan)

Sebelum dan setelah pelaksanaan PPK pasca tsunami, masyarakat Mon Ikeun, Lambaro Seibun dan Meunasah Karieng telah memiliki sikap saling berbagi dan toleransi terhadap masyarakat yang berbeda (usia, status, jenis kelamin dan pendapatan), sikap saling menghormati dan menghargai orang lain dalam mewujudkan kebersamaan dan kenyamanan di masyarakat.

Setelah pelaksanaan PPK, kemauan masyarakat untuk saling berbagi dan toleransi terhadap masyarakat menjadi lebih meningkat, namun untuk masyarakat Mon Ikeun masih agak kurang memadai. Masyarakat Meunasah Karieng mempunyai rasa sosial yang tinggi dan selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik sesama manusia, sebagaimana yang diperintahkan oleh agama.

Dari penjelasan tingkat semangat pengorbanan masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum dan setelah PPK pasca tsunami masyarakat Mon Ikeun kurang peduli bagi kepentingan umum, untuk berbagi ide agak memadai dan sikap toleransi masih kurang. Sedangkan untuk Lambaro Seubun sebelum dan setelah PPK pasca tsunami masyarakat punya kepedulian yang besar bagi kepentingan umum, untuk berbagi ide masih kurang dan toleransi agak memadai. Sementara untuk masyarakat Meunasah Karieng sebelum PPK cukup peduli dengan kepentingan umum, toleransi dan berbagi ide agak memadai, setelah kepedulian dan toleransi menjadi tinggi dan berbagi ide masih sama.

Untuk analisis tingkat semangat pengorbanan masyarakat pasca tsunami di tiga desa dalam bentuk tampilan peta lokasi (*spasial*) dapat dilihat pada gambar 4.3.

4.3 Analisis Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PPK Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga.

Efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami dinilai berdasarkan peningkatan potensi masyarakat, dukungan lingkungan masyarakat dan semangat pengorbanan masyarakat setelah PPK dan dihubungkan dengan karakteristik masyarakat serta proses pemberdayaan dalam PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga. Secara kuantitatif dinilai dari besarnya selisih rata-rata tingkat kondisi masyarakat setelah PPK yang dikurangi dengan kondisi sebelum PPK pasca tsunami dan juga dari besarnya persentase jumlah responden yang menyatakan *ada hubungan* antara peningkatan kondisi masyarakat tersebut dengan PPK pasca tsunami. (*Catatan: jika selisih kondisi pemberdayaan masyarakat $\geq 0,5$ dan persentase responden $\geq 50\%$ maka pemberdayaan cukup efektif dan jika salah satunya tidak terpenuhi maka kurang efektif*).

Analisis Tingkat Semangat Pengorbanan Masyarakat

LAMBARO SEUBUN (Kegiatan PPK Pasca Tsunami : Pemagaran Areal Sawah)

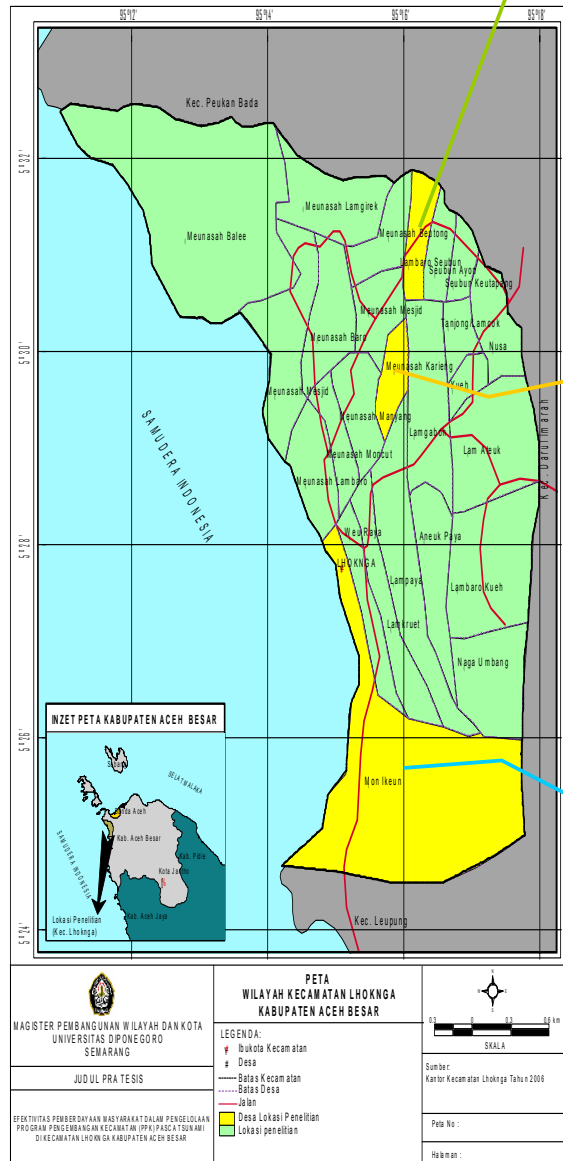
Sblm PPK :
Tingkatan mendahulukan kepentingan umum : tinggi, berbagi ide : rendah dan persatuan : sedang
Stlh PPK :
Tingkatan semua semangat pengorbanan masyarakat msh sama.
Hasil analisis :
Berbagi ide dan persatuan belum memadai msh perlu peningkatan.

MEUNASAH KARIENG (Kegiatan PPK Pasca Tsunami : Pembangunan Gedung TPA)

Sblm PPK :
Tingkatan mendahulukan kepentingan umum, persatuan dan berbagi ide : sedang.
Stlh PPK :
Mendahulukan kepentingan umum dan persatuan : tinggi & berbagi ide : sedang.
Hasil analisis :
Berbagi ide belum memadai msh perlu peningkatan.

MON IKEUN (Kegiatan PPK Pasca Tsunami : Pembangunan Jalan dan Saluran)

Sblm PPK :
Tingkatan mendahulukan kepentingan umum, persatuan dan berbagi ide : sedang
Stlh PPK :
Semuanya msh sama.
Hasil analisis :
Semua jenis semangat pengorbanan masy belum memadai msh perlu peningkatan.



Sumber: Hasil analisis, 2007

GAMBAR 4.3
TINGKAT SEMANGAT PENGORBANAN MASYARAKAT PASCA
TSUNAMI SEBELUM DAN SETELAH PELAKSANAAN PPK

Untuk selanjutnya efektivitas pemberdayaan masyarakat akan dianalisis berdasarkan kondisi dari masing-masing desa lokasi penelitian, sebagai berikut:

4.3.1 Analisis Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mon Ikeun.

Efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kelurahan Mon Ikeun diperoleh berdasarkan hasil survey tingkat kondisi masyarakat dengan menggunakan kuesioner yang diisi oleh 18 orang responden pelaku PPK di Kelurahan Mon Ikeun, selanjutnya dari hasil pengolahan data terhadap jawaban responden tersebut diperoleh data efektivitas pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mon Ikeun seperti pada tabel IV.5 berikut:

TABEL IV.5
EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN PPK (PEMBANGUNAN JALAN DAN SALURAN) PASCA
TSUNAMI DI KELURAHAN MON IKEUN

No.	Jenis Variabel Kondisi Masyarakat	Peningkatan Kondisi Masyarakat	Persentase Jumlah Responden Yang Menyatakan Ada Hub. dgn PPK Pasca Tsunami (%)	Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam PPK Pasca Tsunami
A. Potensi Masyarakat				
1.	Percaya diri	1,00	72,22	Cukup efektif
2.	Komunikasi	0,61	61,11	Cukup efektif
3.	Keahlian	0,53	45,68	Kurang efektif
4.	Kepercayaan	0,23	27,76	Kurang efektif
5.	Kekayaan	0,19	33,34	Kurang efektif
B. Dukungan Lingkungan Masyarakat				
6.	Layanan masyarakat	0,56	63,89	Cukup efektif
7.	Informasi	0,11	44,44	Kurang efektif
8.	Keterkaitan	0,17	44,44	Kurang efektif
9.	Rintangannya	0,44	55,56	Kurang efektif
10.	Kepemimpinan	-0,11	5,56	Kurang efektif
11.	Jaringan kerja	1,33	72,22	Cukup efektif
12.	Organisasi	0,17	27,78	Kurang efektif
13.	Kekuatan politik	0,35	43,06	Kurang efektif
C. Semangat Pengorbanan Masyarakat				
14.	Mendahulukan Kepentingan umum	0,05	11,11	Kurang efektif
15.	Kesamaan nilai	0,00	5,56	Kurang efektif
16.	Persatuan	0,05	11,11	Kurang efektif

Sumber: Hasil analisis, 2007

Jadi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga cukup efektif terhadap peningkatan percaya diri masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang timbul akibat tsunami, kemampuan komunikasi masyarakat dalam forum pembangunan, ketersediaan dan akses layanan masyarakat dan jaringan kerja masyarakat di Kelurahan Mon Ikeun.

Kondisi itu terkait dengan adanya dana pembangunan dari PPK untuk pembangunan jalan dan saluran yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya (perencanaan, kompetisi pendanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemeliharaan) serta adanya forum musyawarah di desa dan kecamatan yang dapat menjadi sarana membina komunikasi diantara masyarakat.

Prasarana jalan dan saluran sebagai prasarana dasar wilayah yang dibutuhkan publik untuk menunjang kelancaran aktivitas masyarakat, sehingga adanya pembangunan jalan dan saluran memberikan dampak yang cukup besar terhadap ketersediaan dan akses fasilitas layanan masyarakat Mon Ikeun.

Proses pemberdayaan masyarakat dalam PPK pasca tsunami kurang efektif dalam meningkatkan kemampuan manajemen dan organisasi masyarakat, rasa kepercayaan di antara sesama masyarakat, kekayaan (pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat), pengembangan informasi, keterkaitan antara masyarakat dengan pemerintah, berkurangnya rintangan dalam pengambilan keputusan, kekuatan politik dan semangat pengorbanan masyarakat Mon Ikeun.

Proses pemberdayaan masyarakat dalam PPK pasca tsunami menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pelatihan di bidang fasilitasi masyarakat dalam penyampaian gagasan, identifikasi permasalahan, pembuatan

peta potensi desa, penyusunan program, pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan. Selain itu masyarakat juga mendapatkan pelatihan tentang hal-hal teknis berupa pembuatan gambar, desain dan RAB pembangunan sarana dan prasarana. Proses pemberdayaan tersebut cukup efektif untuk meningkatkan kemampuan teknis, namun masih kurang efektif dalam meningkatkan kemampuan manajemen dan organisasi. Faktor belum pulihnya kondisi pemukiman dan kurangnya kepedulian masyarakat berdampak bagi aktivitas masyarakat dalam mengelola pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami belum bisa maksimal.

Adanya transparansi dalam pengelolaan PPK pasca tsunami berupa sosialisasi program dan penyediaan papan informasi di desa dan kecamatan belum berdampak signifikan terhadap tumbuhnya rasa kepercayaan dan kesadaran pengembangan informasi bagi masyarakat Mon Ikeun. Di luar kegiatan PPK masyarakat masih agak sulit mengakses informasi karena kurangnya kemauan pihak komite pembangunan Kelurahan Mon Ikeun untuk menginformasikan tentang kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat.

Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu, mau dan mampu mengambil peran dalam pembangunan dan mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) terhadap akses sumber daya keuangan dan non keuangan untuk peningkatan taraf hidup. Sementara itu pemberdayaan dalam PPK kurang memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat di Mon Ikeun yang kondisinya agak kurang memadai sebelum PPK pasca tsunami, hal ini dikarenakan jenis kegiatan PPK berupa penyediaan prasarana jalan dan saluran tidak mendukung secara langsung terhadap kemampuan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan.

Insentif yang diterima masyarakat pada saat pembangunan jalan dan saluran hanya bersifat sementara, sehingga tidak memberikan keberlanjutan bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Sementara itu keaktifan pelaku PPK yang bertindak cepat dan tepat mendorong masyarakat untuk memberikan swadaya berupa lahan untuk pembangunan jalan dan saluran.

Berkaitan dengan kekuatan politik atau kemauan masyarakat di Kelurahan Mon Ikeun untuk menyampaikan aspirasi dalam forum musyawarah pembangunan, masyarakat mau menyampaikan aspirasi melalui forum musyawarah namun untuk penyampaian aspirasi melalui jalur politik masih kurang, masyarakat hampir tidak pernah menyalurkan aspirasi melalui parpol/DPRD karena mereka masih kurang paham cara mengakses ke jalur politik dan kurang mendapat respon. Kekuatan politik dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mengakses sumberdaya yang mereka butuhkan.

Adanya semangat pengorbanan masyarakat desa berupa saling tolong menolong dalam hidup bermasyarakat menjadi simbol kerukunan desa yang harus dijaga dan diberdayakan. Namun pasca tsunami, sebagian masyarakat di Kelurahan Mon Ikeun lebih mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan bersama, bisa jadi hal ini sebagai imbas dari keterpurukan masyarakat yang harus berusaha menghimpun kekuatan untuk kembali mencari nafkah bagi diri dan keluarganya. Jiwa sosial masyarakat yang agak kurang dalam kehidupan masyarakat Mon Ikeun belum meningkat setelah adanya PPK pasca tsunami. Kondisi ini berkaitan dengan pengelolaan PPK yang fokus pada penyediaan sarana prasarana yang dikelola masyarakat dan kurang intens terhadap penguatan di bidang

sosial, yang diutamakan dalam PPK adalah pembangunan prasarana dapat berjalan dengan lancar.

Proses pendampingan dan pengawasan dalam PPK dilakukan sejak tahap perencanaan sampai selesai pelaksanaan pembangunan, jadi masyarakat bisa mengikuti mekanisme program PPK tetapi belum muncul inisiatif untuk menerapkan pengetahuan dari PPK pada kegiatan lain dalam kehidupan masyarakat.

4.3.2 Analisis Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lambaro Seibun

Efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Desa Lambaro Seibun diperoleh berdasarkan pengolahan data hasil survey dengan menggunakan kuesioner. Adapun data tersebut seperti tertera pada tabel IV.6 berikut:

TABEL IV.6
EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN PPK (PEMAGARAN AREAL SAWAH) PASCA
TSUNAMI DI DESA LAMBARO SEUBUN

No.	Jenis Variabel Kondisi Masyarakat	Peningkatan Kondisi Masyarakat	Persentase Jumlah Responden Yang Menyatakan Ada Hub. dgn PPK Pasca Tsunami (%)	Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam PPK Pasca Tsunami
A. Potensi Masyarakat				
1.	Percaya diri	1,22	66,67	Cukup efektif
2.	Komunikasi	0,55	72,22	Cukup efektif
3.	Keahlian	0,73	73,46	Cukup efektif
4.	Kepercayaan	0,22	61,11	Kurang efektif
5.	Kekayaan	1,11	83,33	Cukup efektif
B. Dukungan Lingkungan Masyarakat				
6.	Layanan masyarakat	0,86	47,23	Kurang efektif
7.	Informasi	0,11	44,44	Kurang efektif
8.	Keterkaitan	0,33	83,33	Kurang efektif
9.	Rintangan	0,22	88,89	Kurang efektif
10.	Kepemimpinan	0,00	11,11	Kurang efektif
11.	Jaringan kerja	1,17	27,78	Kurang efektif
12.	Organisasi	0,00	72,22	Kurang efektif
13.	Kekuatan politik	0,35	51,74	Kurang efektif
C. Semangat Pengorbanan Masyarakat				
14.	Mendahulukan	0,11	11,11	Kurang efektif

	Kepentingan umum			
15.	Kesamaan nilai	0,17	55,56	Kurang efektif
16.	Persatuan	0,06	5,56	Kurang efektif

Sumber: Hasil analisis, 2007

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga cukup efektif dalam meningkatkan percaya diri, kemampuan komunikasi, keahlian (kemampuan manajemen, teknis dan organisasi) dan kekayaan (akses terhadap pemanfaatan sumber daya) masyarakat Lambaro Seibun. Adanya penyediaan dana pembangunan melalui PPK pasca tsunami yang digunakan masyarakat untuk membuat pagar areal persawahan dan dikelola oleh masyarakat mulai dari menggali gagasan, menyusun program, membuat usulan, mengikuti kompetisi pendanaan, melaksanakan pembangunan dan memelihara hasil pembangunan yang disertai dengan adanya pendampingan, jiwa sosial masyarakat yang tinggi, dukungan pemimpin di desa serta pelatihan manajemen dan teknis bagi pelaku PPK di Desa Lambaro Seibun memberikan manfaat bagi peningkatan potensi masyarakat. Perekonomian masyarakat juga meningkat karena adanya pemagaran areal sawah yang bermanfaat bagi masyarakat petani dalam menggarap kembali sawah mereka sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sementara itu pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami kurang efektif dalam meningkatkan potensi rasa kepercayaan dalam masyarakat, dukungan lingkungan masyarakat dan semangat pengorbanan masyarakat Desa Lambaro Seibun.

Tumbuhnya rasa kepercayaan merupakan salah satu elemen yang diperlukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pasca tsunami masyarakat Lambaro Seibun masih kurang dalam menumbuhkan rasa kepercayaan di lingkungan mereka. Sikap dan tindakan pengelola pembangunan atau pelaku PPK yang kurang

menginformasikan pengelolaan dana kepada masyarakat desa secara transparan menjadikan rasa kepercayaan masyarakat masih kurang. Pada saat pelaksanaan pembangunan pagar sawah, ketua TPK masih mengungsi ke desa lain karena kondisi pemukiman masih dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi., kondisi ini menjadikan komunikasi dengan masyarakat sedikit terkendala. Pengembangan informasi juga masih menjadi kendala bagi masyarakat Lambaro Seubun, mereka menyatakan bahwa mereka belum tahu jalur untuk mengakses informasi program pembangunan yang berhubungan dengan peningkatan taraf hidup mereka.

Menurut UU No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, pengertian prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (*spatial space*) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Kejadian tsunami telah memporakporandakan sarana prasarana di Kecamatan Lhoknga sehingga nyaris tidak berfungsi. Begitu juga dengan kondisi Lambaro Seubun, pemberdayaan masyarakat dalam PPK yang berupa penyediaan dana pembangunan sarana prasarana masih kurang efektif dalam meningkatkan layanan masyarakat karena jumlah dana yang tersedia melalui PPK kecil jika dibandingkan dengan kerusakan yang terjadi akibat tsunami.

Upaya pemberdayaan masyarakat bermuara kepada kemandirian, dan hal ini tidak berarti masyarakat harus menutup diri terhadap pihak luar. Kemampuan masyarakat membentuk jaringan kerja atau menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar merupakan bagian dari proses menuju kepada kemandirian. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, hal

ini berarti masyarakat punya *power* atau daya untuk meraih sesuatu yang terbaik bagi kehidupannya dan salah satu cara untuk mewujudkan hal itu dengan membangun hubungan kerjasama. Jaringan kerja masyarakat Lambaro Seibun berjalan karena banyaknya pihak luar yang peduli dengan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kecamatan Lhoknga serta adanya sikap masyarakat yang terbuka bagi pihak luar dalam memulihkan kondisi akibat tsunami.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya untuk pengembangan aktivitas ekonomi, melainkan juga menyangkut bidang politik atau pengambilan keputusan dari suatu kebijakan. Masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan jika diberi kesempatan dan di sisi lain masyarakat juga harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Setelah PPK pasca tsunami, keinginan masyarakat Lambaro Seibun untuk menyampaikan aspirasi melalui forum musyawarah pembangunan masih tetap rendah, hal itu disebabkan oleh kualitas individu yang agak rendah dan juga aspirasi yang disampaikan kurang mendapat tanggapan. Demikian juga dengan kemauan masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi melalui partai politik (parpol) atau lembaga legislatif (DPRD) sebelum dan setelah PPK pasca tsunami sangat kurang. Tingkat kekuatan politik masyarakat Lambaro Seibun yang masih rendah memerlukan pendampingan atau bimbingan yang intensif .

Adanya keterlibatan masyarakat dalam PPK pasca tsunami yang secara bersama-sama mengelola dana PPK pasca tsunami masih kurang efektif dalam meningkatkan jiwa sosial atau semangat pengorbanan masyarakat Lambaro Seibun yang sudah agak memadai. Di Desa Lambaro Seibun orientasi tolong menolong telah bergeser kepada kegiatan yang punya nilai ekonomis tidak murni kegiatan

sosial. Selain itu kemauan masyarakat dalam menyumbangkan ide-ide kreatif atau inisiatif untuk kepentingan bersama juga kurang dipengaruhi oleh adanya upaya pemberdayaan masyarakat dalam PPK, biasanya ide kreatif masyarakat muncul bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan.

4.3.3 Analisis Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Desa Meunasah Karieng

Efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Desa Meunasah Karieng dinilai berdasarkan hasil survey dengan menggunakan kuesioner yang diisi oleh 18 orang responden pelaku PPK di Desa Meunasah Karieng, selanjutnya data efektivitas pemberdayaan masyarakat dari hasil pengolahan data survey seperti pada tabel IV.7. berikut:

TABEL IV.7
EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN PPK (PEMBANGUNAN GEDUNG TPA) PASCA
TSUNAMI DI DESA MEUNASAH KARIENG

No.	Jenis Variabel Kondisi Masyarakat	Peningkatan Kondisi Masyarakat	Persentase Jumlah Responden Yang Menyatakan Ada Hub. dgn PPK Pasca Tsunami (%)	Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam PPK Pasca Tsunami
A. Potensi Masyarakat				
1.	Percaya diri	0,88	83,33	Cukup efektif
2.	Komunikasi	0,72	77,78	Cukup efektif
3.	Keahlian	0,63	66,05	Cukup efektif
4.	Kepercayaan	0,39	38,89	Kurang efektif
5.	Kekayaan	0,39	47,22	Kurang efektif
B. Dukungan Lingkungan Masyarakat				
6..	Layanan masyarakat	0,81	47,22	Kurang efektif
7.	Informasi	0,39	66,67	Kurang efektif
8.	Keterkaitan	0,50	66,67	Cukup efektif
9.	Rintangan	0,67	61,11	Cukup efektif
10.	Kepemimpinan	0,22	38,89	Kurang efektif
11.	Jaringan kerja	1,00	44,44	Kurang efektif
12.	Organisasi	0,56	50,00	Cukup efektif
13.	Kekuatan politik	0,56	48,61	Kurang efektif
C. Semangat Pengorbanan Masyarakat				
14.	Mendahulukan Kepentingan umum	0,83	50,00	Cukup efektif

15.	Kesamaan nilai	0,34	72,22	Kurang efektif
16.	Persatuan	0,61	33,33	Kurang efektif

Sumber: Hasil analisis, 2007

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami cukup efektif bagi meningkatnya potensi percaya diri, kemampuan komunikasi, keahlian masyarakat, keterkaitan antara masyarakat dengan pemerintah, mengurangi rintangan dalam pengambilan keputusan pembangunan, meningkatkan kelengkapan organisasi pengelola pembangunan dan sikap mendahulukan kepentingan umum di Desa Meunasah Karieng.

Adanya upaya pemberdayaan masyarakat melalui PPK pasca tsunami berupa penyediaan dana pembangunan untuk pembangunan gedung TPA, pemberian kesempatan bagi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya, pelaksanaan pelatihan yang diikuti oleh pelaku PPK, dan pembentukan organisasi pengelola PPK pasca tsunami memberikan dampak bagi meningkatnya kondisi pemberdayaan masyarakat di Meunasah Karieng.

Adanya pemimpin dan pengelola PPK yang berkualitas, kemauan masyarakat untuk peduli terhadap kepentingan umum dan pelaksanaan pembangunan di lingkungan mereka meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut dalam pengambilan keputusan pembangunan desa sehingga rintangan/intervensi pihak luar dapat dikurangi.

Sementara itu pemberdayaan masyarakat dalam PPK tersebut kurang efektif bagi peningkatan rasa kepercayaan, kemampuan masyarakat untuk memperoleh mata pencaharian dan memanfaatkan sumber daya masyarakat/desa bagi pembangunan, peningkatan fasilitas layanan masyarakat, pengembangan informasi,

kualitas kepemimpinan, jaringan kerja, kekuatan politik, kesamaan nilai dan persatuan bagi masyarakat di Meunasah Karieng.

Rasa kepercayaan antara sesama masyarakat dan terhadap pemimpin telah berkembang dan menjadi budaya di dalam kehidupan masyarakat Meunasah Karieng sehingga adanya PPK pasca tsunami kurang berpengaruh bagi peningkatan rasa kepercayaan dalam masyarakat.

Selain itu pelaksanaan PPK belum mampu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh mata pencaharian dan memanfaatkan sumber daya masyarakat/desa bagi pembangunan. Pembangunan sarana gedung TPA bermanfaat bagi kegiatan pendidikan agama sehingga tidak secara langsung menunjang perekonomian masyarakat Meunasah Karieng tetapi kondisi perekonomian masyarakat tersebut sudah agak memadai.

Demikian juga dengan penyediaan fasilitas layanan masyarakat, untuk jangka waktu satu kali siklus PPK maka ketersediaan dana untuk pembangunan sarana prasarana melalui PPK pasca tsunami sangat terbatas, namun masyarakat dapat melaksanakan pembangunan dengan adanya dana dari pemerintah dan menjalin kerjasama dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan NGO yang peduli dengan pembangunan kembali daerah bencana.

Upaya pengembangan informasi pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi program pada setiap tingkatan pemerintahan dan penyediaan papan informasi tentang pengelolaan dana dan perkembangan pelaksanaan kegiatan PPK pasca tsunami belum mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan informasi di Meunasah Karieng. Masyarakat belum mempunyai inisiatif untuk mengembangkan media informasi pembangunan yang terbuka untuk

umum karena di luar PPK akses masyarakat terhadap informasi pembangunan desa masih kurang.

Salah satu elemen pemberdayaan masyarakat lainnya yang perlu dimiliki masyarakat adalah jiwa kepemimpinan. Pemimpin masyarakat yang berkualitas akan mampu mengorganisir dan membangkitkan motivasi masyarakat untuk membangun diri dan lingkungannya. Sebenarnya masyarakat cukup menyadari hal tersebut, oleh karenanya dalam memilih pemimpin di desa masyarakat betul-betul selektif terhadap kualitas individu dari calon pemimpin.

Demikian juga dengan anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai pengelola pembangunan di desa/kelurahan adalah orang-orang yang punya integritas tinggi, sehingga yang menjadi pelaku PPK mayoritas berpendidikan tinggi dan memiliki kemandirian dalam mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Kualitas individu mereka telah cukup baik sehingga mendukung kelancaran penyediaan sarana prasarana di desa dan mengurangi ketergantungan pada fasilitator yang berasal dari pihak konsultan.

Kekuatan politik masyarakat Meunasah Karieng agak memadai, dengan adanya PPK pasca tsunami tingkat keinginan masyarakat Meunasah Karieng untuk menyampaikan aspirasi menjadi lebih tinggi atau masyarakat lebih bersemangat dalam menyampaikan aspirasi, tetapi keinginan untuk menyampaikan ide melalui parpol atau DPRD masih kurang. Kondisi ini disebabkan masyarakat kurang terbiasa memanfaatkan keberadaan parpol atau DPRD untuk memperjuangkan aspirasinya.

Kondisi pemukiman yang stabil, perekonomian masyarakat yang agak memadai dan jiwa sosial yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat Meunasah

Karieng telah berada pada tingkatan pemberdayaan yang mendekati tinggi sehingga masyarakat lebih menaruh perhatian pada bidang pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan dasar dan inisiatif untuk mengambil peran dalam pembangunan, namun masyarakat masih belum mampu mengembangkan informasi yang berhubungan dengan pembangunan.

4.4 Sintesa Hasil Analisis

4.4.1 Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PPK Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga.

Pemberdayaan menyangkut berbagai bidang kehidupan yang meliputi fisik, sosial, ekonomi dan politik sebagaimana yang dikemukakan Suharto (2006:59) bahwa pemberdayaan sebagai tujuan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Hal tersebut sejalan dengan penilaian efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga yang mengkaji dampak dari proses pemberdayaan masyarakat terhadap perubahan kondisi masyarakat dengan menggunakan 16 variabel elemen pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Bartle.

Adapun efektivitas pemberdayaan masyarakat pada ketiga desa lokasi penelitian dalam wilayah Kecamatan Lhoknga terhadap kondisi pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan sebagaimana yang tertera pada tabel IV.8 berikut:

TABEL IV.8
EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN PPK PASCA TSUNAMI DI TIGA DESA DALAM
KECAMATAN LHOKNGA

No.	NAMA DESA/KELURAHAN	Tingkat Kondisi Masyarakat Pasca Tsunami		Peningkatan Kondisi Masyarakat	Persentase Jumlah Responden Yg Menyatakan Ada Hub. dgn PPK Pasca Tsunami (%)	Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam PPK Pasca Tsunami
		Sebelum PPK	Setelah PPK			
1.	MON IKEUN	2,77	3,07	0,30	33,45	Kurang efektif
2.	LAMBARO SEUBUN	2,54	2,93	0,40	48,69	Kurang efektif
3.	MEUNASAH KARIENG	3,13	3,72	0,59	54,37	Cukup efektif
	TOTAL	2,81	3,24	0,43	45,50	KURANG EFEKTIF

Sumber: Hasil analisis, 2007

Dari tabel di atas terlihat bahwa peningkatan kondisi masyarakat secara total untuk Kecamatan Lhoknga setelah PPK pasca tsunami meningkat sebesar $0,43 < 0,50$ dan persentase responden yang menyatakan ada hubungan antara peningkatan tersebut dengan PPK pasca tsunami sebesar $45,50 \% < 50 \%$ hal ini berarti pemberdayaan dalam PPK pasca tsunami kurang efektif terhadap peningkatan kondisi pemberdayaan masyarakat.

Adanya dukungan dana, pelatihan atau peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat pelaku PPK, dan pendampingan bagi masyarakat yang ikut terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan PPK pasca tsunami hanya efektif untuk meningkatkan potensi percaya diri, komunikasi, keahlian (kemampuan manajemen, teknis, dan organisasi) dan akses pemanfaatan sumber daya

masyarakat, serta ketersediaan fasilitas layanan masyarakat. Sedangkan untuk kondisi lainnya kurang efektif, karena masyarakat masih kurang mampu memanfaatkan peluang untuk mengembangkan diri dan lingkungan masyarakat yang ada dalam mekanisme PPK secara baik atau dengan masyarakat belum mampu mengambil peran yang besar dalam pembangunan.

Untuk Kelurahan Mon Ikeun sebagai desa pantai dengan kerusakan yang sangat parah atau rusak total akibat tsunami dan kegiatan PPK berupa pembangunan jalan dan saluran maka pemberdayaan masyarakat *kurang efektif*. Hal ini disebabkan kondisi lingkungan pemukiman yang pulih dan menjadi hambatan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas bersama. Selain itu karakteristik masyarakat yang tinggal di Mon Ikeun heterogen, hubungan kekerabatan agak renggang, toleransi agak kurang dan jiwa sosial rendah berakibat pada kurangnya kepedulian kepada proses pengelolaan pembangunan terutama untuk kegiatan pemeliharaan dan pengawasan. Potensi ekonomi masyarakat juga kurang meningkat karena kegiatan PPK yang dilaksanakan tidak berhubungan langsung dengan bidang perekonomian, meskipun demikian pada saat pembangunan jalan dan saluran PPK masyarakat mendapatkan insentif sebagai tenaga kerja sehingga sedikit membantu perekonomian keluarga. Demikian juga dengan kurangnya keterbukaan penyampaian informasi tentang pembangunan yang dilaksanakan di Mon Ikeun menyebabkan motivasi membangun dari masyarakat kurang meningkat.

Untuk peningkatan efektivitas pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mon Ikeun perlu dilakukan upaya mempercepat pemulihan kondisi pemukiman dengan penyediaan prasarana dasar seperti pembangunan rumah sehingga aktivitas/partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat lebih meningkat,

penguatan akses perekonomian masyarakat berupa pelaksanaan kegiatan yang mendukung perekonomian, peningkatan peran tokoh masyarakat atau pemimpin di desa dalam menumbuhkan jiwa sosial masyarakat dan pemberdayaan fasilitator desa agar mampu mendorong keterbukaan penyampaian informasi pembangunan dan peningkatan motivasi masyarakat.

Sedangkan untuk Desa Lambaro Seibun sebagai desa pedalaman atau berbatasan dengan pegunungan mengalami kerusakan yang cukup parah akibat tsunami dan kegiatan PPK berupa pemagaran areal sawah maka pemberdayaan masyarakat *kurang efektif*. Hal ini antara lain disebabkan oleh kelengkapan fasilitas layanan umum masih agak kurang, peran FD yang belum maksimal dalam menjembatani masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan, kurangnya kemampuan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan mengakses informasi pembangunan serta TPK yang kurang transparan dalam menyampaikan informasi tentang pengelolaan dana PPK.

Untuk peningkatan kondisi pemberdayaan masyarakat di Desa Lambaro Seibun perlu adanya bantuan dana untuk penyediaan fasilitas layanan umum, peningkatan pengetahuan/ketrampilan fasilitator desa, memfasilitasi masyarakat untuk terbiasa mengeluarkan pendapat/aspirasi agar mendapatkan haknya dalam penentuan pengambilan keputusan dan mendorong TPK atau pengelola pembangunan desa agar menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat desa.

Selanjutnya untuk masyarakat Meunasah Karieng sebagai desa dataran rendah dengan kerusakan akibat tsunami agak parah maka pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami *cukup efektif* dalam memperkuat

potensi percaya diri, kemampuan komunikasi, peningkatan keahlian (kemampuan manajemen, teknis dan organisasi), keterkaitan dengan pemerintah, berkurangnya rintangan dalam mengambil keputusan pembangunan, kelengkapan organisasi dan jiwa sosial masyarakat. Namun akses untuk peningkatan ekonomi, pengembangan informasi dan keberlanjutan kemauan masyarakat dalam menyampaikan ide kreatif kurang meningkat.

Kondisi cukup efektifnya pemberdayaan masyarakat di Meunasah Karieng didukung oleh karakteristik masyarakat yang telah terorganisir di bawah kepemimpinan Kepala Desa yang memiliki wibawa dan disegani oleh masyarakat, hubungan kekerabatan yang erat, jiwa sosial masyarakat yang tinggi, potensi ekonomi agak memadai, tingkat pendidikan pelaku PPK yang mayoritas tamatan perguruan tinggi, sikap masyarakat yang agak optimis dan adanya kemauan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan pembangunan.

Untuk keberlanjutan pembangunan partisipatif di Desa Meunasah Karieng dibutuhkan adanya kebijakan pemerintah yang mendukung kemandirian masyarakat desa dalam mempertahankan sisi-sisi positif atau *power* masyarakat dalam mengelola pembangunan seperti penyediaan dana alokasi desa. Selain itu juga keberadaan lembaga/organisasi pengelola pembangunan PPK seperti TPK, FD dan Tim Pemelihara Kegiatan dan tokoh-tokoh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi wakil masyarakat dalam forum Musyawarah Antar Desa juga perlu dipertahankan. Sementara untuk pengembangan informasi diperlukan adanya media informasi pembangunan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Untuk tampilan efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami dalam bentuk *spasial* untuk ketiga desa lokasi penelitian dalam

GAMBAR 4.4
EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN PPK PASCA TSUNAMI DI KECAMATAN LHOKNGA
DAN UPAYA PENINGKATANNYA

4.4.2 Tipologi Keberdayaan Masyarakat.

Menurut Muchdie, dkk. ed. (2001:3-4): "Pembangunan atau pengembangan dalam arti *development*, bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaan yang ditentukan oleh apa yang dimiliki manusianya, dalam hal ini penduduk setempat. Sebaliknya pengembangan itu adalah kemampuan yang ditentukan oleh apa yang dapat mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki, guna meningkatkan kualitas hidupnya dan juga kualitas hidup orang lain. Jadi pengembangan harus diartikan sebagai suatu keinginan untuk memperoleh perbaikan, serta kemampuan untuk merealisasikannya."

Sejalan dengan hal tersebut maka masyarakat perlu mengembangkan keinginan dan kemampuan untuk dapat membangun diri dan lingkungannya. Pengembangan masyarakat dapat dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Sementara itu Sulistiyani (2004:83-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahapan tersebut dibagi dalam 4 tahapan tingkat keberdayaan masyarakat yaitu: tahapan afektif, tahapan kognitif, tahapan psikomotorik dan tahapan konatif.

Tahapan tingkat keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga untuk ketiga desa penelitian tidak sama sehingga tipologi keberdayaan masyarakatnya juga berbeda. Untuk masyarakat Kelurahan Mon Ikeun memiliki kesadaran mengelola pembangunan namun agak kurang peduli terhadap proses pengelolaan pembangunan (tahapan afektif : 2,5) dan mulai

mengembangkan pengetahuan dasar untuk membangun (tahap kognitif : 3), mengembangkan ketrampilan dasar (tahap psikomotorik : 3) serta bersedia terlibat dalam pembangunan tapi aktivitasnya masih agak kurang (tahap konatif : 2,5). Tipologi demikian menunjukkan bahwa kesadaran dan kemauan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan di lingkungannya muncul jika ada yang memotivasi belum tumbuh dari internal masyarakat, sehingga membutuhkan dukungan pihak luar yang lebih difokuskan kepada pengembangan sikap dan tindakan masyarakat untuk dapat berperan optimal dalam pembangunan.

Untuk masyarakat Desa Lambaro Seubun, rasa kepedulian dan kesadaran masyarakat mengelola pembangunan telah tumbuh dan agak berkembang (tahap afektif : 3), telah memiliki pengetahuan dasar (tahap kognitif : 2,5) dan juga ketrampilan dasar (tahap psikomotorik : 2,5) serta bersedia terlibat dalam pembangunan tapi dengan kemampuan yang agak kurang (tahap konatif : 2,5). Tipologi demikian menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan dan ketrampilan dasar tetapi belum dapat dikembangkan sehingga kesempatan atau peluang yang tersedia untuk meningkatkan kemandirian melalui terlibat aktif dalam pembangunan belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Dukungan dan bantuan pihak luar dibutuhkan untuk pengembangan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam mengelola pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan untuk masyarakat Desa Meunasah Karieng, rasa kepedulian dan kesadaran untuk mengelola pembangunan telah berkembang (tahap afektif : 3,5), pengetahuan dasar telah berkembang (tahap kognitif : 3,5) dan juga mulai mengembangkan ketrampilan dasar (tahap psikomotorik : 3) serta berinisiatif untuk mengambil peran dalam pembangunan (tahap konatif : 3). Tipologi

demikian menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki potensi untuk keempat tahapan sehingga memberikan efek yang besar terhadap kapasitas masyarakat dalam mengelola pembangunan untuk mencapai keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat berupa penguatan potensi yang ada berupa dukungan kebijakan dari pemerintah yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan kemandirian dan adanya upaya pelestarian aset pembangunan yang telah dimiliki masyarakat.

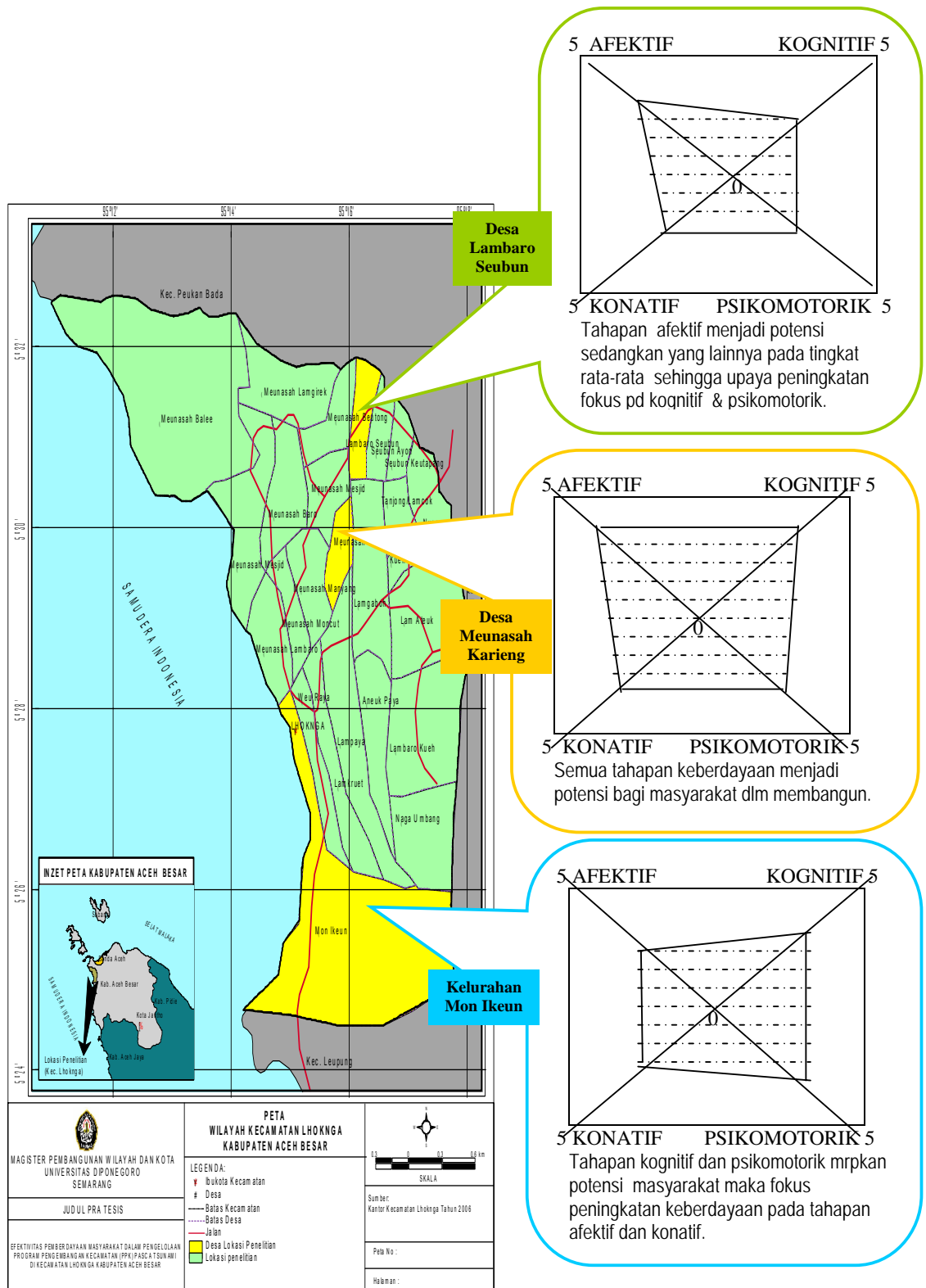
Untuk tampilan tipologi keberdayaan masyarakat pasca tsunami pada ketiga desa lokasi penelitian di Kecamatan Lhoknga dalam bentuk *spasial* dapat dilihat pada peta gambar 4.5 berikut.

Luas kotak persegi yang diarsir pada gambar 4.5 menunjukkan besar atau kecilnya keberdayaan masyarakat untuk masing-masing desa. Desa Meunasah Karieng mempunyai keberdayaan masyarakat yang paling besar dibandingkan dengan keberdayaan masyarakat Mon Ikeun dan Lambaro Seibun.

4.4.3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pembangunan

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga merupakan program pembangunan partisipatif yang menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan pihak konsultan sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Menurut Pearson et al, 1994:106 pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk, berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang

memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.



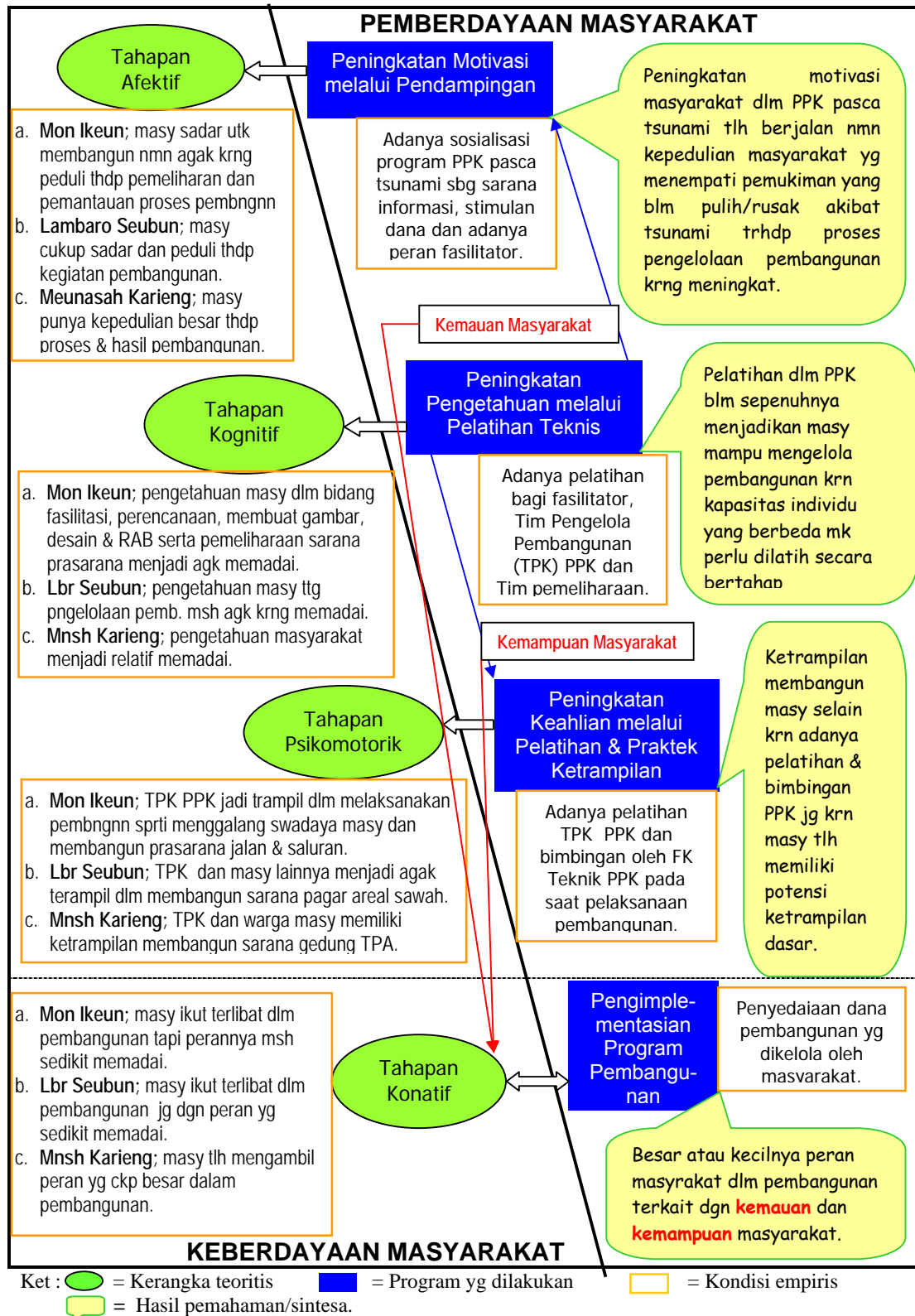
Sumber: Hasil analisis, 2007

GAMBAR 4.5
TIPOLOGI KEBERDAYAAN MASYARAKAT PASCA TSUNAMI DI
KECAMATAN LHOKNGA

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam PPK pasca tsunami bertujuan untuk rekonstruksi sosio kultural masyarakat lokasi bencana, pemberian insentif ekonomi rakyat dan pendapatan keluarga melalui kegiatan padat karya, serta penyediaan dan pemulihan infrastruktur pedesaan. Dari hasil analisis efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga diperoleh bahwa pemberdayaan masyarakat cukup efektif untuk Desa Meunasah Karieng sedangkan untuk Kelurahan Mon Ikeun dan Desa Lambaro Seubun pemberdayaan dalam PPK pasca tsunami kurang efektif bagi peningkatan kondisi masyarakat.

Efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat yang diterapkan, kapasitas pembangunan masyarakat yang terkait dengan tipologi keberdayaan masyarakat, dan kondisi kelengkapan sarana prasarana dasar pemukiman sebagai pendukung kelancaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Untuk masyarakat yang menempati lokasi pemukiman yang belum pulih maka pemberdayaan kurang efektif. Demikian juga untuk masyarakat yang tipologi keberdayaan kurang berpotensi dibidang afektif atau kognitif juga kurang efektif.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara komprehensif dengan cara memperkuat tahapan afektif (sikap), kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik (ketrampilan) masyarakat sehingga berpengaruh kepada tahapan konatif (perilaku) masyarakat untuk dapat berperan secara mandiri dalam membangun diri dan lingkungannya. Gambaran tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan program pembangunan dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut.



GAMBAR 4.6
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN

Berdasarkan gambar 4.6 di atas, untuk peningkatan tahapan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan program pembangunan diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat yang sesuai untuk masing-masing tahapan:

1. Tahapan afektif, menunjukkan kepada rasa kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan peningkatan motivasi masyarakat sebagai hal utama, prosesnya dapat dilakukan melalui pendampingan sehingga masyarakat secara sadar mau terlibat dalam mengidentifikasi permasalahan dan mendiskusikan alternatif pemecahannya secara bersama-sama. Upaya peningkatan motivasi masyarakat dalam PPK pasca tsunami telah berjalan namun kurang mampu meningkatkan kepedulian masyarakat di lokasi pemukiman yang belum pulih karena masyarakat memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar individu masyarakat.
2. Tahapan kognitif, berupa kemampuan pemahaman atau penalaran. Upaya yang perlu dilakukan berupa peningkatan pengetahuan teknis seperti pelaksanaan pelatihan tentang tatacara fasilitasi masyarakat, manajemen pembangunan, administrasi dan pengetahuan teknis konstruksi pembangunan sarana parasarana atau teknis pembukuan dan pemasaran untuk kegiatan ekonomi. Pelatihan dalam PPK belum sepenuhnya menjadikan masyarakat mampu mengelola pembangunan karena dipengaruhi oleh kemampuan dasar individu masyarakat dalam menyerap pengetahuan yang diberikan sehingga perlu pelatihan yang bertahap..
3. Tahapan psikomotorik, berupa kecakapan atau ketrampilan masyarakat. Untuk itu diperlukan peningkatan keahlian masyarakat melalui pelaksanaan pelatihan ketrampilan dengan spesialisasi tertentu yang menunjang kemandirian

masyarakat dalam menjalankan aktivitas pembangunan. Kemampuan masyarakat dalam menguasai ketrampilan selain karena adanya pelatihan dan bimbingan melalui PPK pasca tsunami juga ada hubungannya dengan kapasitas masyarakat yang telah memiliki ketrampilan dasar.

4. Tahapan konatif, berupa tindakan atau perilaku masyarakat untuk dapat mengambil peran dalam pembangunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan langkah penyiapan masyarakat dengan upaya peningkatan tahapan afektif, kognitif dan psikomotorik sehingga membentuk perilaku masyarakat yang mampu mengimplementasikan program pembangunan secara efektif. Besar atau kecilnya peran masyarakat dalam pengelolaan pembangunan terkait dengan kemauan dan kemampuan masyarakat.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penilaian efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga dilakukan dengan menghubungkan proses pemberdayaan masyarakat dalam PPK pasca tsunami dengan perubahan kondisi pemberdayaan masyarakat di tiga desa dalam Kecamatan Lhoknga. Pada dasarnya mekanisme pelaksanaan PPK pasca tsunami telah mengakomodasi terciptanya peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi diri dan lingkungannya. Namun secara umum pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga kurang efektif dalam meningkatkan kondisi pemberdayaan masyarakat di daerah tersebut. Dari hasil analisis diperoleh bahwa untuk Kelurahan Mon Ikeun dan Desa Lambaro Seubun pemberdayaan masyarakat dalam PPK pasca tsunami kurang efektif, sedangkan untuk Meunasah Karieng pemberdayaanya cukup efektif.

Pemberdayaan masyarakat dalam PPK pasca tsunami yang kurang efektif tersebut terutama disebabkan oleh kapasitas masyarakat yang belum mampu mengambil peran yang besar dalam pembangunan. Besar atau kecilnya peran masyarakat dalam membangun ditentukan oleh kemauan dan kemampuan masyarakat. Kemauan masyarakat merupakan perpaduan antara sikap membangun (tahapan afektif) dengan pengetahuan (tahapan kognitif) masyarakat, sedangkan kemampuan merupakan perpaduan antara pengetahuan (tahapan kognitif) dengan ketrampilan (tahapan psikomotorik).

Sejalan dengan hal tersebut maka proses penyiapan masyarakat berupa peningkatan motivasi (pengembangan tahapan afektif), peningkatan wawasan pengetahuan (pengembangan tahapan kognitif) dan peningkatan ketrampilan/keahlian (pengembangan tahapan psikomotorik) menjadi penting dilakukan sebelum program pemberdayaan masyarakat diimplementasikan guna mendukung peran masyarakat (tahapan konatif) dalam pembangunan. Proses penyiapan masyarakat tersebut harus dilakukan secara intensif dan disesuaikan dengan tingkat keberdayaan yang dimiliki masyarakat sehingga implementasi program pembangunan dapat berjalan efektif.

Meskipun secara umum pemberdayaan masyarakat kurang efektif, namun dengan adanya PPK pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga maka percaya diri masyarakat, kemampuan komunikasi dalam forum musyawarah dan kemampuan teknis masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana cukup meningkat bagi ketiga desa lokasi penelitian. Selain itu untuk Kelurahan Mon Ikeun yang kegiatan PPK pasca tsunami berupa pembangunan jalan dan saluran maka unsur layanan masyarakat menjadi cukup meningkat, sedangkan untuk Desa Lambaro Seibun yang kegiatannya berupa pemagaran areal sawah maka potensi ekonomi masyarakat yang cukup meningkat. Sementara itu kemampuan masyarakat menjalin keterkaitan dengan pemerintah, kemampuan organisasi, keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan dan semangat mendahulukan kepentingan umum cukup meningkat untuk Desa Meunasah Karieng yang kegiatannya berupa pembangunan gedung TPA.

Pemberdayaan masyarakat yang kurang efektif di Kelurahan Mon Ikeun yang merupakan desa pantai dengan kerusakan sangat parah atau rusak total akibat

tsunami disebabkan oleh keterbatasan masyarakat dalam melakukan aktivitas bersama, toleransi antar masyarakat yang agak kurang, jiwa sosial yang rendah, kurangnya kepedulian terhadap kepentingan umum dan kurangnya keterbukaan penyampaian informasi tentang pembangunan yang dilaksanakan di Mon Ikeun.

Untuk peningkatan efektivitas pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mon Ikeun perlu dilakukan upaya mempercepat pemulihan kondisi pemukiman dengan penyediaan prasarana dasar seperti pembangunan rumah sehingga aktivitas/partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat lebih meningkat. Selain itu juga diperlukan upaya penguatan akses perekonomian masyarakat berupa pelaksanaan kegiatan yang mendukung perekonomian, peningkatan peran tokoh masyarakat atau pemimpin di desa dalam menumbuhkan jiwa sosial masyarakat dan pemberdayaan fasilitator desa agar mampu mendorong keterbukaan penyampaian informasi pembangunan dan peningkatan motivasi masyarakat.

Sedangkan untuk Desa Lambaro Seibun sebagai desa pedalaman yang mengalami kerusakan cukup parah akibat tsunami pemberdayaannya juga kurang efektif. Hal ini antara lain disebabkan oleh kelengkapan fasilitas layanan umum masih agak kurang, peran FD yang belum maksimal dalam menjembatani masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan, kurangnya kemampuan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan mengakses informasi pembangunan serta kurangnya transparansi TPK dalam menyampaikan informasi tentang pengelolaan dana PPK kepada masyarakat.

Untuk peningkatan kondisi pemberdayaan masyarakat di Desa Lambaro Seibun diperlukan adanya bantuan dana untuk penyediaan fasilitas layanan umum, peningkatan pengetahuan/ketrampilan fasilitator desa, memfasilitasi masyarakat

untuk terbiasa mengeluarkan pendapat/aspirasi agar mendapatkan haknya dalam penentuan pengambilan keputusan dan mendorong TPK atau pengelola pembangunan desa agar menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.

Selanjutnya untuk masyarakat Meunasah Karieng sebagai desa dataran rendah dengan kerusakan akibat tsunami agak parah maka pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PPK pasca tsunami cukup efektif. Hal ini didukung oleh karakteristik masyarakat yang telah terorganisir di bawah kepemimpinan Kepala Desa yang memiliki wibawa dan disegani oleh masyarakat, hubungan kekerabatan yang erat, jiwa sosial masyarakat yang tinggi, potensi ekonomi agak memadai, tingkat pendidikan pelaku PPK yang mayoritas tamatan perguruan tinggi, sikap masyarakat yang agak optimis dan adanya kemauan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan pembangunan.

Untuk keberlanjutan pembangunan partisipatif di Desa Meunasah Karieng dibutuhkan adanya kebijakan pemerintah yang mendukung kemandirian masyarakat desa dalam mempertahankan sisi-sisi positif atau *power* masyarakat dalam mengelola pembangunan seperti penyediaan dana alokasi desa. Selain itu keberadaan lembaga/organisasi pengelola pembangunan PPK seperti TPK, FD dan Tim Pemelihara Kegiatan dan wakil masyarakat dalam forum Musyawarah Antar Desa juga perlu dipertahankan. Sementara itu untuk pengembangan informasi diperlukan adanya media informasi pembangunan yang mudah diakses oleh masyarakat.

5.2 Rekomendasi

Mencermati hasil dari penelitian ini, maka ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan antara lain:

1. Pemerintah;
 - a. Penerapan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca tsunami di Kecamatan Lhoknga perlu dilanjutkan, dengan menggunakan proses pemberdayaan yang dinamis atau menyesuaikan dengan tipologi keberdayaan masyarakat dan setiap selesai satu rangkaian pelaksanaan kegiatan pembangunan perlu dilakukan evaluasi terhadap perkembangan keberdayaan masyarakat.
 - b. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bekerjasama dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh agar mempercepat upaya pemulihan daerah tsunami, seperti penyelesaian rumah bagi masyarakat Mon Ikeun, penyediaan fasilitas air minum dan saluran irigasi untuk masyarakat Lambaro Seibun.
 - c. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar hendaknya menyediakan Dana Alokasi Desa secara rutin yang pengelolaannya (perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian) diserahkan kepada masyarakat desa agar dapat mengembangkan keswadayaan masyarakat.
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Besar agar mengadakan program pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa secara intensif dengan merekrut masyarakat yang menjadi pelaku PPK guna meningkatkan kemampuan mereka dan punya kesempatan terlibat langsung dalam pengelolaan pembangunan desa.

2. Fasilitator PPK; FK Lhoknga harus mendorong kemandirian FD dan TPK desa dengan cara membimbing dan melatih ketrampilan agar mampu meningkatkan motivasi masyarakat, memandu jalannya musyawarah di desa dan trampil dalam melaksanakan pembangunan.
3. Masyarakat;
 - a. Pemimpin/tokoh masyarakat harus berupaya menumbuhkan kembali jiwa sosial masyarakat pasca tsunami yang mulai bergeser ke arah individualisme.
 - b. TPK atau pengelola pembangunan desa agar selalu berupaya menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat desa.
 - c. Masyarakat harus terbiasa menyampaikan pendapat/aspirasi di dalam forum musyawarah atau forum pengambilan keputusan pembangunan.
 - d. Perlu adanya penyediaan media informasi pembangunan yang mudah diakses oleh masyarakat desa seperti koleksi produk perencanaan pembangunan, buletin atau brosur yang memuat informasi pembangunan.

5.3 Usulan Studi Lanjutan

Adapun usulan topik yang dapat direkomendasikan untuk studi lebih lanjut, antara lain:

- ⇒ Kajian tentang Hubungan Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan Kapasitas Masyarakat di bidang Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif.
- ⇒ Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PPK terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat di suatu Wilayah Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, John. 1996. *Sharing the City: Community Participation in Urban Management*. London : Earthscan Publications Limited.
- Abdul Hadi, dkk. 2006. *Laporan Bulanan Kolektif Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar bulan Oktober 2006*. Fasilitator Kecamatan Lhoknga.
- Bartle, Phill, 2002. *Participatory Method of Measuring Empowerment*. Modul Pelatihan Pemberdayaan.
- Budiharsono, Sugeng. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bungin B, 2005. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Diwiryono, Ruslan, 1996. *Pembangunan Prasarana Perkotaan di Indonesia*. Panel Nasional Ahli Pembangunan Perkotaan. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Drucker, peter, F.1978. *Manajemen: Tugas dan Tanggung jawab Praktek*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Chambers, Robert. 1992. *Rural Appraisal, Rapid, Rilex and Participatory*. Terjemahan Y. Sukoco, Yogyakarta: Yayasan Mitra Tani.
- Cheema, G. Shabbir. 1987. *Urban, Shelter and Services*. New York: Praeger.
- Dahl, Robert ,1983. *Democracy and Its Critics*. New Haven Conn: Yale University Press.
- Friedmann, John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Chambridge: Blackwell Publishers.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Hulme, David & M. Turner, 1990. *Sociology of Development: Theories, Policies and Practices*. Hertfordshire: Harvester Whearsheaf.
- Karl, M, 1995. *Women and Empowerment: Participation and Decision Making*. London : Zed Books Ltd.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

- Kecamatan Lhoknga dalam Angka 2005*. Kota Jantho: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Besar, 2006.
- Midgley, James. 1986. *Community Participation, Social Development and The State*. London: Methuen.
- Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*. (Terjemahan : Matheos Nalle). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muchdie dkk. (ed.) 2001. *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah: Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Teknologi*. Jakarta : BPPT.
- Nurmandi, Achmad, 1999. *Manajemen Perkotaan*. Yogyakarta: Lingkaran Bangsa.
- Panudju, Bambang. 1999. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Paul, Samuel, 1987. *Community Participation in Development Projects-The World Bank Experience*. Washington DC: The World Bank.
- Parwoto, MDS, 1997. *Pembangunan Partisipatif*. Makalah pada Loka karya Penerapan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Pemukiman, 15-16 juli 1997 BKSNI. Jakarta.
- Penduduk Kabupaten Aceh Besar Pasca gempa dan Tsunami*. Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia: PT. Dharma Citra Putra, 2006.
- Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2002*. Tim Koordinasi PPK. Jakarta: Depdagri, 2002.
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Soetrisno, Loekman, 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sulistiyan, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung : Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).

- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugijoko, Budhi Tjahyati S. dan BS. Kusbiantoro (ed.). 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 414.2/313/SJ tanggal 23 Pebruari 2005 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan Pola Khusus Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2005*. Jakarta: Depdagri, 2005.
- Sutrisno, D, 2005. "Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang." Tugas Akhir tidak diterbitkan, Progam Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tampubolon, Mangatas. 2006. *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*. http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/32/pendidikan_pola_pemberdayaan_mas.htm. Download 11 Desember 2006.
- Wahab, Solichin Abdul, dkk., 2002. *Masa Depan Otonomi Daerah*. Malang: Percetakan SIC.
- Widodo, Erna dan Mukhtar. 2000. *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avyrous.
- Wahyuningsih, D, 2005. *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Salaman Mloyo Kabupaten Semarang*. Tugas Akhir tidak diterbitkan, Progam Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Sukmaniar, dilahirkan pada tanggal 7 Nopember 1974 di Aceh Besar. Sampai sekarang masih berdomisili di desa tempat kelahiran, tepatnya di Mon Alue Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Provinsi NAD berada di ujung barat pulau Sumatera yang pada akhir tahun 2004 mengalami kejadian gempa bumi dan tsunami yang sangat dahsyat.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Bukit Baro II Jruak pada tahun 1986, tamat Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Jeureula pada tahun 1989, dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Banda Aceh pada tahun 1992. Kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) Banda Aceh yang diterima melalui jalur USMU (Undangan Seleksi Masuk Universitas) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) jurusan Matematika. Penulis berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) dengan gelar Sarjana Sains (S.Si) pada Nopember 1997. Dan terhitung mulai 1 Maret 1999 penulis diterima sebagai PNS di jajaran Pemda Kabupaten Aceh Besar dan bertugas sebagai staf Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Aceh Besar. Kemudian pada Desember 2001 penulis dilantik menjadi Kasubbid Perkreditan dan Bantuan Pembangunan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya pada Agustus 2006 penulis berkesempatan melanjutkan studi Pascasarjana (S-2) di Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota (MTPWK) Universitas Diponegoro Semarang dengan dukungan beasiswa dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) angkatan III.

Penulis merupakan anak sulung dari 7 bersaudara yang dilahirkan dari pasangan pendidik Anwar Achmad, A. Ma dengan Suwardiah, A. Ma yang menekankan pada pentingnya menimba ilmu pengetahuan dengan penuh ketekunan dan kesabaran, sehingga dengan berkat rahmat Allah SWT dan iringan doa orang tua serta dukungan orang tercinta, penulis telah mampu menyelesaikan kuliah S-2 dengan gelar Magister Teknik (MT).